



BULETIN VIRAJATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD
Edisi I Oktober 2020

SESKOAD
Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



SINERGI
UNTUK NEGERI



**MANUSIA UNGGUL
INDONESIA MAJU**

PRAKATA



Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada Hari Ulang Tahun TNI ke-75 ini Seskoad dapat menghadirkan "Buletin Virajati", sebuah media komunikasi *online* Lembaga Pendidikan tertinggi di TNI Angkatan Darat, Seskoad. Pada edisi perdana ini tema yang diangkat adalah "Manusia Unggul, Indonesia Maju". Tim redaksi telah mengemas ragam tulisan-tulisan yang menarik, mulai dari studi kasus militer, *capacity building*, inovasi, opini, serta bedah buku. Harapan kita semoga berbagai buah pemikiran tersebut dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan memperkuat literasi para pembaca, terutama prajurit dan PNS TNI AD, serta para Pasis Pendidikan Reguler Seskoad maupun Kursus Perwira Perencanaan Strategis beserta keluarga, teman sejawat dan juga para kerabatnya.

Redaksi menyadari sepenuhnya, tentu edisi perdana ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sekalian sangat kami harapkan demi pengembangan "Buletin Virajati" di masa mendatang. Format media *online* sengaja dipilih dan dirancang khusus demi kemudahan penyebarluasan informasi serta kenyamanan para pembaca dalam mengakses media Buletin *online* ini. Silahkan menyebarluaskan "Buletin Virajati" kepada kolega dan keluarga pembaca yang budiman melalui media sosial dan jejaring yang dimiliki. Diharapkan pembaca sekalian juga dapat bergabung dengan berpartisipasi dalam menuangkan ide dan gagasannya melalui "Buletin Virajati" demi kemajuan dan kejayaan TNI AD dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Selamat Membaca.

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Penasihat

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.E.

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani M.Sc.

Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M.

Kolonel Czi Dian Hendiana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Khairudin

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Serti Faizal Ridho Ilhami

Pengatur Muda/ III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl Jend. Gatot Subroto 96 Bandung

Alamat Email

bulletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Instagram

<https://www.instagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Buletin Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Buletin Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Virajati Edisi I bulan Oktober 2020 bisa tersaji di hadapan para pembaca sekalian bersamaan dengan momentum peringatan HUT ke-75 TNI tahun 2020. Dengan semangat "Sinergi untuk Negeri" Buletin Virajati edisi perdana ini mengusung tema "Manusia Unggul, Indonesia Maju" dan menghadirkan studi kasus militer Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai media pembelajaran bagi para pemimpin dan calon pemimpin militer di masa depan.

Demikian pula dalam rangka menciptakan manusia unggul demi Indonesia yang lebih baik, edisi kali ini juga memuat beberapa artikel mengenai *capacity building*, baik melalui peningkatan sumber daya prajurit TNI melalui kemampuan komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* maupun peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan dan kualitas Tenaga Pendidik di lingkungan Seskoad, serta Pasis Pendidikan Reguler melalui kurikulum yang demoratis dan metode pembelajaran *adult learning*.

Di rubrik Inovasi kami menampilkan cara berswasembada daging sapi dalam rangka menghadapi dampak ekonomi akibat Covid 19 serta kreativitas pembuatan mesin pencuci tangan otomatis sebagai salah satu inovasi di masa pandemi. Pada rubrik Opini disajikan dua artikel menarik yang mempertanyakan nasionalisme bangsa, serta cara memerangi radikalisme ala satuan tempur. Pada rubrik Penutup juga diulas tentang bedah buku mengenai kemampuan logistik negara Tiongkok dalam pengerahan kekuatan militernya ke luar negeri.

Selamat menikmati rubrik-rubrik pilihan kami, semoga Pembaca yang budiman berkenan. Demi kemajuan dan kebaikan Buletin Virajati di masa mendatang dengan kerendahan hati kami nantikan masukan para Pembaca sekalian.

TESTIMONI

"Kehadiran Buletin Virajati adalah salah satu yang ditunggu. Kebanggaan tersendiri ketika Seskoad berinovasi menciptakan media komunikasi online sebagai sarana bertukar informasi yang berkualitas. Yang paling ditunggu adalah artikel sejarah militer dan lessons learned sebagai sarana pembelajaran calon pemimpin TNI AD di masa depan. Ditunggu ya kehadiran edisi berikutnya. Kita harus menjadi bangsa pemenang!!!!"

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

"Saluuut dan bangga pada almamater Seskoad, di tengah kesibukan rutinitas kegiatan Seskoad masih sanggup menghadirkan kumpulan artikel bermutu dan bermanfaat. Semoga menambah literasi kita semua, maju terus, serta semoga dapat berkembang lagi artikel serta rubrik-rubrik yang dibahas. Bravo! "

Letkol Caj (K) Julia Astuti, S.Sos., M.Han.

"Terima kasih atas kehadiran media komunikasi online yang bisa memberikan ruang bagi dosen, pasis, dan organik Seskoad untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka bagi kemajuan TNI AD. Diharapkan dengan dibukanya kran sharing informasi ini dapat menambah wawasan dan kualitas tenaga pendidik serta sekaligus meningkatkan mutu hasil pendidikan Seskoad."

Kolonel Inf Erwin Rustiawan, S.Sos.

"Buletin Virajati isinya sangat bagus dan berbobot. Banyak memuat pelajaran dan pesan moral sehingga dapat memotivasi Pasis agar lebih bersemangat dalam menuntut ilmu bagi bekal pengabdian yang lebih menantang. Kami berharap dapat terus mengakses Buletin ini meskipun nantinya kami telah lulus dan bertugas di satuan yang baru. Salam Sigap!"

**Mayor Inf Renoten
Ketua Senat Pasis Dikreg LIX Seskoad**

"Waduh surprise saya sangat bangga sebagai warga Seskoad, kali ini telah terbit media komunikasi online yang thok cher, mari kita bahu-membahu memajukan Seskoad yang amat kita cintai. Seskoad harus harum semerbak mewangi harum namamu abadi di hati kami semua.."

Pengatur Muda/III-A Ruri Rosmalinda





DAFTAR ISI

TEMA: "MANUSIA UNGGUL INDONESIA MAJU"

STUDI KASUS MILITER

KEBUNTUAN (STALEMATE) PERANG DUNIA I AKIBAT KETIDAKMAMPUAN PEMIMPIN MILITER ATAU KETERBATASAN TEKNOLOGI?

(Mayor Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.)

1

KARAKTERISTIK PERANG SETELAH PERANG DUNIA II

(Mayor Inf Aprianda, S.H.)

9

CAPACITY BUILDING

KOMUNIKASI SOSIAL BERBASIS CITIZEN JOURNALISM

(Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M.)

15

KURIKULUM DEMOKRATIS: MENCETAK PERWIRA PROFESIONAL DALAM KORIDOR DEMOKRASI

(Mayor Inf Fauzan Rifa'l Alfikri, S.E., MMAS.)

21

PENERAPAN ADULT LEARNING DI LINGKUNGAN SESKOAD

(Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS)

27

OPTIMALISASI KOMPETENSI DOSEN SESKOAD GUNA MENINGKATKAN MUTU KELUARAN PENDIDIKAN

(Kolonel Inf Kukuh Hartono, S.E.)

36

INOVASI

PERAN TNI AD MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN MELALUI SWASEMBADA DAGING SAPI DALAM RANGKA MENGHADAPI DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19

(Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si.)

42

INOVASI DI MASA PANDEMI COVID-19

(Mayor Inf Hamzah Budi Susanto, S.E./
Pasis Dikreg LIX, Seskoad)

48

OPINI

MENGGUGAT NASIONALISME BANGSA

(Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc.)

52

MEMERANGI PAHAM RADIKALISME ALA SATUAN TEMPUR

(Mayor Inf Imam Buchori, S.H./
Pasis Dikreg LIX, Seskoad)

55

BEDAH BUKU

CHINA'S LOGISTICS CAPABILITIES FOR EXPEDITIONARY OPERATIONS (KEMAMPUAN LOGistik TIONGKOK UNTUK MENDUKUNG OPERASI EKSPEDISI MILITER)

(Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos)

61

KEBUNTUAN (*STALEMATE*) PERANG DUNIA I AKIBAT KETIDAKMAMPUAN PEMIMPIN MILITER ATAU KETERBATASAN TEKNOLOGI?



Major Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.

Pengantar

Perang Dunia Pertama (PD I) yang dimulai pada tahun 1914 adalah konflik antara Entente (Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat) melawan aliansi Central Power (Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Otoman Turki, dan Bulgaria). PD I merupakan salah satu konflik yang paling banyak memakan korban jiwa dalam sejarah manusia dengan perkiraan korban mencapai 9 hingga 11 juta orang. Pecahnya PD I dimulai dari serangan Jerman melalui bagian utara Prancis berdasarkan rencana perang *Schlieffen Plan*. Serangan Jerman pada awalnya cukup berhasil meskipun pada akhirnya dapat dihentikan oleh Angkatan Darat Prancis dalam Pertempuran Marne, sehingga memaksa Jerman untuk mengkonsolidasikan dan mempertahankan posisi terakhirnya dengan membangun sistem pertahanan parit. Pasukan Entente kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Prancis yang diduduki Jerman. Namun, serangan tersebut tidak berhasil menembus pertahanan Jerman sehingga Entente kemudian menerapkan taktik yang sama yang digunakan oleh pasukan

Jerman, yaitu membangun sistem pertahanan parit guna mempertahankan teritorinya. Selanjutnya kedua belah pihak semakin terlibat dalam pertempuran dengan memperluas sistem pertahanan parit lebih jauh ke utara dengan tujuan untuk saling mengepung. Hingga awal 1915, kedua belah pihak telah membangun sistem parit yang semakin kompleks, yang membentang dari Pegunungan Alpen dekat perbatasan Swiss di selatan hingga ke Selat Inggris di utara, dengan panjang sekitar 700 kilometer.¹

Sistem pertahanan parit tersebut dilengkapi dengan senjata pertahanan modern dan diawaki oleh ratusan ribu personel. Para komandan pasukan dari kedua belah pihak mencoba mengembangkan taktik untuk dapat menerobos pertahanan lawan karena tidak menemukan cara untuk melambung atau mengepung musuh. Teater barat PD I akhirnya mengalami kebuntuan (*stalemate*) dengan masing-masing pihak menderita korban jiwa yang sangat besar tanpa dapat merebut wilayah teritorial dalam jumlah yang signifikan dalam periodetahun 1914-1918.

1. Deist, 'Strategy and Unlimited Warfare in Germany: Moltke, Falkenhayn, and Ludendorff', 271.



PD I menunjukkan penggunaan kemajuan teknologi sebagai pengganda kekuatan (force multiplier) di medan perang. Kemajuan teknologi senapan mesin dan artilleri mengubah karakter perang dan menjadi senjata paling mematikan saat diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan sehingga memberikan keunggulan bagi pihak bertahan. Namun, sebagian besar pemimpin militer pada awal PD I tidak menyadari keunggulan tersebut dan tidak mampu menyesuaikan taktik mereka dengan cepat. Para pemimpin militer dalam Perang Dunia I seperti Haig, Joffre, von Moltke dan Falkenhayn gagal memahami bahwa karakter perang telah berubah dari peperangan manuver (manoeuvre warfare) menjadi perang posisi (position warfare) sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan revolusi daya tembak. Akibatnya, mereka gagal menyesuaikan operasi dan taktik yang sebagian besar berfokus pada serangan untuk menerobos garis pertahanan musuh.

Perkembangan teknologi militer pada PD I

PD I memperlihatkan pengintegrasian teknologi modern ke medan pertempuran. Revolusi industri dan daya tembak mendorong perkembangan persenjataan modern dan perlengkapan pendukung lainnya serta menggeser keseimbangan antara daya tembak dan kemampuan manuver ke tingkat yang belum pernah dialami sebelumnya. Pemanfaatan

teknologi modern seperti senapan mesin dan artilleri di medan perang telah mengubah karakter pertempuran yang sebelumnya masih didominasi oleh manuver pasukan dalam jumlah besar. Saat digunakan pada sistem pertahanan, senapan mesin dan artilleri terbukti lebih mematikan bagi pihak penyerang karena memberikan kekuatan penghancur yang masif. Keunggulan utama dari senapan mesin adalah pada jumlah tembakan (*fire rate*) yang lebih tinggi daripada senapan biasa, sehingga membuatnya menjadi sangat mematikan. Pasukan bertahan akan menempatkan senapan mesin pada posisi yang strategis. Mereka juga menerapkan metode jarak tembak mematikan yang saling tumpang tindih untuk menciptakan '*firewall*' yang menutupi garis depan.² Meskipun satu senapan mesin dihancurkan, senapan mesin di kiri dan kanan masih dapat melindungi ruang di antaranya. Ketika PD I dimulai pada tahun 1914, taktik serangan masih bersifat linier. Taktik infanteri yang dibentuk dalam tiga gelombang serangan akan menjadi sasaran empuk senapan mesin. Taktik pertahanan menggunakan senapan mesin kemudian memaksa masing-masing pihak untuk memilih posisi bertahan sehingga menyebabkan kebuntuan di teater barat.

Namun demikian senapan mesin juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kemampuan manuvernya yang terbatas karena bobotnya lebih berat dari senapan perorangan dan sulitnya dukungan amunisi oleh industri militer. Rata-rata berat senapan mesin yang digunakan oleh pihak yang berperang di teater barat bervariasi mulai dari 47 hingga 67 kilogram. Senjata jenis ini beserta amunisinya, membutuhkan setidaknya enam orang untuk memindahkannya dari satu posisi ke posisi lain.³ Faktor bobot menunjukkan bahwa senapan mesin terlalu berat untuk diintegrasikan ke dalam taktik ofensif mobil, sehingga senapan mesin lebih cocok untuk digunakan dalam tugas pertahanan. Tampilan awalnya sebagai senjata yang bergerak lambat dikawatirkan akan membatasi manuver unit penyerang.

2. Jack R. Nothstine, 'The Development of the Machine Gun and Its Impact on the Great War', *Infantry* 1, no. July (2006); 53.

3. Jack R. Nothstine, 'The Development of the Machine Gun and Its Impact on the Great War', *Infantry* 1, no. July (2006); 53.



Kelemahan berikutnya adalah kapasitas produksi amunisi untuk mendukung pertempuran. Masalah ini menjadi semakin rumit karena melibatkan politisi dan mobilisasi sumber daya manusia untuk menopang perang. Sebagai ilustrasi, selama fase awal PD I di teater barat, sebagian besar politisi di Inggris beranggapan bahwa perang akan berlangsung singkat dan akan berakhir 'sebelum Natal'. Pandangan ini berdampak pada kesiapan teknis untuk mendukung perang, termasuk produksi amunisi. Pada saat itu, industri amunisi Inggris relatif kecil dan hanya cukup untuk menopang perang dalam jangka waktu singkat. Pembatasan produksi amunisi menunjukkan tujuan politik yang tidak selaras dengan perubahan karakter perang. Kegagalan ini juga mendorong stalemate dalam PD I.

Keterbatasan teknologi lain yang mengakibatkan kebuntuan di teater barat adalah lambatnya perkembangan teknologi komunikasi untuk mendukung komando dan pengendalian dalam melakukan manuver pasukan. Pada fase awal PD I, terdapat kesamaan pandang dari para pemimpin militer terkait strategi perang, dan kebanyakan dari mereka sangat dipengaruhi oleh strategi bagaimana Napoleon melakukan perang. Napoleon menekankan pada kekuatan masif, kemenangan yang menentukan dan mengabaikan perang terbatas (*limited war*) untuk tujuan terbatas (*limited objective*).⁴ Taktiknya adalah dengan mengandalkan pasukan infanteri yang maju dalam tiga gelombang, infanteri ringan (*skirmisher*) untuk mendapatkan posisi tembak, pasukan utama dalam formasi mendalam, serta pasukan pendukung dan cadangan. Taktik ofensif Napoleon mengandalkan kecepatan dan mobilitas prajurit untuk memperoleh momentum serangan. Proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan

evaluasi tidak memerlukan sistem komunikasi yang canggih karena sebagian besar pertempuran dilakukan di medan pertempuran yang terbuka yang dapat diamati secara visual oleh para komandan. Namun, pada saat pecah PD I di teater barat, para pemimpin militer menghadapi perang yang memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan perang yang pernah mereka alami sebelumnya. Masalah utama dan yang selalu terjadi selama PD I adalah kesulitan dalam menyampaikan dan menerima informasi secara tepat waktu dan akurat.⁵ Umumnya garis pertahanan di bagian depan relatif luas dimana ditempatkan sebagian besar pasukan. Dalam beberapa pertempuran, terdapat beberapa kasus ketika pasukan berhasil menerobos garis pertahanan dan berhasil menduduki posisi kritis. Sayangnya, serangan tersebut kehilangan momentum ketika pasukan bantuan datang terlambat, dan situasi ini memungkinkan musuh untuk melancarkan serangan balik dan mengerahkan bala bantuan.

Hal tersebut dibuktikan oleh Angkatan Darat Inggris pada pertempuran di Neuve Chapelle pada 10-12 Maret 1915. Awalnya, operasi serangan berjalan sukses dengan dukungan tembakan artileri dan pengintai udara menggunakan pesawat terbang. Pesawat-pesawat pengintai mengirimkan informasi posisi pasukan Jerman dengan tepat, yang digunakan untuk pemboman artileri. Setelah dibombardir oleh tembakan artileri Inggris, pertahanan Jerman hancur, dan Inggris mendapat kesempatan untuk menerobos garis pertahanan Jerman. Namun, operasi serangan tersebut dengan cepat kehilangan momentum karena keterbatasan Inggris dalam teknologi komunikasi yang hanya mengandalkan sarana konvensional seperti caraka, merpati pos, dan flares/suar. Jerman dengan cepat mendatangkan bala bantuan sehingga akhirnya serangan berakhir tiga hari kemudian dengan hasil pasukan Inggris hanya dapat merebut sedikit wilayah dari Jerman.⁶ Keterbatasan teknologi komunikasi dalam mendukung komando dan pengendalian pasukan yang bermanuver cukup signifikan terutama pada saat terjadi perang dengan jumlah pasukan yang masif dan dilakukan

4. Peter Paret, 'Napoleon and the Revolution in War', in *Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age*, ed.

5. Peter Paret, vol. 29 (New Jersey: Princeton University Press, 2006), 139, accessed doi:10.2307/3105238.

J.H. Johnson, 'Stalemate! The Great Trench Warfare Battles of 1915-1917', London, Arms and Armour Press: 1995), 209..

mendatangkan bala bantuan sehingga akhirnya serangan berakhir tiga hari kemudian dengan hasil pasukan Inggris hanya dapat merebut sedikit wilayah dari Jerman.⁶ Keterbatasan teknologi komunikasi dalam mendukung komando dan pengendalian pasukan yang bermanuver cukup signifikan terutama pada saat terjadi perang dengan jumlah pasukan yang masif dan dilakukan di wilayah yang luas. Komandan kehilangan gambaran taktis dari medan perang, sehingga mereka gagal mengambil keputusan yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan situasi. Keterbatasan komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan kebuntuan di teater barat.

Strategi 'menguras energi' (*wearing out*) Inggris



Seperti pada perang lainnya, pengaruh pemimpin militer dalam PD I sangat penting dalam memahami tujuan politik negara saat memasuki perang dan kemudian menerapkan strategi dan operasi militer dalam pertempuran.

Salah satu pemimpin militer yang paling berpengaruh dalam sejarah Angkatan Darat Inggris adalah **Field Marshal Douglas Haig**. Dalam PD I, Haig menjabat sebagai komandan Angkatan Darat Pertama selama fase awal perang, dan sejak 1915, ia diangkat sebagai panglima tertinggi Pasukan Ekspedisi Inggris di Prancis. Ada beberapa faktor penting dalam kepemimpinan Haig yang mengakibatkan kebuntuan di teater barat, diantaranya Haig tidak dapat menyelaraskan strategi militer dan operasionalnya dengan tujuan politik negara Inggris, preferensinya yang kurang tepat pada strategi "menguras energi" terhadap sistem pertahanan yang kuat, ketidakmampuan-nya untuk belajar dan menyesuaikan perubahan karakter perang, sikap keras kepala dalam

menerapkan taktik kavaleri, dan mengabaikan pemanfaatan senjata modern. Kombinasi faktor-faktor tersebut dalam kepemimpinan Haig memengaruhi cara perang Inggris di teater barat sehingga menyebabkan kebuntuan.

Faktor pertama dan terpenting dalam kepemimpinan Haig yang berkontribusi pada kebuntuan PD I adalah ketidakmampuannya untuk menyelaraskan strategi militer dan operasional dengan tujuan politik Inggris. Proses pengambilan keputusan kebijakan militer Inggris selama Perang Dunia I dilakukan oleh Lord Horatio Kitchener selaku Menteri Dalam Negeri Inggris, Sir William Robertson selaku Kepala Staf Umum Kerajaan, dan Sir Douglas Haig selaku Panglima Pasukan Ekspedisi Inggris di Prancis sejak Desember 1915. Haig meyakini bahwa kesuksesan dalam perang lebih bergantung kepada moral daripada kualitas fisik⁷ sehingga pada tahun 1915, dengan kepercayaan diri yang tinggi meyakini bahwa perang dapat diakhiri dengan merencanakan serangan skala besar sebagai pertempuran yang menentukan. Strategi dan operasi militer Haig berdasarkan pertempuran yang menentukan tidak selaras dengan tujuan politik Inggris dalam menjaga korban jiwa pada level yang dapat diterima. Penolakan Haig menunjukkan ketidakmampuannya untuk menyelaraskan strategi militer dengan tujuan politik Inggris. Strategi militer Haig terbukti tidak efektif menembus garis pertahanan Jerman yang kuat sehingga menyebabkan korban jiwa yang besar bagi pasukan Inggris.

Kedua, masalah kepemimpinan militer Haig terletak pada filosofi pertempurannya 'menguras energi musuh' (*wearing out enemy*) yang diimplementasikan pada strategi penerobosan yang menentukan selama periode kebuntuan di teater barat. Saat menghadapi lini pertahanan Jerman yang kuat, strategi Haig terbukti lebih berdampak pada pihak penyerang daripada pihak bertahan. Implementasi strategi Haig di teater barat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sebagai siswa Sekolah Staf dan Komando di akhir tahun 1890-an. Doktrin yang

6. Paul Harris and Sanders Marble, 'The "Step-by-Step" Approach: British Military Thought and Western Front, 1915–1917', *War in History* 15, no. 1 (2008), 21.

7. David French, 'The Strategy of Unlimited Warfare? Kitchener, Robertson, and Haig', in *Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914–1918*, ed. Roger Chickering and Stig Förster (Washington DC: Cambridge University Press, 2000), 285.

diajarkan diantaranya menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kemenangan dalam perang adalah dengan mengalahkan pasukan depan musuh, diikuti dengan serangan yang menentukan untuk mengejar musuh yang telah dikalahkan. Doktrin tersebut mengantisipasi bahwa musuh juga akan menerapkan strategi serupa sehingga kemenangan akan diperoleh oleh pihak yang dapat menunjukkan moral yang lebih tinggi, memimpin militer dengan kemauan yang lebih kuat dan jumlah pasukan yang lebih besar.⁸ Sebelum serangan Entente pada tahun 1918, prinsip-prinsip ofensif AD Inggris sangat dipengaruhi oleh filosofi Haig yang dirancang untuk menguras cadangan musuh sebelum serangan utama dilakukan. Namun, di era ketika musuh memiliki garis pertahanan yang kuat, 'pertempuran menguras energi lawan' pada akhirnya memiliki konsekuensi yang lebih besar bagi pihak penyerang daripada pihak bertahan. Penerapan strategi tersebut oleh AD Inggris sampai dengan tahun 1918 hanya menghasilkan pendudukan territorial yang kecil dengan korban jiwa yang sangat tinggi.

Ketiga, Haig juga menunjukkan keenggananinya untuk mengembangkan hal-hal taktis dalam menghadapi perubahan karakter perang yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Haig tidak berminat untuk belajar dan berbagi masalah taktis dengan Prancis. Hal tersebut membawa konsekuensi pada tahun 1916 dimana AD Prancis jauh lebih berkembang dalam taktik infanteri dan artileri daripada Inggris. Haig tidak dapat memanfaatkan senjata modern dalam operasi dan taktiknya di medan perang, karena sangat bergantung pada kavaleri. Haig menentang kenyataan bahwa kavaleri berkuda tidak bisa digunakan di medan perang modern yang didominasi oleh keunggulan daya tembak. Haig juga menolak dengan keras saran atau umpan balik taktis yang diprakarsai oleh komandan atau staf di bawahnya, meskipun saran tersebut didasarkan pada pembelajaran dari kegagalan pasukannya sendiri. Jenderal Sir Henry Rawlinson, komandan Angkatan Darat Keempat Pasukan Ekspedisi Inggris dan juga salah satu bawahan

Haig, mengusulkan konsep serangan 'gigit dan tahan' (*bite and hold*). Taktik tersebut terdiri dari beberapa serangan berkelanjutan untuk mencapai tujuan terbatas sehingga memberikan beberapa keuntungan bagi Inggris, diantaranya; memaksimalkan daya tembak, memberikan pengalaman tempur bagi pasukan baru untuk meningkatkan efektivitas taktis, menekan jumlah dan pada saat yang sama menimbulkan korban yang besar bagi Jerman. Haig menolak proposal Rawlinson karena preferensi taktis Haig masih sangat dipengaruhi oleh cara perang Napoleon yang menggunakan kavaleri dalam strategi penerobosan.⁹ Kombinasi dari kegagalan Haig dalam beradaptasi dengan perkembangan taktik dan teknologi dengan pendekatannya yang tidak fleksibel serta keenggannanya untuk mendengarkan nasihat bawahan menyebabkan strateginya hanya bertumpu pada serangan tunggal yang menentukan. Strategi Haig terbukti gagal untuk memecahkan kebuntuan di teater Barat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa di pasukan Inggris.

Strategi Total War Prancis



Peran Jenderal Joseph Joffre sebagai panglima tertinggi AD Prancis dari 1914 hingga 1916 sangat penting karena dia adalah yang bertanggung jawab atas pengembangan operasi dan taktik untuk Prancis di teater barat selama periode kebuntuan. Pertama, Prancis telah meramalkan bahwa kemungkinan besar Jerman akan menjadi lawan, oleh karena itu Prancis mengembangkan rencana perang sebagai strategi militer. Undang-undang tentang senjata yang disetujui pada tahun 1913-1914 menekankan bahwa hanya serangan dengan 'pengorbanan besar yang dapat menghancurkan kekuatan musuh'. Prancis mengembangkan Rencana Perang XVII, yang memungkinkan bagi pimpinan militer Prancis

8. Paul Harris and Sanders Marble, 'The "Step-by-Step" Approach: British Military Thought and Western Front, 1915–1917', *War in History* 15, no. 1 (2008), 21, accessed doi:10.1177/09683445080150010101.

9. Robin Prior and Trevor Wilson, 'The Somme' (New Haven and London, Yale University Press, 2005) 306-7.

untuk melaksanakan pertempuran dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk cadangan, dalam rangka mempertahankan wilayah Prancis. Joffre berasumsi bahwa perang di Eropa akan berlangsung singkat dan kemenangan akan diraih melalui serangan yang menentukan. Joffre mendukung gagasan 'perang total' dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Penerapan doktrin 'perang total' di bawah Rencana Perang XVII oleh Joffre menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana kemampuan Prancis dalam mendukung perang melalui mobilisasi nasional. Adanya asumsi bahwa perang akan berlangsung singkat dan ditentukan oleh sebuah serangan yang menentukan juga menunjukkan kegagalan Joffre dalam memprediksi perang yang akan dihadapi Prancis. Pada kenyataannya, perang tidak berlangsung singkat dan Prancis tidak siap untuk melakukan perang yang berkelanjutan.

Kedua, kepemimpinan Joffre bertumpu pada ketidakfleksibelannya dalam melaksanakan operasi ofensif penerobosan untuk menembus garis pertahanan musuh. Joffre bersikeras untuk tetap menerapkan strategi serangan meskipun musuh telah membangun sistem pertahanan yang kuat dan mematikan. Selama dua tahun pertama di teater barat, Joffre merupakan pendukung taktik "*L'offensive à l'outrance*" atau serangan habis-habisan yang diperkenalkan oleh **Kolonel Louis Loyzeau de Grandmaison**, salah satu dosen di Sekolah Staf dan Komando Prancis. Grandmaison meyakini bahwa serangan habis-habisan (*all out offensive*), merupakan kunci kemenangan.¹⁰ Sistem pertahanan parit dalam PD I membentang mulai dari Selat Inggris ke Pegunungan Alpen sehingga tidak memungkinkan melaksanakan pelambungan terhadap garis pertahanan musuh. Penerapan teknologi seperti senapan mesin, artilleri, dan kawat berduri mendukung dominasi pihak bertahan terhadap pihak penyerang. Meski demikian, Joffre tetap percaya bahwa serangan dengan persiapan yang cukup akan berhasil. Keputusannya untuk terus melakukan serangan penerobosan meskipun kemungkinan keberhasilannya kecil, telah

meningkatkan jumlah korban jiwa di pasukan Prancis, tanpa memperoleh teritori yang berarti. Kegagalan Joffre dalam mengembangkan perubahan operasional dan taktis untuk beradaptasi dengan situasi medan pertempuran terbukti mengarah kepada kebuntuan.

Kelemahan ketiga dari kepemimpinan Joffre adalah keengganannya untuk belajar dan mengembangkan operasi dan taktik Prancis. Seperti Haig, Joffre juga menunjukkan sedikit minat dalam mengevaluasi pertempuran di tingkat operasional dan taktis serta kurang memperhatikan inisiatif taktis bawahannya. Keengganannya Joffre atas inisiatif perwira yunior ditunjukkan ketika ia menolak untuk mempelajari lebih jauh konsep brilian yang disampaikan oleh **Kapten Andre Laffargue**. Laffargue menulis studi taktis '*Etude sur l'attaque*', yang menyatakan bahwa taktik ofensif harus berfokus pada identifikasi dan isolasi, bukan penghancuran titik kuat musuh. Lafargue juga mengusulkan adanya inisiatif yang lebih besar bagi perwira yunior di medan perang untuk memanfaatkan pasukan dengan senjata otomatis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tembak infanteri. Konsep Laffargue tentang unit kecil dengan inisiatif yang lebih besar dan dilengkapi dengan senapan mesin justru diterapkan oleh '*Stormtrooper*' Jerman dalam serangan musim semi mereka pada tahun 1918. Hal tersebut berhasil memecah kebuntuan meskipun Jerman mengalami serangan balik setelah kehilangan momentum serangan yang disebabkan oleh logistik yang terlambat.

Schlieffen Plan Jerman



Pihak Jerman pada PD I dipimpin oleh **Jenderal Helmuth von Moltke** yunior pada fase awal perang, dan kemudian dilanjutkan oleh Jenderal Erich von Falkenhayn. Kedua pemimpin militer Jerman tersebut gagal mengembangkan operasi dan taktik yang efektif untuk mencapai tujuan nasional Jerman. Kesalahan von Moltke yang berkontribusi pada terciptanya kebuntuan

10. Williamson Murray, *Military Adaptation in War with Fear of Change* (New York, Cambridge University Press, 2011), 81.

disebabkan oleh kegagalan penerapan Schlieffen Plan. Sedangkan kegagalan Falkenhayn disebabkan oleh ketergantungannya pada 'Pertempuran Attrisi' (*war of attrition*) dan kebijakan pertahanan tanpa kompromi' (*uncompromising defence*) sehingga membuat banyak korban jiwa pasukan Jerman demi mempertahankan garis pertahanan.

Sejatinya Jerman memasuki PD I tanpa memiliki strategi apa pun, dan para pemimpin militernya secara murni menerapkan Rencana Schlieffen, yang merupakan rencana operasi untuk melawan Prancis dan Rusia dalam perang dua teater.¹¹ Jenderal Helmuth von Moltke muda sebagai Kepala Staf Umum Jerman dari tahun 1906 hingga 1914, gagal melaksanakan rencana tersebut karena gagal dalam menyeimbangkan kecepatan pasukan dengan komando dan pengendalian serta dukungan logistik. Dalam fase pertama perang, Prancis dapat dikalahkan, dan Pasukan Ekspedisi Inggris dapat dipukul mundur. Pasukan sayap kanan luar Jerman yang merupakan tanggung jawab Angkatan Darat Pertama di bawah Jenderal von Kluck menyadari bahwa posisi mereka berada di bawah ancaman ofensif Prancis. AD Pertama Jerman juga terputus dengan pasukan tetangga dan markas besarnya di Luksemburg. Pasukan Von Kluck terisolasi sehingga kemudian dia memutuskan untuk melarikan diri dari upaya pelambungan musuh. Meskipun von Kluck dan AD Pertama tidak mengalami kekalahan taktis yang berarti, pemunduran pasukan tersebut menghancurkan rencana Moltke di teater barat. Kegagalan konsep strategic envelopment dalam Schlieffen Plan menunjukkan kerentanan rencana tersebut terhadap posisi pasukan yang dipertahankan dengan baik, yang kemudian berubah menjadi pihak menyerang. Kegagalan Von Moltke dengan mengurangi jumlah pasukan di sayap kanan Jerman mengakibatkan posisi Prancis menjadi semakin kuat.

Setelah Rencana Schlieffen gagal, von Moltke digantikan oleh **Jenderal Erich von Falkenhayn** sebagai Kepala Staf Umum Jerman. Seperti

pendahulunya, Falkenhayn mendukung konsep *strategic envelopment* Schlieffen. Selama pembangunan sistem pertahanan parit pada tahun 1914, Falkenhayn mencoba menyerang Pasukan Ekspedisi Inggris melalui strategi pelambungan. Strategi tersebut gagal, dan setelah beberapa bulan kedua belah pihak mempertahankan garis depan mereka dengan kuat dari mulai Pegunungan Alpen Swiss hingga ke Selat Inggris. Kesalahan Falkenhayn lainnya dalam operasi dan taktik terjadi selama Pertempuran Verdun. Setelah beberapa kekalahan, Falkenhayn mengusulkan serangan untuk mematahkan kendali Inggris atas sekutunya secara tidak langsung. Falkenhayn menerapkan strategi untuk mencegah Prancis melanjutkan perang dengan jalan memaksa Prancis untuk menyerang dengan semua sumber daya mereka. Strategi tersebut dikenal dengan 'membuat Prancis kehabisan darah' (*bleed France white*), dimana jika Prancis memutuskan untuk melakukan serangan secara besar-besaran, pasukan Prancis akan berdarah-darah sampai mati.¹² Selanjutnya moral Angkatan Darat Prancis diperkirakan akan menurun, dan Jerman dapat mencapai tujuan strategisnya. Awalnya, serangan tersebut dimaksudkan sebagai *war of attrition* melawan Prancis. Namun, hal itu berubah menjadi pertempuran yang merugikan Jerman. Hasil akhir dari serangan tersebut malah menimbulkan banyak korban di pasukan Jerman, tanpa perolehan teritorial yang signifikan.



(Falkenhayn)

11. Wilhelm Deist, 'Strategy and Unlimited Warfare in Germany: Moltke, Falkenhayn, and Ludendorff', in Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, ed. Roger Chickering and Stig Förster (Washington DC: Cambridge University Press, 2000), 265.

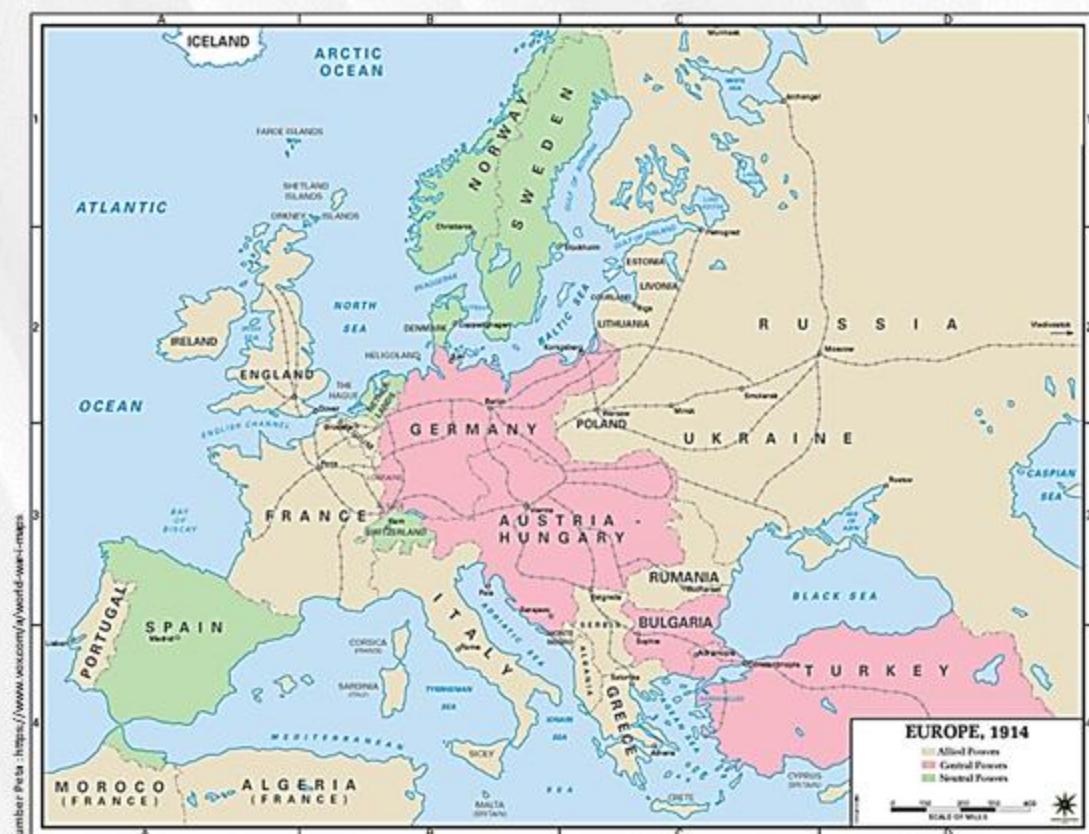
12. Michael Geyer, 'German Strategy in the Age of Machine Warfare, 1914-1945', in Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, ed. Peter Paret, vol. 29 (New Jersey: Princeton University Press, 2006), 534, accessed doi:10.2307/3105238.

Kesimpulan

Meski kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi pihak yang bertahan, kebuntuan teater barat dalam PD I secara dominan ditentukan oleh ketidakmampuan para pemimpin militer di kedua belah pihak dalam memahami dan beradaptasi terhadap perubahan karakter perang. Ketidakmampuan para pemimpin militer dalam menyelaraskan strategi dengan tujuan politik negara, kelemahan dalam mengadaptasi strategi perang, dan keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi ke dalam strategi tempur, merupakan faktor kritis yang menyebabkan *stalemate* pada PD I.

Kebuntuan di teater barat selama periode 1914-1918 memberikan pelajaran tentang pentingnya adaptasi, di mana kedua belah pihak secara konsisten menghadapi perubahan kondisi di medan perang. Kegagalan dalam proses pembelajaran dan adaptasi (*learning and adaptation*) mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Untuk mengantisipasi hal serupa, para pemimpin militer harus mampu memahami karakter perang, dan menyesuaikan taktik demi meraih kemenangan. Para pemimpin militer juga harus mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi eselon bawahan untuk dapat mempelajari dan mengevaluasi setiap perubahan karakter perang.

Major Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS. adalah abituren Semapa PK 2001 dan lulusan Australian Command and Staff Course/ACSC 2019 (Sesko Australia), saat ini menjabat sebagai Kainfolaha Seskoad.



European alliances in 1914

KARAKTERISTIK PERANG

SETELAH

PERANG DUNIA KE - 2



Major Inf Aprianda, S.H.

Clausewitz menyebutkan, "Tidak seorang pun yang memulai perang, yang dalam akal sehatnya harus melakukannya tanpa terlebih dahulu menjelaskan dalam pikirannya apa yang ingin dia capai dari perang itu, dan bagaimana dia bermaksud untuk melakukannya."



Artinya menyampaikan tujuan politik yang jelas adalah tugas paling kritis yang harus dijalankan sebelum berperang. Jika negara tidak tahu tujuan akhir yang diinginkan, akan sulit untuk mendefinisikan kemenangan dalam perang. Dalam konteks militer, penting untuk menetapkan tujuan untuk menentukan keberhasilan di tingkat taktis, operasional, dan strategis. Penulis percaya istilah sukses dalam peperangan dapat didefinisikan sebagai pencapaian negara untuk mencapai tujuan akhir suatu negara atau politik yang diinginkan di semua tingkatan, yang berarti kemenangan dalam satu pertempuran tidak mewakili keberhasilan dalam perang itu sendiri.

Beberapa ahli strategi percaya bahwa sifat perang tidak pernah berubah, selalu merupakan tindakan kekerasan untuk memaksa musuh melakukan keinginan kita, dan itu pada dasarnya bersifat politis. Namun, karakter dan cara berperang berubah dan menyesuaikan dengan waktu dan konteks. Karakter perang menggambarkan bagaimana perang tertentu terwujud secara langsung dalam domain fisik dan secara tidak langsung dalam domain kognitif. Revolusioner dalam urusan militer mendorong perubahan karakter perang. Misalnya, konsep senjata gabungan dan pengeboman strategis dalam Perang Dunia II dicirikan sebagai perubahan karakter perang. Jenis perang bisa berbeda dalam kasus perang setelah tahun 1945 sebagai penemuan senjata nuklir. Konsep perang total memiliki arti baru. Total perang akhir-akhir ini berarti tingkat kehancuran yang tidak dapat diterima. Dengan demikian, konsep perang total bisa jadi sudah usang, sedangkan perang terbatas lebih masuk akal untuk dilakukan setelah tahun 1945.

Tidak ada rumus mutlak untuk memenangkan perang, perang bukanlah masalah Matematika yang dapat dengan mudah mendefinisikan bahwa yang lebih besar adalah pemenangnya. Jika negara-negara yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan militer yang kuat selalu menjamin akan memenangkan perang, maka muncul pertanyaan mengapa negara-negara besar

kalah dalam perang kecil dan bagaimana negara-negara lemah memenangkan perang. Jika teknologi maju dan kekuatan militer tidak menjamin memenangkan perang, maka harus ada pilihan lain untuk menjawab apa yang menjadi ciri khas peperangan yang berhasil sejak 1945. Perang yang terbatas adalah peristiwa yang kompleks, yang melibatkan dinamika politik, diplomatik, dan militer yang dinamis. Negara harus mempertimbangkan karakteristik yang dapat mencakup tujuan politik, strategi militer, strategi diplomatik untuk meraih sukses dalam perang terbatas. Dengan demikian, tulisan ini berpendapat bahwa karakteristik peperangan yang berhasil sejak 1945 adalah kemampuan intelijen yang efektif untuk mengembangkan penilaian rasional, operasi informasi untuk menciptakan efek psikologis baik dari musuh maupun sahabat, dan kemampuan penipuan untuk mendapatkan kejutan strategis di semua tingkatan. Kemampuan ini akan tetap penting dalam peperangan selama periode waktu tertentu. Karena kesuksesan tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan mengikuti rumusan strategi, dan mungkin bisa dikutip dari kegagalannya, tulisan ini akan mengkaji sukses dan gagal karakter-karakter yang telah diterapkan dalam perang sejak tahun 1945.

Pertama-tama, Sun Tzu menawarkan strategi untuk memenangkan perang, pendekatan terbaik dalam perang adalah pertama-tama menyerang strategi musuh. Pendekatan terbaik berikutnya adalah menyerang aliansi musuh. Pendekatan selanjutnya adalah menyerang pasukannya. Dia juga menyebutkan, "Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri; dalam seratus pertempuran Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya." Artinya strategi terbaik untuk berperang adalah mengetahui kemampuan musuh dan menghancurkan strategi mereka. Memahami sifat musuh, potensi intervensi, kepentingan, dan motivasi koalisi musuh adalah syarat prasyarat untuk berperang. Kecerdasan adalah kemampuan penting untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi prasyarat tersebut.

Kurangnya kemampuan intelijen untuk mendapatkan informasi yang memadai akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan gambaran yang kohesif dari suatu situasi

medan pertempuran. Namun, kemampuan intelijen yang kuat tidak selalu berarti jaminan untuk berhasil menggambarkan yang kohesif, karena kemampuan untuk memiliki akses informasi yang lebih mudah dapat memberikan informasi yang tidak proporsional yang bisa jadi tidak relevan. Ini menciptakan kebingungan yang berdampak pada ancaman yang salah atau tanggapan yang salah perhitungan. Data intelijen harus efektif, proporsional, relevan, dan direspon dengan penilaian rasional. Mengabaikan ini dapat menyebabkan kegagalan intelijen yang mempengaruhi tujuan politik yang diinginkan. Kegagalan tipikal seorang analis kecerdasan adalah gagal untuk menemukan bias kognitif yang menyebabkan mereka mengeluarkan penilaian yang optimis. Kegagalan khas suatu negara adalah lebih percaya pada prakONSEPsi strategisnya daripada perkiraan intelijen rasional.

Fungsi Intelijen terletak pada proses pengumpulan data tepat waktu, mengkomunikasikannya kepada pembuat keputusan, dan kemudian memberi kesan pada validitas atau relevansi informasi. Intelijen seharusnya memfasilitasi kombinasi komprehensif dari berbagai indikator ke dalam analisis keseluruhan. Tugas ini tentunya tidak mudah karena pengambil keputusan menuntut analis intelijen untuk menyediakan data pada waktu yang ditentukan. Tantangan analis intelijen adalah ketika mereka mengetahui informasi sebelumnya bahwa informasi itu memiliki sedikit relevansi dengan analisis keseluruhan suatu masalah, tetapi mereka berusaha menghindari kenyataan dan lebih memilih untuk memenuhi permintaan pembuat keputusan dengan mengeluarkan penilaian yang tidak rasional. Ini terbukti, seperti dalam Perang Vietnam, sebelum serangan Tet terjadi, Intelijen AS memalsukan laporan mereka untuk menunjukkan kemajuan dalam perang saat mereka menurunkan perkiraan intelijen tentang kekuatan Vietnam Utara. Mereka mengubah cara menghitung urutan pertempuran Vietnam Utara, tidak lagi menghitung milisi lokal Front Pembela Nasional dalam urutan pertempuran musuh. Analis intelijen militer AS tampaknya percaya perkiraan mereka sendiri yang direvisi dan

sebagian besar mengabaikan bukti yang meningkat bahwa Komunis mempertahankan kemampuan tempur yang signifikan. Mengingat perkiraan intelijen yang cacat itu, para pemimpin militer AS meremehkan kemampuan Vietnam Utara dan mengabaikan realitas kekuatan mereka.

Kegagalan intelijen lebih sering terjadi pada saat penggunaan daripada saat pengolahan, karena terkadang hasil penilaian intelijen dapat bertentangan dengan prakONSEPSI strategis yang telah dibuat oleh para pemimpin politik strategis. Kegagalan ini terbukti dalam Perang Yom Kippur karena pemimpin Israel telah membuat prakONSEPSI strategis bahwa kemungkinan Mesir untuk menyerang Sinai dan Dataran Tinggi Golan tetap kecil. Para pemimpin Israel percaya bahwa Mesir akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan kekuatan mereka sebelum mereka dapat memulai konflik bersenjata besar lainnya setelah 1967. Meskipun intelijen militer Israel mengidentifikasi tingkat komunikasi Mesir yang tidak biasa untuk manuver masa damai dan tingkat penyebaran pasukan yang luar biasa di dekat Terusan Suez, tidak ada analis intelijen yang secara serius mempertanyakan prakONSEPSI strategis tentang kemungkinan kecil untuk perang. Terlalu percaya diri terhadap perkiraan pemimpin politik membuat Angkatan Bersenjata Israel membuat rencana yang tidak realistik dan tidak siap untuk melawan kejutan Mesir di Terusan Suez dan Dataran Tinggi Golan. Meskipun intelijen sulit mencapai netralitas dan objektivitas yang ideal ketika memasuki arena politik, analis intelijen harus meyakinkan kebenaran realitas dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara efektif.



Sumber: Wikipedia

Hasil pengolahan intelijen harus efektif untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Analis harus melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan meyakinkan bukti dari sumber lain untuk menemukan masalah kritis lainnya dan menghindari tanggapan yang salah perhitungan. Analis intelijen harus mengingatkan kesadaran pembuat keputusan bahwa perang adalah berbagai ketidakpastian, dan membuat perhitungan keputusan lebih sulit daripada lebih mudah untuk menghindari respons salah perhitungan yang menyebabkan meremehkan musuh. Kemampuan intelijen yang efektif dapat mencegah kegagalan kebijakan dengan menyajikan fakta-fakta yang relevan dan tidak perlu dipersoalkan kepada para pengambil keputusan, sedangkan penilaian yang sangat baik dari para pengambil keputusan akan melengkapi hasil intelijen untuk membangun tujuan politik yang diinginkan. Itu terbukti dalam Perang Teluk, ketika Amerika Serikat menerapkan intelijen multidisiplin untuk mendapatkan fakta dari perspektif yang berbeda. Sumber intelijen dirancang terlebih dahulu untuk menghasilkan data yang dibutuhkan pembuat keputusan saat mereka membutuhkannya, bukan sekadar banjir fakta yang tidak terasimilasi. Selain itu, analis memberikan keluasan dan kedalaman detail yang akurat dari informasi yang terkumpul tentang program perang kimia Irak, susunan bertempur militer Irak, dan titik kritis kelemahan dari militer Irak. Kemampuan intelijen yang efektif ini berkontribusi pada keberhasilan kampanye udara, menghindari eskalasi untuk memasukkan Israel dan Negara-negara Arab, dan mencapai tujuan politik yang diinginkan.

Kedua, seperti yang disebutkan Clausewitz bahwa perang lebih dari sekadar "bunglon" sejati, sebenarnya ini adalah trinitas paradoks yang singkatnya, terdiri dari kekerasan primordial, kesempatan, dan nalar. Ketiga variabel ini terus-menerus berkaitan satu sama lain. Trinitas berfungsi sebagai magnet untuk menyeimbangkan tiga kekuatan perang: rakyat, militer, dan negarawan. Namun, seiring evolusi terjadi, perang kontemporer perlu dipertimbangkan sebagai elemen keempat, yaitu komunitas internasional. Jadi, begitu perang terjadi,

politik untuk menentukan tujuan politik yang jelas, keinginan untuk melawan militer, semangat rakyat, dan dukungan komunitas internasional untuk mencapai negara akhir yang diinginkan. Operasi informasi cukup kuat untuk mempengaruhi dan mengubah keinginan, sikap, keyakinan, dan perilaku orang baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam domain perang informasi menggunakan dimensi fisik dan informasional untuk mempengaruhi dimensi kognitif musuh dan teman, untuk menciptakan efek psikologis dan membentuk medan pertempuran fisik. Sukses dalam kampanye perang informasi harus mempertimbangkan tujuan internal dan eksternal. Pertarungan narasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesannya. Tujuan internal adalah untuk meningkatkan semangat juang penduduk, menjaga moral prajurit, mendapatkan dukungan internasional untuk upaya perang negara, serta melindungi rakyat atau kekuatan mereka sendiri dari segala upaya untuk dipengaruhi. Karena penduduk termasuk keluarga prajurit, maka motivasi penduduk harus diperhatikan secara serius untuk setiap operasi karena mempengaruhi kemauan dan semangat bangsa untuk bertahan dalam perang. Dukungan penduduk hanya dapat diperoleh jika masyarakat memahami apa yang mereka dukung dan apakah bangsa mampu mencapai apa yang diusulkannya. Hal itu terbukti dalam Perang Teluk, karena Presiden Bush menyadari syarat-prasyarat sebelum ia menetapkan tindakan militer tersebut adalah perlunya diyakinkan secara wajar atas dukungan rakyat Amerika. Dia membombardir publik dengan memanfaatkan kampanye media dengan penjelasan mengapa kami harus bertindak secara militer di Kuwait. Pengumuman tujuan militer tertentu semuanya dirancang untuk mendapatkan dukungan dari "rakyat" (keinginan untuk berperang). Alhasil, militer AS memperoleh dukungan penuh dari masyarakat Amerika dan berhasil mencapai tujuannya dalam perang Teluk. Mengabaikan tujuan ini menyebabkan kerugian perang karena publik yang frustrasi akan memaksa penarikan kemenangan militer. Terbukti dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat memperoleh dukungan terbatas dari masyarakatnya karena masyarakat menyatakan gerakan anti perang,

dilakukan oleh Vietnam Utara. Demonstrasi antiperang mempengaruhi opini publik secara tidak langsung yang pada gilirannya memicu tekanan untuk de-escalasi dan penarikan diri. Perang Vietnam juga memberikan contoh peran kampanye informasi untuk mendapatkan simpati internasional. Vietnam Utara menciptakan narasi dengan mengeksplorasi setiap cedera pada warga sipil atau kerusakan tambahan lainnya yang berasal dari pemboman AS, tidak hanya untuk membangun simpati, tetapi juga untuk menghasut oposisi internasional untuk membatasi target serangan udara AS di masa depan.

Perang informasi juga dapat memengaruhi kemampuan komando dan daya tempur dengan memengaruhi moral prajurit. Kemampuan para prajurit untuk mempertahankan kemauan mereka sangat penting untuk memenangkan perang. Dengan demikian, tingkat dan kondisi moral prajurit merupakan salah satu komponen terpenting kesiapan tempur militer untuk melakukan pertempuran dalam waktu tertentu. Napoleon Bonaparte percaya pada pepatah bahwa "moral adalah bagi fisik seperti tiga berbanding satu," lebih jauh menekankan poin bahwa kekuatan moral lebih menentukan kemenangan daripada angka. Perang informasi membantu komandan dalam mengembangkan keinginan untuk menang, memahami misi secara keseluruhan, dan loyalitas kepada sesama prajurit atau satuan. Itu terbukti pada D-Day 1944 ketika Jenderal Eisenhower mengeluarkan perintah untuk mendorong semangat tentara Sekutu dalam invasi 6 Juni 1944. Perintah itu dibagikan kepada 175.000 anggota pasukan ekspedisi pada malam invasi. Dia juga mengulangi perintah itu dalam pidatonya yang disiarkan melalui radio kepada pasukan. Alhasil, pasukan sekutu berhasil mengalahkan Jerman dalam pertempuran Normandia. Meskipun pertempuran D-Day tidak terjadi setelah 1945, pidato dari Eisenhower melegenda dan akan tetap menjadi contoh yang luar biasa dari kampanye informasi di masa depan.

Tujuan eksternal ditentukan oleh perubahan kemampuan yang diinginkan untuk pengambilan keputusan musuh, atau

usaha utama, dan menyebabkan efek psikologis atau menurunkan moral musuh. Tujuan-tujuan ini mempengaruhi kemampuan musuh untuk memaksakan dan menerapkan keinginan komandan melalui komando dan pengendalian mereka sehingga kemampuan atau kapasitas untuk memaksakan dan mendukung akan terganggu atau diturunkan. Membentuk lingkungan medan perang sangat penting untuk keberhasilan operasi. Perang informasi, karena biasanya upaya pendukung akan bermanfaat untuk membentuk lingkungan. Lebih lanjut, kampanye perang informasi melalui media akan bermanfaat untuk mengedepankan suatu keyakinan, konsep, atau ide yang tidak benar, jadi biarkan musuh salah memahami keadaan. Kampanye ini akan berguna untuk mendapatkan kejutan strategis. Bukti terjadi selama Perang Yom Kippur ketika orang Mesir itu menerapkan kampanye informasi yang rumit kemudian menyebabkan Israel salah menghitung rencananya. Misalnya, intelijen Mesir dengan hati-hati menanamkan cerita palsu tentang penyakit Sadat, dan mereka disiarkan di media; militer Mesir menanamkan cerita tentang masalah serius dengan peralatan Soviet di surat kabar Arab, dan pemerintah mengumumkan 20.000 pasukan mereka menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tanggal 4 Oktober 1973 (dua hari sebelum serangan). Kampanye informasi ini berhasil mempengaruhi keyakinan militer dan pengambil keputusan Israel bahwa kemungkinan perang dalam waktu dekat masih rendah. Dengan demikian, Mesir mencapai kejutan strategis mereka dalam serangan pada tanggal 6 Oktober 1973 dan militer Israel tidak siap untuk berperang dengan Mesir dan Suriah.

Terakhir, kejutan strategis dalam perang sangat penting untuk memfasilitasi penghancuran sebagian kekuatan pasukan musuh dengan lebih mudah. Kejutan selalu dimasukkan sebagai salah satu prinsip dasar perang. Penipuan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengamankan pencapaian kejutan militer di semua tingkatan. Rencana penipuan sangat penting dalam membentuk ruang pertempuran yang diinginkan, dengan tujuan untuk menipu persepsi musuh. Perencana operasional perlu

penipuan; kemampuan, dan niat. Tujuan dari "kemampuan berorientasi" adalah untuk mencegah musuh. Musuh akan kurang percaya diri untuk bertarung dengan kita, dan mereka akan berpikir untuk melipatgandakan usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan kekuatan kita yang sebenarnya dan tampak lebih lemah dari yang sebenarnya. Ini akan menghibur musuh ilusi kekuatan mereka, menjebak mereka untuk meremehkan kekuatan kita. Intentions oriented bertujuan untuk menarik perhatian musuh menjauh dari daerah yang kita inginkan, sehingga mereka akan disesatkan untuk menggunakan kekuatan utamanya. Kedua kriteria tersebut sangat berharga untuk membentuk ruang pertempuran, khususnya dalam fase pembukaan untuk mendapatkan kejutan strategis. Keberhasilan kejutan strategis dalam babak pembukaan perang selalu berkontribusi pada hasil secara keseluruhan. Hal itu terbukti pada Perang Yom Kippur saat pihak Suriah menipu militer Israel dengan melakukan aksi militer di utara, sedangkan Mesir melakukan latihan masa damai di dekat Terusan Suez. Kegiatan militer yang tidak biasa yang dilakukan oleh Suriah di utara menyebabkan perhatian Israel di selatan berkurang. Kondisi ini berkontribusi pada serangan mendadak di Terusan Suez.

Penipuan dapat berhasil jika didorong dan didukung di tingkat tertinggi kepemimpinan politik dan militer. Hal ini sebagai bukti bahwa militer Mesir dan Suriah menerapkan rencana penipuan yang komprehensif dengan mengintegrasikan rencana strategis, operasional, dan taktis dari presiden ke prajurit individu. Sadat dan Asad menginformasikan sebelumnya kepada beberapa orang penting di semua tingkatan tentang tanggal penyerangan untuk memberi mereka waktu untuk persiapan, tetapi dia tidak menyebutkan kapan waktu tepatnya penyerangan sampai tanggal 6 Oktober.





Sumber : Wikipedia

Operasi penipuan yang berhasil tidak mencoba mengubah persepsi korban yang dituju; sebaliknya mereka memperkuat dan memanfaatkan persepsi yang ada. Hal itu terbukti selama serangan Tet karena persepsi AS bahwa Vietnam Utara lebih cenderung menyerang daerah terpencil daripada daerah perkotaan. Untuk menarik perhatian AS dan sekutu menjauh dari pusat populasi, Vietnam Utara memanfaatkan persepsi AS dengan meluncurkan beberapa serangan di perbukitan di sekitar Khe Sanh. Vietnam Utara memperkuat persepsi serangan di pangkalan Marinir. Situasi ini sangat sesuai dengan apa yang diharapkan intelijen AS. Karena itu, para pemimpin angkatan darat AS di lapangan lebih memilih untuk memfokuskan kekuatannya pada peningkatan intensitas aktivitas dan keterlibatan Vietnam Utara di Khe Sanh dan di daerah terpencil lainnya. Operasi penipuan harus dijalankan terus menerus, tidak hanya sebagai pertunjukan tunggal atau pendek. Memahami budaya, sejarah, dan tradisi musuh berkontribusi pada keberhasilan rencana penipuan. Itu terbukti dengan serangan Mesir pada 6 Oktober, yang dikenal sebagai Yom Kippur (hari penebusan), hari paling khusyuk dalam Yudaisme. Selain itu, serangan mendadak dalam Perang Vietnam terjadi pada hari libur Tet, saat sebagian besar tentara Vietnam Selatan akan cuti.

Sebagai kesimpulan, Clausewitz percaya bahwa perang dalam kehidupan nyata penuh dengan ketidakpastian. Perang akan selalu menjadi peristiwa yang sangat tidak terduga yang dibentuk oleh gesekan, ketidakpastian, dan peluang serta oleh kekuatan psikologis, moral, dan kreatif yang tidak rasional. Diperkirakan perang terbatas sejak 1945, selalu mengandung dinamika politik, diplomatik, dan militer. Dengan demikian, perang sejak 1945 dapat diprediksi dan akan semakin kompleks, semrawut, dan penuh ketidakpastian. Jenis perang ini tidak menjamin bahwa negara adidaya akan selalu menang, dan yang lebih lemah akan selalu kalah. Itu tergantung pada bagaimana setiap negara memanfaatkan kemampuan mereka dengan hati-hati. Intelijen yang efektif, operasi informasi, dan penipuan membantu negara untuk dapat menggunakan kekuatan mereka dengan baik. Kemampuan Intelijen yang efektif untuk memberikan penilaian rasional sangat penting untuk meningkatkan kesadaran situasional para pembuat keputusan. Kemampuan intelijen yang efektif dapat membantu negara dalam menyampaikan tujuan politik yang jelas dan dapat mencegah kegagalan kebijakan. Operasi informasi selalu penting untuk mencapai tujuan politik, militer, dan diplomatik. Keberhasilan dalam operasi informasi meningkatkan semangat juang penduduk, moral prajurit, dan dukungan internasional yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan misi. Operasi penipuan selalu penting untuk membentuk ruang pertempuran untuk mendapatkan kejutan strategis. Kombinasi kemampuan dan niat yang berorientasi pada rencana penipuan akan menjadi penting untuk merekap persepsi musuh. Itu akan membuat musuh salah paham dan salah menghitung strategi kita. Integrasi komprehensif dari rencana penipuan dari tingkat strategis hingga tingkat taktis sangat penting tidak hanya untuk menyinkronkan rencana tetapi juga untuk mencegah segala upaya untuk membocorkan strategi ke musuh. Terakhir, penerapan ciri-ciri tersebut membantu negara dalam mencapai keberhasilan dan mencapai keadaan akhir yang diinginkan dalam perang sejak 1945.

Major Inf Aprianda, S.H. adalah abituren Akmil 2005 dan lulusan Army Command and Staff Course/ACSC (Sesko Pakistan), saat ini menjabat sebagai Ps. Kabagmindo Sdirdik Seskoad.



KOMUNIKASI SOSIAL BERBASIS CITIZEN JOURNALISM

BAGI KOMANDO KEWILAYAHAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M.

Salah satu fungsi utama TNI AD adalah pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode pembinaan bakti TNI, metode pembinaan ketahanan wilayah, dan metode komunikasi sosial. Komunikasi sosial yang dilaksanakan TNI AD akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok. Dengan komunikasi sosial yang efektif maka visi, misi, dan hasil kinerja TNI AD bisa dipahami oleh masyarakat. Komunikasi sosial yang efektif juga bisa menjadi wahana mendukung iklim kondusif wilayah, karena deteksi dini dan oegah dini dimulai dari proses komunikasi timbal balik yang baik. Demikian juga dengan komunikasi yang intens antara prajurit dan komponen bangsa yang lain maka akan dapat diketahui aspirasi masyarakat dan isu yang berkembang. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, komunikasi sosial sangat vital dalam mendukung kampanye pemerintah dalam berbagai upaya penanggulangan Covid-19, baik dalam kegiatan sosialisasi upaya preventif, kuratif, maupun proses edukasi terkait upaya melawan penyebaran Covid-19 bagi masyarakat. Dalam proses mengatasi pandemi ini, TNI AD beserta satuan jajarannya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19.

Wujud nyata terlibatnya TNI khususnya TNI AD dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah dengan ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keterlibatan TNI sangat diperlukan dalam penanganan covid-19. Keterlibatan TNI dalam penanganan Covid-19 ini termasuk dalam kegiatan *Military Operation Other Than War* (MOOTW), dimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara bahwa tugas ini mencakup tugas selain perang seperti membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah, mengatasi bencana, pembinaan masyarakat, dan sebagainya. Bentuk keterlibatan tersebut adalah penertiban protokol kesehatan, sosialisasi penanganan Covid-19, distribusi fasilitas kesehatan, bantuan social, dan lain-lain. Terlebih dalam pemberlakuan era “*New Normal*”, untuk menjaga keseimbangan perputaran roda ekonomi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, TNI masih terus berperan dalam menjaga dan menertibkan pendisiplinan protokol kesehatan, baik itu di wilayah pasar, mall, terminal, bandara, dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Proses menjaga ketertiban umum ini sangat memerlukan komunikasi yang efektif.

Dalam masa pandemi Covid 19 ini komunikasi langsung dengan melibatkan banyak orang menjadi berisiko terhadap penyebaran virus Covid-19. Seluruh prajurit TNI AD harus mendukung upaya pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 ini di antaranya dengan meminimalisir komunikasi langsung dengan melibatkan banyak orang. Hal ini berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan prajurit. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk melaksanakan komunikasi sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan meminimalisir risiko penularan Covid-19. Salah satunya adalah dengan memberdayakan teknologi informasi melalui pemanfaatan *citizen journalism*.

Tugas satuan jajaran Angkatan Darat terutama Komando Kewilayahan adalah untuk menyampaikan informasi terkait penanggulangan Covid-19 seharusnya menjadi semakin mudah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini, dimana penyampaian informasi tidak harus bertatap muka dan memakan waktu lama untuk dapat sampai ke masyarakat luas. Disamping untuk meminimalisir risiko penularan maka melalui pemberdayaan media sosial kita dapat menginformasikan berbagai hal penting terkait tugas Komando Kewilayahan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan metode pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung upaya penanggulangan Covid-19 berdasarkan konsep *citizen journalism*. Metode ini diharapkan dapat mendorong komunikasi sosial antara masyarakat dan TNI AD dalam situasi pandemi dimana kontak langsung antar personel diminimalisir untuk mencegah penularan virus.

Konsep Citizen Journalism

Kemampuan dan kerja pemberitaan pada awalnya hanya dilakukan oleh kalangan jurnalis dan awak media. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, maka kesempatan dan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui pemberitaan-pemberitaan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tertulis, suara, maupun video dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat. Proses publikasi informasi mulai bergeser seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memfasilitasi masyarakat umum untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, namun juga pengumpul dan penyebar informasi. Perubahan peran masyarakat dari sekadar penerima informasi menjadi pihak yang turut ambil bagian dalam proses penyebaran informasi tersebut merupakan fondasi dari konsep *citizen journalism*.¹ Konsep ini menjadi semakin relevan seiring dengan pesatnya peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun. Internet merupakan salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi secara cepat melalui media digital. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjii), diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sangat signifikan dari 0,5 juta pengguna pada tahun 1998 menjadi **172,1 Juta** pada bulan Januari 2020 dan semakin bertambah menjadi **175,4 juta orang** pengguna pada September tahun 2020. Jumlah ini meningkat sekitar 17% dari tahun 2019 atau bertambah sekitar 25 juta pengguna internet.²



(Jumlah pengguna internet di Indonesia Tahun 2020 menurut Hootsite Wearesocial)

1 Seth C. Lewis, Kelly Kaufhold, and Dominic L. Lasorsa, 'Thinking About Citizen Journalism: The Philosophical and Practical Challenges of User-Generated Content for Community Newspaper', *Journalism Practice*, 4.2 (2010), 163–79.

2 <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet>

Keberadaan *citizen journalism* menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian pihak menganggapnya sebagai suatu hal yang memiliki banyak manfaat, sedangkan sebagian lainnya justru memberikan penilaian negatif. **Beberapa manfaat *citizen journalism* dalam masa pandemi Covid-19 ini antara lain:** 1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam membantu menyebarkan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kebijakan dalam penanggulangan Covid-19; 2) Mencegah monopoli media *mainstream* dalam pemberitaan terkait Covid-19 sehingga berita semakin transparan; 3) Menciptakan berita dengan sudut pandang yang lebih personal; 4) Penyebaran sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19 lebih cepat, sehingga aksi masyarakat dalam berperan aktif melawan Covid lebih cepat pula; 5) Memungkinkan pembaca berita memberikan respon dengan cepat dan mudah.

Sedangkan sisi negatif *citizen journalism* yang mungkin muncul dalam masa pandemi ini, antara lain: 1) Kebenaran isi berita kadang-kadang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, seperti beberapa *hoaks* yang muncul selama masa pandemi ini; dan 2) Adanya kesempatan untuk menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, seperti pada kasus Jerinx SID di Bali, dan lain-lain. Untuk itu perlu juga dilaksanakan upaya untuk mengeliminir ekses negatif tersebut.

Citizen journalism dalam konteks yang dimaksud di sini bukan hanya memberdayakan potensi masyarakat di wilayah binaan, tetapi juga potensi media sosial satuan dan seluruh prajurit di satuan jajaran TNI AD.



(Durasi penggunaan internet dan sosial media masyarakat Indonesia menurut *Hootsuite Wearesocial*)

Komsos Komando Kewilayahan dengan pemberdayaan Konsep *Citizen Journalism*

Komunikasi sosial berdasarkan konsep *citizen journalism* diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komando Kewilayahan dalam menyampaikan informasi penting terkait kinerja TNI ke masyarakat. Metode ini sebenarnya sederhana, namun penerapannya memerlukan upaya keras dan berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *citizen journalism* adalah kegiatan pemberitaan yang melibatkan peran masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam menjalankan aktivitas jurnalistik, mulai dari mengumpulkan, mengolah, hingga menyebarkan informasi ke pihak lain.³ Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan tujuan program pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk **mendorong keterlibatan masyarakat dan prajurit untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi terkait upaya penanggulangan Covid -19**. Salah satu indikator dari keberhasilan program tersebut adalah semakin tingginya tingkat disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini akan berimbas pada menurunnya tingkat konfirmasi positif Covid-19, semakin tingginya tingkat kesembuhan dan semakin rendahnya tingkat kematian akibat Covid.

Pemberdayaan masyarakat berdasarkan konsep *citizen journalism* pada dasarnya memiliki sinergi dengan kegiatan Pembinaan Teritorial TNI AD. Sebagaimana dinyatakan dalam Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, tujuan dari kegiatan Bina Teritorial (Binter) TNI AD adalah untuk memelihara komunikasi sosial, memelihara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memelihara peningkatan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Sasaran dari Binter mencakup: 1) Terpelihara dan meningkatnya keeratan hubungan antara TNI AD dengan segenap komponen masyarakat, komponen pemerintah dan keluarga besar TNI AD; 2) Terwujud dan terpeliharanya peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang kegiatan fisik dan nonfisik guna memantapkan

³ Sukartik. Loc.Cit.

kemanungan TNI-Rakyat; dan 3) Tercipta, terpelihara, dan meningkatnya daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Binter dilaksanakan oleh setiap prajurit TNI AD, Satkowil, dan Satnonkowil dengan objek kegiatan terdiri dari komponen masyarakat, komponen pemerintah, dan keluarga besar TNI.

Konsep *Citizen Journalism* dalam diseminasi informasi kampanye melawan Covid-19 seperti disebutkan di atas, memerlukan peran aktif dari Komando Kewilayahan sebagai penyelenggara program pemberdayaan, antara lain: 1) **Kolaboratif, menerapkan kerja sama seimbang antara Kowil dan stake holders yang lain.** Konsep ini dalam konteks *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), merupakan sinergi dari peranan masyarakat, swasta, dan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan publik. Program ini juga merupakan penerapan **konsep Pentahelix**, yaitu kerja sama antara Pemerintah, Swasta, Komunitas/Masyarakat, kalangan media dan akademisi. Untuk itu Kowil harus mampu menggalang seluruh komponen yang ada di wilayahnya untuk mendukung program tersebut. Setiap unsur dari Pentahelix mempunyai potensi besar untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukkseskan penanggulangan Covid-19 di wilayahnya, terutama dalam konteks pemberitaan/diseminasi informasi. Komando Kewilayahan harus memastikan bahwa program pemberdayaan tersebut harus pula terencana dengan matang. Selain itu, Komando Kewilayahan juga menjadi pengawal proses pelaksanaan program untuk memastikan bahwa seluruh pihak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terutama terkait Undang-undang ITE; 2) **Mengutamakan peran aktif masyarakat dan prajurit.** Program pemberdayaan yang dirancang harus mengutamakan peran aktif masyarakat dan prajurit dalam kampanye melawan Covid-19.

Hal ini dengan melakukan perekrutan terhadap prajurit yang mahir dalam pemanfaatan media sosial dan personel masyarakat yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menjadi kontributor berita. Pejabat intelijen, territorial, dan penerangan Kowil harus mampu menggalang para admin media sosial yang mempunyai *member* yang banyak dan berpengaruh di wilayah binaannya. Kelompok *influencer* tersebut direkrut dan diberikan pemahaman tentang kondisi bangsa saat ini yang memerlukan partisipasi aktif dalam diseminasi informasi terkait penanggulangan Covid-19. Dalam hal ini, personel masyarakat yang direkrut memang telah memiliki kemampuan dalam mengelola informasi atau setidaknya memahami cara operasional dari berbagai jenis media komunikasi. Hal tersebut diperlukan untuk mempermudah pembinaan masyarakat yang ikut berpartisipasi, sehingga tidak perlu memberikan pelatihan secara dasar terkait pemberitaan, namun cukup menjelaskan terkait tujuan, prosedur dan berbagi aturan yang digunakan dalam program pemberdayaan penanggulangan Covid-19;

3) **Komando Kewilayahan menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan.** Sarana ini menyangkut sumber berita yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Kowil harus bekerja sama dengan Humas Satgas Penanggulangan Covid-19 di wilayahnya dan instansi terkait seperti BPBD, Humas Pemda, Polda/Polres setempat dan sumber lain yang kredibel sebagai sumber informasi dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah.

Informasi tersebut yang dibutuhkan masyarakat dan prajurit untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan berbasis konsep *citizen journalism*. Medios sendiri dalam pertahanan negara, memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi pemerintah, membangun jaringan informasi, penguasaan IPTEK, sarana membangun

kemandirian dan kompetensi, sebagai bagian dari demokrasi dalam mengubah *noise* menjadi *voice*, sebagai *early warning system* atau sistem peringatan dini atas berbagai peristiwa yang terjadi serta revitalisasi kearifan lokal. Untuk itu, program ini juga menjadi sarana bagi Kowil untuk mengedukasi masyarakat dan kalangan media tentang *Patriotic Journalism*, yaitu Jurnalisme yang tidak berorientasi pada profit pribadi atau kelompok, tetapi berorientasi pada semangat membela kepentingan bersama.

4) Melibatkan peran jurnalis profesional. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu memberikan pembekalan praktis perihal pemberitaan kepada masyarakat dan prajurit yang direkrut dalam program pemberdayaan. Keterlibatan jurnalis profesional ini memegang peranan kunci untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan prajurit dalam mengelola informasi, baik dari mencari, mengolah, menyajikan, hingga menyebarkan informasi dengan cara-cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari program pemberdayaan. Jurnalis profesional tersebut juga tidak hanya berperan di pembekalan kemampuan saja, namun juga berperan sebagai editor dari berita yang dikumpulkan oleh masyarakat yang direkrut dalam program pemberdayaan. Peran ini diharapkan dapat menutup celah tersebutnya informasi yang tidak memiliki validitas, bertentangan dengan nilai etis budaya bangsa, dan mengandung unsur kerahasiaan yang tidak boleh dikonsumsi publik dalam konteks perang melawan Covid-19.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa selain memiliki manfaat besar, konsep *citizen journalism* juga memiliki dampak negatif yang harus diatasi dan diantisipasi. Langkah untuk mengantisipasi dampak negatif *citizen journalism* dapat dilakukan dengan edukasi tentang Undang-undang ITE dan proses control yang ketat. Sebelum program ini dijalankan Kowil sebelumnya perlu memberdayakan media sosial seluruh internal TNI AD, utamanya melalui pemberdayaan media sosial seluruh prajurit di wilayah tanggung jawabnya. Prajurit-prajurit tersebut diarahkan untuk menggunakan media sosialnya ikut mendukung kampanye melawan Covid-19 dan meng-counter berita-berita *hoaks* dan berita yang kontraproduktif terhadap kampanye melawan Covid-19. Upaya tersebut memerlukan peran aktif

dari Jajaran Penerangan Kowil untuk menginisiasi dan mengawal aktivitas pemberdayaan media sosial internal TNI tersebut.

Sebagai langkah awal, Jajaran Penerangan Kodam (Pendam) dapat mengkoordinir jajaran penerangan pada tingkat Korem (Pen Korem), Pen Kodim dan penerangan satuan Non-Kowil yang ada di wilayahnya untuk menginstruksikan kepada anggotanya untuk ikut menyebarkan sosialisasi penanggulangan Covid-19 seperti kampanye disiplin protokol kesehatan, informasi tentang rumah sakit rujukan Covid-19, informasi protokol pemakaman atau perlakuan jenazah terduga Covid dan lain-lain. Dalam grup WA atau media sosial non-satuan yang diikuti prajurit tentu terdapat anggota WA yang berasal dari masyarakat sipil, sehingga kampanye penanggulangan Covid-19 yang disebarluaskan akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat sipil untuk kemudian dapat disebarluaskan lagi ke masyarakat lainnya. Selain menyebarkan konten positif berbasis realita kinerja TNI AD, anggota satuan juga dapat menyebarkan **paham patriotic journalism** untuk memberikan wawasan kepada masyarakat sipil atas pentingnya upaya membela kepentingan negara melalui metode pemberitaan yang mendukung program pemerintah. Dengan demikian, masyarakat sipil akan lebih termotivasi untuk ikut menyebarkan sosialisasi dan edukasi terkait upaya melawan pandemi.



Penutup

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, komunikasi sosial yang dilaksanakan prajurit TNI AD dibatasi dengan aturan-aturan terkait protokol kesehatan, sehingga perlu dicari metode yang sesuai dimana komunikasi sosial tetap dapat dilaksanakan secara efektif, tetapi juga risiko penularan Covid-19 dapat diminimalisir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Penetrasi penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat

Indonesia adalah potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan oleh Komando Kewilayahannya. Salah satunya dengan menerapkan program komunikasi sosial berbasis *citizen-journalism*. Penerapan program ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan prajurit Kowil menjadi terlibat aktif dalam kampanye dan sosialisasi, serta edukasi upaya penanggulangan Covid-19, baik pada tahapan preventif, kuratif, maupun mendorong pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, komunikasi sosial berbasis *citizen journalism* oleh Komando Kewilayahannya dalam masa pandemi ini dilaksanakan melalui, yaitu: **1) Kolaboratif, menerapkan kerja sama seimbang antara Kowil dan stake holders yang lain; 2) Mengutamakan peran serta masyarakat dan prajurit; 3) Komando Kewilayahannya menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan; 4) Melibatkan peran jurnalis profesional.**

Untuk mendukung efektivitas komunikasi sosial berbasis *Citizen Journalism* tersebut TNI AD perlu melaksanakan **capacity building** dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan media sosial bagi prajurit dan satuan. Hal ini penting agar proses diseminasi informasi mendukung program melawan Covid ini tidak kontraproduktif. Dimensi **capacity building** tersebut dilakukan dengan **peningkatan kemampuan prajurit** dalam penguasaan IT dan pemahaman tentang Undang-Undang ITE termasuk bagaimana bermedsos dengan bijak. **Capacity building** yang dilaksanakan juga harus menyangkut aspek **pengembangan organisasi** yang mendukung proses penyebarluasan informasi, serta peningkatan budaya kerja yang mampu mengadopsi nilai-nilai kekinian. Adapun **Capacity Building** terkait **aspek pengembangan sistem kerja**, harus dioptimalkan hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen bangsa melalui kerja sama Pentahelix. TNI AD dengan potensi SDM-nya yang besar, gelar satuan kewilayahannya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta penguasaan fungsi teritorialnya mempunyai potensi yang besar sebagai pelopor pemersatu unsur-unsur pentahelix di wilayah. Konsep "Tiga Pilar" yang selama ini menjadi ujung tombak penyelesaian masalah di wilayah menjadi modal besar dalam memberdayakan unsur pentahelix. Demikian juga perkembangan sosial yang sangat dipengaruhi teknologi informasi harus menjadi perhatian besar pelaku pembinaan teritorial di wilayah. Apabila semua langkah **Capacity Building** ini bisa dilaksanakan dengan sistematis dan terukur maka komunikasi sosial berbasis *Citizen Journalism* dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian sekadar buah pikir penulis dalam rangka mendukung upaya pemerintah dan TNI AD untuk menanggulangi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Apjii, *Infografis: Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, 2020
Handayani, Diah, 'Peran Jurnalisme Warga (Citizen Journalism) Berbasis Santri Sebagai Penyeimbang Komunikasi Keagamaan Lokal Kediri', *Mediakita*, 1 (2017), 141–55
Haris, Andi, 'Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media', *Jupiter*, XIII (2014), 50–62
Hastjarjo, Sri, 'Citizen Journalism Sebagai Media Partisipasi Pembangunan Akuntabilitas Pemerintah', *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 6 (2015), 139–46
[Http://kehutanan.stieswadaya.web.id](http://kehutanan.stieswadaya.web.id), 2018
Lewis, Seth C., Kelly Kaufhold, and Dominic L. Lasorsa, 'Thinking About Citizen Journalism: The Philosophical and Practical Challenges of User-Generated Content for Community Newspaper', *Journalism Practice*, 4 (2010), 163–79
Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: RajawaliPress, 2009)
Okoro, Nnanyelugo, Christian T. Diri, and Chijioke Odii, 'Citizen Journalism in Nigeria: Possibilities and Challenges', *New Media and Mass Communication*, 11 (2013)
Tukasno, 'Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3 (2013), 178–97
<https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilikunya-880c7bc7cd19>
Hootsuite Wearesocial2020

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M. adalah abituren Akmil 1997, saat ini menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad setelah sebelumnya menjabat sebagai Aster Kasdam VI Brawijaya.

KURIKULUM DEMOKRATIS: MENCETAK PERWIRA PROFESIONAL DALAM KORIDOR DEMOKRASI



"Training and education are the heart of the profession of arms and have profound implications for the warfighting abilities and long-term posture of our military forces"

Carl E. Vuono,
Change, Continuity and the Army of the 1990

Major Inf Fauzan Rifa'i Alfikri, S.E., MMAS.

Militer dalam negara demokrasi harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip netralitas politik dan supremasi sipil. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan jurang pemisah interaksi militer dengan institusi sipil dan pembentukan profesionalisme militer, karena seringnya interaksi ataupun intervensi militer terhadap dunia sipil lama-lama akan menyulut gesekan antara kedua institusi yang berimplikasi pada erosi supremasi sipil.¹ Demokratisasi militer merupakan fondasi yang perlu dibangun untuk mewujudkan profesionalisme militer. Fondasi yang fundamental dari profesionalisme militer diantaranya netralitas politik, patuh pada otoritas sipil, dan fokus pada tugas pokoknya.² Oleh karenanya, dalam mewujudkan perwira militer yang profesional, prinsip apolitical military harus tercermin dalam performa kesehariannya. Setiap perwira militer perlu menyadari bahwa tugas pokok mereka adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan dunia politik adalah muhi domain otoritas sipil. Karena keterlibatan militer dalam urusan politik domestik dan sosial kemasyarakatan secara intens akan merusak kualitas demokrasi dan profesionalisme militer.

Peningkatan profesionalisme TNI AD terus digelorakan semenjak bergulirnya era reformasi. Pencapaiannya dinilai cukup signifikan apabila dibandingkan dengan periode pra-1998 dimana TNI AD memiliki peran yang luas dalam politik domestik. Hal ini terlihat dari hasil beberapa survei pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa institusi militer (TNI) sebagai institusi yang paling dipercaya di mata publik sebagai konsekuensi logis dari peningkatan profesionalismenya.³ Namun demikian, apabila pembangunan profesionalisme ini tidak dipelihara

secara konsisten akan berdampak pada menurunnya kredibilitas TNI AD di mata masyarakat dan pemerintah.

Sejak reformasi 1998, peran militer dalam politik dan ekonomi sudah resmi dihilangkan, dan militer diharapkan fokus pada tugas pertahanan. Namun, secara tidak disadari sisa-sisa budaya berpolitik masih sedikitnya terlintas dalam benak perwira TNI AD. Tidak sedikit, perwira TNI AD setelah pensiun dari kedinasan, beralih profesi dengan ikut aktif dalam partai politik ataupun membidik jabatan politik tertentu.

1. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1967), 8-10

2. Colin S. Gray, "The Strategist as Hero," *Joint Force Quarterly* 62 (3rd Quarter, 2011): 37-45, diakses pada 24 September 2020, <https://ndupress.ndu.edu/portals/68/Documents/jfq/jfq-62.pdf>.

3. Lembaga Survei Indonesia, "Survey of Indonesia Public Opinion," International Republican Institute, 2013, diakses pada 11 April 2020, <https://www.iri.org/sites/default/files/2013%20September%20Survey%20of%20Indonesian%20Public%20Opinion%2C%20June%2019-27%2C%202013.pdf>.

Transisi ini tampaknya menjadi ‘tradisi’ pasca-pensiun dengan anggapan bahwa *the old soldier never die, they just fade away*, dalam arti sampai kapan pun seorang militer tetaplah dengan jati dirinya sebagai pembela negara dengan jalan apa pun.⁴ Hal ini tidaklah salah, karena mereka telah kembali menjadi warga negara sipil biasa yang memiliki hak yang sama termasuk hak politik sebagaimana warga negara yang lain. Namun demikian, dikhawatirkan strategi untuk masuk ke partai politik ini, sudah dijalankan sejak berdinias militer aktif yang berimplikasi pada munculnya ‘self interest’ dan ‘political behavior’ dalam performa kerja perwira TNI AD. Apabila ini terjadi, dikhawatirkan dalam merebut *political gain*, perwira TNI AD menggunakan institusi sebagai kendaraan politiknya yang tentunya mencederai pencapaian profesionalisme TNI AD.

Pemahaman profesionalisme militer secara komprehensif juga diperlukan untuk memahami ‘domain’ kerja TNI AD, sehingga perwira TNI AD mengerti mana yang menjadi *primary* dan *secondary role* mereka. Ini bermanfaat guna menghilangkan “nostalgia” atas *power* dan *privilege* TNI AD di masa lalu sebagai militer yang dominan di hampir seluruh dimensi kehidupan yang berkontribusi pada peningkatan sinergitas dan soliditas TNI dan Polri.

Dengan demikian, diperlukan peran lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran, fungsi, dan posisi militer dalam negara demokrasi. Pengembangan pengetahuan, moral dan perilaku demokratis yang tepat sesuai norma demokrasi menjadi penting diterapkan di lembaga pendidikan khususnya pada level operasional dan strategis. Seskoad sebagai lembaga pendidikan tertinggi di Angkatan Darat yang telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin dalam lingkup TNI AD, TNI, ataupun level nasional, tentunya perlu mengambil peran dalam akultiasi budaya politik dan demokratisasi perwira TNI AD. Seskoad perlu meluruskan perilaku politik perwira TNI AD dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi militer pada mind-set dan culture-set para perwira TNI AD.

Tulisan ini membahas mengenai peran lembaga pendidikan Seskoad dalam menerapkan kurikulum demokratis untuk mencetak perwira

profesional dalam koridor demokrasi. Tulisan ini mencoba menuangkan tiga pertanyaan yang mendasar: *Pertama*, mengapa demokratisasi perwira perlu diterapkan di Seskoad? *Kedua*, Apa yang menjadi penghambat dalam membentuk perwira TNI AD yang profesional? *Ketiga*, bagaimana konsep kurikulum demokratis yang dapat mencetak pemimpin militer yang profesional? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, untuk mendapatkan kerangka berpikir yang utuh maka pembahasan akan dimulai dari literasi mengenai profesionalisme militer dalam koridor demokrasi, latar belakang perilaku politik TNI AD di masa lalu, urgensi penerapan kurikulum yang memegang teguh nilai demokrasi dan profesionalisme militer di Seskoad, dan konsep kurikulum demokrasi (*democratic curriculum*) di Seskoad untuk mencetak pemimpin militer yang profesional.



Sementara itu, semakin profesional suatu institusi militer semakin enggan untuk mencampuri urusan politik, namun semakin tidak profesional, gairah untuk mengintervensi dinamika politik semakin tinggi.

-Samuel E. Finer, *The Man on Horseback*

Sumber : Google.com

Profesionalisme militer dalam koridor demokrasi

Wujud profesionalisme militer yang ideal dalam negara demokrasi masih menjadi perdebatan beberapa peneliti sosial khususnya mengenai keterlibatan militer dalam dunia politik. Janowitz dalam bukunya *The Professional Soldier*, berargumen bahwa militer yang profesional dalam prakteknya akan melewati ‘batas’ politik, wajar apabila militer memiliki motivasi politik karena mereka berideologi, nasionalis, dan terdoktrinasi.⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa hubungan sipil militer dalam negara berkembang dibaratkan seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, peran militer tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk pembangunan nasional. Namun, pendapat ini berbeda dengan Samuel Huntington yang menyebutkan bahwa militer dan institusi sipil adalah ‘dunia’ yang terpisah, keterlibatan

4 Arto Busilo, ‘Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI’, Jurnal Sosiologi Vol. 19, No. 2 , Juli 2014: 198, diakses pada 24 September 2020. <http://joc.iptb.ac.id/Account/AdvDetailLocal/Tema/4706-5799-1-SM-2.xls>

5 Morris Janowitz, *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait* (New York: Free Press, 1960), 234.

6 Melozi, Dhivendra K., and Glen Segell, *Civil-Military Relationships in Developing Countries* (Lanham, MD: Lexington Books, 2014:6

militär dalam politik akan merusak profesionalismenya?

Profesionalisme militär di negara demokrasi didasarkan beberapa prinsip utama yaitu patuh pada otoritas sipil, memiliki komitmen terhadap netralitas politik, menjunjung tinggi hak asasi individu dan menjaga etika institusi. Prinsip-prinsip tersebut terdoktrin dalam nilai-nilai yang membedakan perilaku prajurit profesional seperti integritas, disiplin, kehormatan dan pengorbanan dalam pelaksanaan tugas. Militär profesional akan melihat dirinya tidak ‘cocok’ untuk mengurus dunia politik. Sebagai komparatif literasi mengenai profesionalisme militär, Samuel Huntington dalam bukunya *Soldier and the State* menjelaskan profesionalisme militär adalah tentara yang memiliki keahlian (*expertise*), berupa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidangnya, sehingga mengemban tanggung jawab (*responsibility*) terhadap masyarakat sebagai kliennya dan memiliki kesadaran kelompok (*corporateness*) di antara anggota profesi yang berbeda dari orang awam.⁷ Profesionalisme dapat mencegah konflik antara otoritas sipil dan elit militär, karena institusi militär akan melihat dirinya sebagai ‘alat’ pemerintah bukan malah ‘menjelma’ sebagai pemerintah. Sebagai profesional, institusi militär harus memegang teguh tugas dalam lingkup profesi yaitu melindungi negara dari ancaman pertahanan dan keamanan eksternal yang diperintahkan dari otoritas sipil, karena keterlibatan militär dalam urusan domestik dan sosial kemasyarakatan dapat menurunkan kualitas profesionalisme.⁸ Satu-satunya peran internal yang dilegitimasi adalah membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.⁹

Beberapa negara demokrasi menafsirkan studi dari beberapa teori ini berbeda-beda sesuai dengan karakter bangsanya. Di Amerika, militär cenderung fokus pada penanganan konflik eksternal, sedangkan urusan internal didominasi oleh polisi atau *law enforcement* lainnya. Berbeda dengan negara di Eropa, militär dan polisi cenderung berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan konflik baik eksternal maupun internal yang dikenal dengan sebutan *gendarmeries*. Di negara-negara Afrika yang memiliki institusi keamanan terbatas juga

menerapkan kolaborasi dan sinergi antara militär dan polisi. Konteks profesionalisme militär di negara demokrasi dilihat dari ‘domain’ pekerjaannya sesuai dari kebijakan otoritas sipil. Pada prinsipnya militär yang profesional akan memegang teguh supremasi sipil, sadar bahwa posisi mereka berada di bawah otoritas sipil, serta memegang teguh netralitas dalam politik.

Penghambat profesionalisme perwira TNI AD.

Beberapa studi mengatakan bahwa budaya politik institusi militär di Indonesia sudah tertanam sejak mereka dilahirkan.¹⁰ Institusi militär memiliki kontribusi besar pada masa kemerdekaan dan menganggap dirinya sebagai ‘penyelamat’ negara di kala institusi sipil dinilai kurang optimal dalam berdiplomasi. Kondisi politik, ekonomi dan keamanan yang kian tidak stabil di masa Orde Lama dan di awal Orde Baru yang ditandai banyaknya ancaman terhadap identitas dan integrasi bangsa dimulai dari konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat hingga pemberontakan G-30 S/PKI berimplikasi pada dominannya peran militär di bidang politik dan keamanan. Banyak yang beranggapan bahwa institusi militär merupakan satu-satunya institusi yang mampu menjaga integrasi dan kedaulatan negara. Diberikannya peran dwifungsi pada masa Orde Baru menjadikan militär mendominasi pemerintahan baik di level nasional maupun daerah, sehingga militär dianggap menguasai hampir di seluruh dimensi kehidupan selama 32 tahun. Perwira militär yakin bahwa mereka perlu berkontribusi untuk menjaga kedaulatan negara baik dari ancaman internal maupun eksternal, mereka juga yakin bahwa skill dan kompetensinya juga perlu menguasai tentang konteks politik, ekonomi, sosial dalam membantu pembangunan nasional. Pelibatan institusi yang panjang dalam sejarah politik, ekonomi dan keamanan domestik menyebabkan tertanamnya budaya politik pada *mind set* dan *culture set* perwira TNI AD. Dapat dikatakan TNI AD menjelma sebagai ‘tentara politik’ dan menjadi ‘penguasa politik’. *Mind set* dan *culture set* yang tertanam sejak lahir ini berpengaruh besar pada perilaku perwira TNI AD saat ini yang menjadi penghambat pencapaian profesionalisme.

7 Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1967), 55-58.

8 Collin S. Gray, ‘The Strategist as Hero,’ *Joint Force Quarterly* 62 (3rd Quarter, 2011): 37-45, diakses pada 24 September 2020, <https://ndupress.ndu.edu/portals/68/Documents/jfq-62.pdf>.

9 Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1967), 71.

10 Zoltan Barany, *The Soldier and the Changing State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012. 31

11 Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978. 25.

Urgensi Penerapan Kurikulum Demokratis di Seskoad.

Seskoad sebagai lembaga pendidikan pada level strategis dan operasional yang mendidik perwira menengah TNI AD sebagai calon pemimpin masa depan, memiliki peran yang sangat esensial untuk mencetak karakter dan pola pikir pemimpin militer yang profesional. Kurikulum demokratis menjadi sangat penting untuk dirumuskan, karena output pemimpin yang dihasilkan dari Seskoad akan berimplikasi ataupun berkontribusi pada kontinuitas pembangunan profesionalisme TNI AD, soliditas dan sinergitas TNI-Polri, serta kualitas demokrasi di Indonesia. Apabila tidak, generasi perwira TNI AD dari masa ke masa akan salah mempersepsikan arti politik yang menyebabkan sulit hilangnya orientasi politik dalam jati diri pemimpin TNI AD. Kurikulum pendidikan yang diterapkan akan berpengaruh signifikan pada 'cetakan' yang dihasilkan, apakah mencetak perwira profesional atau malah mencetak 'partisan' politik. Oleh karenanya, kurikulum demokratis yang diterapkan diharapkan dapat mengakulturasi perilaku 'non-demokratis' perwira TNI AD yang berkontribusi pada outcome sebagai pemimpin militer yang profesional.

Konsep Kurikulum Demokratis dalam Mencetak Perwira Profesional

Mengajar secara demokratis untuk demokrasi adalah pengajaran yang paling berat dari semuanya. Ini menuntut kecerdasan tingkat tinggi dan keanggotaan kelompok yang imajinatif, serta memiliki wawasan tentang siswa, diskusi dan fakta yang sedang dibahas.

Robert H. Beck, Schools Can Foster Democratic Values

Sesuai dengan teori-teori profesionalisme dalam koridor demokrasi, dapat diangkat tiga poin krusial yang perlu diangkat untuk mewujudkan profesionalisme militer yaitu: *civilian supremacy*, *political neutrality*, dan *external security*. Oleh karenanya, tiga tema besar inilah yang perlu digelorakan dalam penerapan kurikulum demokratis di Seskoad. Misi utama dari ketiga tema ini adalah akulturasi perilaku politik TNI AD di masa lalu, dan menanamkan doktrin demokrasi militer. Goal-nya adalah membentuk perwira TNI

AD yang memahami secara komprehensif tentang fungsi dan tugas militer di negara demokrasi sehingga dapat mendorong pembangunan profesionalisme militer dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kurikulum demokratis menerapkan prinsip dan nilai demokratis yang fundamental dengan mendorong prinsip '*equality*'. Kurikulum ini memfasilitasi interaksi sosial dan usaha kolektif, mendidik perwira bukan sebagai serdik yang pasif, namun aktif mencari untuk keperluan pengetahuan bagi dirinya. Serdik bukanlah produk dari sistem pendidikan, namun produk dari partisipasi aktif dirinya dalam suatu komunitas pendidikan. Kurikulum demokratis yang disusun perlu mewadahi tujuan umum '*big picture*' dalam akulterasi dan demokratisasi perwira TNI AD. Pertama, membangun suasana belajar (*learning environment*) yang membentuk karakter perwira toleran, demokratis dan adaptif. Kedua, membangun suasana belajar yang mewadahi implementasi tugas sesuai '*domain*' dan '*core*' bisnis militer. Ketiga, membangun suasana belajar yang menanamkan substansi dari '*posisi*' militer dalam kompleksitas demokrasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai goal ini diantaranya adalah:

Pertama. Akulterasi metode pengajaran klasik menjadi lebih demokratis agar memberikan ruang pemikiran kritis dan kreatif, bebas berekspresi dan berpendapat, serta menghilangkan kultur 'otoriter' kepada perwira TNI AD. Metode pengajaran klasik yang dimaksud diantaranya; (1) metode '*pupil teacher planning*'. Metode pengajaran terpusat pada 'mata' dosen akan menstimulus terpeliharanya budaya 'otoriter'. Memposisikan dosen pada '*setting stage*' (podium) dengan kedudukan berada di atas siswa, dimana seluruh mata siswa mengarah pada dosen berimplikasi pada psikis dosen itu sendiri maupun siswa. Komunikasi yang terjalin cenderung satu arah, karena siswa berpandangan lurus ke depan. Secara tidak disadari, dosen seperti simbol penguasa. Menunjuk, menginterogasi, men-judge layaknya hakim yang akan menghakimi siswa; (2) pendapat atau jawaban masih dilihat dari sisi benar dan salah. Memang dosen seperti men-challenge siswa untuk memberi tanggapan secara kritis dan kreatif, namun pada akhirnya 'jawaban sekolah' akan keluar dari catatan dosen, kurang memanfaatkan benefit dari *group dynamics*. Oleh karenanya, metode pengajaran klasik ini perlu diubah menjadi '*group learning*' agar lebih dinamis dan demokratis. Dosen dan siswa diposisikan saling berhadapan atau

yang dikenal dengan posisi diskusi ‘huruf U’. Ketika duduk berhadapan, siswa tidak hanya belajar mengenai hal berkenaan dengan materi saja, mereka akan melihat beberapa ‘value’ dari rekan dan dosen di sekelilingnya baik itu *personality*-nya maupun cara berpikirnya. Mempelajari emosi, *personality* dan perbedaan cara pandang menjadi fundamental dalam proses pembelajaran. Pada prinsipnya “*there is no room for dictatorial teaching devices*”, dimana membuat siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran, menstimulus siswa untuk berpikiran kritis mengenai materi atau teori yang disampaikan dosen, pendapat dari rekannya atau pendapat dirinya sendiri (*thinking about thinking*). Pendapat tidak dibatasi pada koridor benar atau salah, karena apresiasi terhadap logika, analisis, dan pengalaman dari suatu group lebih penting dari pada hanya sekadar membahas core content dari suatu materi, ataupun hanya sekadar mempersiapkan bahan untuk ujian. Walaupun topik utama dalam materi tersebut belum tersentuh, bukan menjadi masalah sebagai terapi dalam membentuk “*mature personality*” dan “*mature mind*”.



Kedua. Mengubah pola ujian yang tadinya *competition based* menjadi *value-based*. *Competition-based* secara tidak langsung menstimulus siswa untuk berpolitik. Beberapa studi menyebutkan politik muncul dari fenomena konflik dan kerja sama akibat perbedaan kepentingan dari rival individu atau kelompok yang berlawanan dalam suatu kompetisi.¹² Tiga poin krusial yang diamati dari perbedaan metode penilaian ini, yakni: (1) *competition-based* cenderung menunjukkan hasil evaluasi secara kuantitatif berupa angka yang berpengaruh pada psikis siswa untuk berkompetisi tanpa mengerti

value yang didapatkan. Hal ini berbeda dengan *value-based* dimana hasil evaluasi berupa naratif dilengkapi dengan *feedback* atau *comment*. Siswa akan mendapatkan *value* yang berharga, minimal mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jawaban mereka;

(2) pengumuman nilai keseluruhan siswa yang dipampang di sketsel, tembok, pintu ataupun *email* juga menstimulus munculnya perilaku politik. Siswa yang berada di posisi bawah akan merasa malu dan rendah diri di hadapan rekannya, sehingga memicu timbulnya strategi ‘politik’ untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari rekannya. Berbeda dengan konsep *value-based* dimana nilai didistribusikan hanya untuk keperluan pribadi siswa, sehingga menstimulus siswa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri tanpa berkonflik dengan yang lain; (3) ranking yang menjadi gengsi pribadi dan satuan pada akhir pendidikan juga menstimulus konflik antar individu atau kelompok. *Value* yang *essential* dari pendidikan bukanlah hanya sekadar ranking, melainkan ilmu itu sendiri, komunikasi, relasi dan *team-work* yang didapat selama pendidikan. Oleh karenanya, dalam konsep *value-based*, ijazah pendidikan yang diterima oleh siswa tidak perlu diterakan ranking, melainkan deskriptif tentang performa siswa selama melaksanakan pendidikan.

Ketiga. Shifting fokus dari internal ke eksternal, dengan mengekspansi materi terkait penanganan *external threat* dan mereduksi materi terkait penanganan *internal threat*. Penulis berpendapat bahwa semakin dijejali dengan pengetahuan mengenai stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan domestik akan men-trigger bangkitnya *political mood* perwira TNI AD yang berpengaruh pada degradasi profesionalisme militer. Sebaliknya, semakin luas wawasan mengenai ancaman keamanan eksternal, strategi perang, dan taktik bertempur semakin mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme. Kurikulum pendidikan di Seskoad perlu mengekspansi tentang wawasan sejarah peperangan dunia, perkembangan keamanan global/regional, karakter pertempuran ke depan, dan kekuatan bertempur negara lain yang bermanfaat guna mengetahui skala ancaman, kemampuan dan batas kemampuan diri dan organisasi. Selain itu ekspansi dan eksplorasi juga perlu dilakukan pada materi aplikasi operasi matra

¹² Hannah Arendt’s, “What Is Politics? Man Is by Nature a Political Animal,” 2, diakses pada 24 September 2020, https://www.macmillanhe.com/resources/sample-chapters/9780230363373_sample.pdf

darat dalam menghadapi ancaman eksternal agar analisis berpikir kritis dan kreatif mengenai taktik, strategi, dan doktrin TNI AD dalam pelaksanaan operasi matra darat. Dengan memahami dinamika ancaman keamanan eksternal secara komprehensif, beberapa nilai positif yang akan didapatkan diantaranya: (1) perwira TNI AD dapat memprediksi karakter pertempuran ke depan khususnya mengenai perkembangan teknologi, informasi, strategi, taktik dan prosedur *supply*; (2) Perwira mendapatkan '*insight*' tentang dinamika pertempuran, sehingga dapat menganalisis apakah kemampuan diri dan satuannya konsisten dan dapat diaplikasikan dalam pertempuran ke depan; (3) perwira TNI AD memahami apa yang menjadi '*core*' bisnis mereka, apa yang menjadi *primary* dan *secondary role* mereka dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dengan nilai-nilai positif yang didapatkan dari ekspansi materi keamanan eksternal ini, menstimulus pola pikir perwira TNI AD untuk berpikir bahwa ada hal yang lebih penting dan berbahaya 'di luar' sana daripada terus mengintervensi urusan 'dalam'. Harapannya perwira TNI AD akan fokus dan terus menyibukkan diri untuk mengasah pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan '*core*' bisnis mereka.



TNI AD perlu memahami interaksi antara pemerintah, militer, dan masyarakat dalam negara demokrasi. Perwira harus paham, bahwa militer adalah '*means*' (alat) yang dipakai dan dikendalikan oleh pemerintah. Militer adalah unsur '*probability*', bukan suatu '*reason*' ataupun '*passion*' dalam menentukan suatu kebijakan, yang artinya militer bertugas untuk mengasah 'pedang' dan bersiap untuk perang, bukan pemegang 'pedang' yang mengendalikan kebijakan. Perwira harus paham bahwa kekuatan militer sebagai '*the last resort*' atau cara yang terakhir digunakan untuk meraih '*political objective*'. Oleh karenanya, hubungan sipil militer perlu menjadi '*payung*' dalam setiap materi pelajaran yang diajarkan di Seskoad, sangat disayangkan apabila materi ini dihilangkan dari kurikulum pendidikan saat ini.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akulterasi dan demokratisasi menjadi penting dilakukan dalam mengubah mind-set dan culture-set perwira TNI AD menjadi lebih profesional. Nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam tubuh perwira perlu diimbangi dengan pengetahuan tentang profesionalisme militer dalam koridor demokrasi, agar perwira tidak melewati batasan interaksi militer dengan institusi sipil. Penanaman nilai demokratis, akan mengubah kebiasaan perwira yang '*otoriter*' menjadi lebih toleran, kreatif, dan adaptif. Pemahaman mengenai ancaman eksternal, primary dan secondary role dari TNI AD, akan menyadarkan perwira bahwa 'ada yang lebih berbahaya di luar sana', yang memerlukan penanganan oleh militer profesional, sehingga menstimulus untuk membangun profesionalisme dirinya. Oleh karena itu, penerapan kurikulum demokratis di Seskoad diharapkan dapat mencetak generasi perwira profesional dalam koridor demokrasi.

Keempat. Suplementasi materi pelajaran dengan pengetahuan mendalam tentang hubungan sipil dan militer di negara demokrasi. Hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi menjadi sangat penting untuk diajarkan, karena dapat memberikan pemahaman tentang 'posisi' militer atas otoritas sipil. Perwira

Major Inf Fauzan Rifa'i Alfikri, S.E, MMAS. adalah abituren Akmil 2005 dan lulusan Command and General Staff Officer Course (CGSOC) 2020 di U.S. Army Command and General Staff College (CGSC), Amerika Serikat, saat ini menjabat sebagai Ps. Pabandya Sunopsdik Sdirdik Seskoad

PENERAPAN METODE “ADULT LEARNING” DI LINGKUNGAN SESKOAD



Major Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” (Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, melainkan proses menyalaakan api pemikiran.)

- William Butler Yeats

Pendahuluan

Pendidikan dan latihan adalah faktor penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia personel Angkatan Darat agar memiliki kualitas keprajuritan yang tinggi, profesional, dan andal sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembinaan pendidikan sebagai salah satu pilar dalam membentuk prajurit yang profesional dan membentuk jati diri sebagai prajurit dan PNS TNI AD diarahkan pada peningkatan kualitas hasil didik sesuai dengan kebutuhan organisasi baik untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun dalam rangka membentuk personel yang mampu mengembangkan organisasi yang lebih efektif dan efisien.¹ Pendidikan adalah suatu keharusan dalam rangka membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia prajurit agar memiliki sikap perilaku, ilmu pengetahuan, dan keterampilan serta jasmani yang samapta. Dihadapkan pada era modern yang serba digital pada abad ke 21 ini, tuntutan kualitas sumber daya manusia pada umumnya dan kualitas prajurit militer sebagai unsur pertahanan negara pada khususnya

Mengalami peningkatan yang signifikan Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang muncul semakin bervariasi dan berevolusi. Berbagai kasus, insiden, dan fenomena masalah yang terjadi di lapangan, jawabannya tidak sesederhana membuka buku petunjuk atau referensi. Tidak jarang pemecahan masalahnya justeru berada di luar buku referensi atau belajar dari pengalaman orang lain.

Munculnya pandemi Covid-19, berita-berita hoax yang provokatif, maraknya penggunaan media sosial di kalangan prajurit, menjamurnya perangkat teknologi dan komunikasi yang membuka akses ke berbagai macam sistem informasi, serta semakin tingginya biaya hidup berimplikasi terhadap lahirnya masalah-masalah baru yang menuntut improvisasi yang solutif. Tidak hanya penguasaan teori dasar dan berpedoman pada referensi yang sudah ada, namun juga adaptasi terhadap lingkungan sosial, kreativitas berpikir untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk dapat berpikir kritis (*critical thinking*). Fakta-fakta ini merupakan masukan untuk merevisi dan menyesuaikan kurikulum serta metode pembelajaran yang adaptif pada institusi pendidikan TNI AD guna membekali para peserta didik (Serdik) dengan perkembangan terkini sehingga mampu dan siap menghadapi fenomena-fenomena tersebut.

1. TNI AD, “Doktrin Kartika Eka Paksi” (Mabes TNI AD, 2018), hal. 71.

Seskoad sebagai institusi pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI AD merupakan lembaga pengkajian dan pengembangan strategis yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyiapkan kemampuan Pamen TNI AD, terutama para calon komandan satuan yang nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai macam dinamika tantangan tugas ke depan dan problematika di atas. Motto Seskoad sebagai lembaga pendidikan *The Center of Excellence* dan slogan Terbaik, Terhormat, dan Disegani mencerminkan sistem pendidikan yang berkualitas dunia dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para Pamen TNI AD menjadi calon pimpinan di lingkungan TNI AD, TNI maupun nasional. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sistem edukasi yang kondusif dan adaptif terhadap perkembangan situasi global maupun nasional. Oleh karena itu, peran Seskoad sangat vital dan strategis dalam memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui visi dan misinya guna menyiapkan personel TNI AD yang siap menghadapi tuntutan dan tantangan tugas di masa yang akan datang.

Urgensi Pendidikan

Menurut Mahatma Gandhi, Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia. Demikian halnya penyelenggaraan pendidikan di Seskoad harus selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan, yaitu serasi, berkesinambungan, terpadu, dan perubahan hasil didik.² Penekanan terletak pada penerapan dari prinsip berkesinambungan dan perubahan hasil didik. Berkesinambungan berarti penyelenggaraan pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan yang lalu atau pendidikan yang pernah dilaksanakan, sesuai dengan tuntutan tugas dan profesi. Sedangkan perubahan hasil didik adalah penyelenggaraan pendidikan yang mengubah hasil didik menjadi lebih baik, perubahan dalam berpikir dan bertindak sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Artinya pendidikan setingkat Seskoad merupakan pendidikan pengembangan umum lanjutan tertinggi di TNIAD dimana materi dan

bahan pelajarannya berbeda, serta merupakan kelanjutan dari pendidikan-pendidikan sebelumnya (Sarcab, Diklapa I, dan Diklapa II). Selain itu, hasil didikan Seskoad memiliki karakter dan kualitas yang berbeda pula, sesuai dengan apa yang tertera dalam tujuan pendidikan Seskoad itu sendiri. Sebagai lembaga pendidikan pendidikan yang memiliki Visi: Terbaik, Terhormat, dan Disegani, maka Seskoad mengutamakan kualitas hasil peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu menyiapkan kader pemimpin TNI AD dan TNI yang bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berkepribadian.³

Metode pendidikan yang diterapkan pun harus menerapkan cara-cara belajar dan mengajar yang modern, kondusif, dan memberikan ruang pendewasaan siswa. Hal ini sesuai dengan penjabaran metode pendidikan dalam Bujuknis Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan TNI, terutama: mendorong cara berpikir siswa aktif, pemberian kepercayaan, dan penghargaan terhadap prestasi. Dalam hal mendorong cara berpikir siswa aktif, penyelenggaraan pendidikan mengajak siswa untuk senantiasa berbuat dan melakukan perbuatan/tindakan yang positif konstruktif sesuai citra prajurit sejati yang berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.⁴ Dalam pemberian kepercayaan, pengasuh memperlihatkan pada siswa bahwa mereka mendapatkan kepercayaan dalam mematuhi aturan-aturan dan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus diawasi atau dipaksa. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Pemberian kepercayaan ini dapat menimbulkan sikap kemandirian dan percaya diri. Penghargaan terhadap prestasi diberikan kepada siswa yang menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, menyelesaikan tugas dengan nilai tertinggi, atau melebihi standar dalam arti positif dengan maksud agar para siswa berlomba-lomba berbuat hal-hal yang baik dan kreatif.

Untuk mewujudkan atmosfer edukasi yang kondusif, adaptif, dan mendorong improvisasi berpikir secara kritis, sesuai dengan prinsip-prinsip serta metode penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan

2. Mabes TNI, Bujuknis Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan TNI (Cilangkap: Mabes TNI, 2012), hal. 5-7, diakses September 21, 2020, <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/KEP-7-16-2012-PENYELENGGARAAN-DIK-DI-LING-TNI.pdf>.

3. Seskoad, Peraturan Khusus Siswa (Perkusis) Seskoad (Bandung: Seskoad, 2020), diakses September 21, 2020, <https://seskoad.mil.id/File/Perkusis.pdf>.

4. Mabes TNI, Bujuknis Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan TNI.

perubahan sistem, kurikulum dan mentalitas pendidikan di Seskoad. Perubahan-perubahan tersebut terutama ditujukan untuk membangun sistem belajar yang adaptif dan menciptakan suasana belajar-mengajar yang mandiri, baik terhadap Perwira Siswa (Pasis) selaku Peserta Didik (Serdik) maupun Guru Militer (Gumil) selaku Tenaga Pendidik (Gadik). Mandiri dalam hal ini yaitu masing-masing komponen (Serdik dan Gadik) mengetahui dan memahami peran, tugas serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan di Seskoad. Metode Pembelajaran mandiri merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan cara membaca, menelaah serta memahami pengetahuan sesuai dengan materi pelajaran yang terkait.⁵ Penelitian telah membuktikan bahwa sistem belajar yang mengedepankan kemandirian dan kedewasaan memiliki potensi meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih tinggi.⁶ Metode belajar mandiri (*self-learning*) merupakan bagian dari metode belajar dewasa (*adult-learning*) yang pada intinya mengupas tentang sistem belajar pada orang dewasa yang bertujuan untuk membantu mereka menemukan cara belajar yang cocok bagi diri mereka sendiri (*learn how to learn*).⁷

Dengan pendekatan kedewasaan maka setiap Gadik harus melibatkan Serdik semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi, baik di kelas maupun non-kelas. Dalam hal ini, Pasis Seskoad tentu saja digolongkan sebagai orang dewasa. Pendidikan setingkat Seskoad harus berbeda dengan pendidikan dasar kecabangan (Sarcab), lebih tinggi dari Pendidikan Lanjutan Perwira I (Diklapa I) dan memiliki materi pada level strategis yang lebih banyak dari Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II). Karena salah satu tujuan pendidikan Seskoad adalah menyiapkan dan membentuk Pamen TNI AD yang siap menempati posisi atau jabatan Komandan dan staf golongan 5 (lima).⁸ Pasis Seskoad berasal

dari seluruh kesatuan di wilayah NKRI dengan berbagai macam latar belakang pengalaman dan satuan, sehingga mereka bukan sebuah "gelas kosong," melainkan gelas yang sudah terisi, tetapi belum penuh. Tugas mereka di Seskoad adalah menambah isi gelas masing-masing, sesuai dengan takaran yang diinginkan Seskoad, sedangkan tugas para Gadik adalah menyediakan "air" nya (ilmu pengetahuan dan pengalaman) dan corong airnya agar saat dituangkan, "air" tersebut tidak banyak yang tumpah. Pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh oleh masing-masing Pasis akan sangat berguna dalam metode belajar mengajar *adult-learning* dan *self-learning*. Karena dengan bekal tersebut, Pasis dapat berdiskusi, bertanya, mengeluarkan pendapat, menentukan prioritas, mengkaji relevansi doktrin, dan berdebat menggunakan referensi serta aspek empirik masing-masing. Gadik dalam hal ini, memiliki peran sebagai mediator, fasilitator, dan negosiator yang menjembatani, membatasi, serta mengarahkan para Pasis agar proses berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh kurikulum.⁹ Metode belajar yang demikian memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Pasis untuk berpikir kritis, berpikir taktis, dan analitis. Hal ini akan menggugah semangat belajar Pasis dari dalam, mendorong mereka untuk terus bertanya dan menggali ilmu untuk menemukan jawaban-jawaban dari diskusi-diskusi tersebut. Hakikat *adult learning* adalah proses belajar untuk menjadi diri sendiri (*process of becoming*), bukan proses pembentukan (*process of being shaped*) menurut kehendak orang lain. Dengan sistem pendidikan yang demikian, kualitas lulusan Seskoad akan meningkat dan adaptif dengan perubahan serta dinamika persoalan yang muncul di lapangan.

5. Riza Anugrah Putra, Mustafa Kamil, dan Joni R. Pramudia, "Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik," Universitas Pendidikan Indonesia (April 1, 2017), diakses September 22, 2020, file://C:/Users/imsd/Downloads/8723-17673-1-SM.pdf.

6. Ibid.

7. Moh. Dannur, "Teori Adult Learning, Eksperiential Learning Cycle Dan Perubahan Performance Individu Dalam Pendidikan Dan Pelatihan," STAI Pamekasan (2015), diakses September 22, 2020, file://C:/Users/imsd/Downloads/2953-Article%20Text-7881-1-10-20170806.pdf.

8. Brigjen TNI Ivnicius Siagian, "Pengarahan Dirdik Kepada Pasis Dikreg 59" (Disampaikan pada saat Jam Dirdik, Bandung, September 21, 2020).

9. Fakihatul U. Fitri, "Membangun Kemandirian Belajar Siswa Dengan Metode Kooperatif STAD," Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (2019), diakses September 22, 2020, file://C:/Users/imsd/Downloads/MEMBANGUN%20KEMANDIRIAN%20BELAJAR%20SISWA-converted.pdf.

Penerapan Adult learning di Lingkungan Seskoad

Seorang Pamen lulusan Seskoad, diharapkan telah siap mengemban tugas dan jabatan sebagai seorang komandan maupun staf golongan 5, harus dapat beradaptasi dan berimprovisasi dengan problematika baru tersebut. Dalam pembahasan lebih lanjut akan diuraikan upaya penerapan metode *adult learning* di Seskoad yang menitikberatkan pada 6 (enam) prinsip yang dikemukakan oleh **Malcolm Shepherd Knowles**,¹⁰ dan berimplikasi pada beberapa bagian dari 10 (sepuluh) komponen pendidikan, yaitu: Kurikulum pendidikan, Paket Instruksi, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Alins dan Alongins, Metode Pengajaran, Evaluasi Pendidikan, dan Fasilitas Pendidikan.



Adapun keenam prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Orang dewasa termotivasi dari diri sendiri dan cenderung mandiri (*Self-directed*). Hal ini erat kaitannya dengan tujuan pendidikan pada orang dewasa, yaitu aktualisasi diri.¹¹ Serdik membuat pilihan yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan diberi kebebasan untuk memikul tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Hal ini berarti setiap Pasis Seskoad, selaku Serdik harus mampu menemukan motivasi belajarnya sendiri dan menemukan ritme belajar yang cocok dalam sistem pendidikan di Seskoad. Seharusnya hal ini tidak sulit dilakukan mengingat masuk menjadi Pasis Seskoad dapat dikatakan adalah dambaan hampir seluruh Pamen TNI AD. Pada periode terdahulu (Dikreg LVII ke belakang), menjadi Pasis Seskoad adalah suatu

hal yang tidak mudah. Masuk Seskoad harus melalui serangkaian seleksi, baik fisik, psikis, maupun akademik yang panjang, menguras tenaga, biaya, dan pikiran. Hal ini membuat seleksi masuk Seskoad menjadi momok dan "tembok tinggi" bagi Pamen TNI AD sehingga keberhasilan untuk lulus menjadi seorang Pasis Seskoad saja sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Terlebih lagi, mengenyam pendidikan di Seskoad merupakan syarat penting untuk naik pangkat dan promosi di jabatan-jabatan strategis TNI AD. Pasis harus selalu diingatkan bahwa masa depan karier dan keluarga tergantung pada hasil belajar dan prestasi selama mengikuti pendidikan Seskoad. Dengan demikian mereka akan selalu termotivasi dalam mengikuti kegiatan dan pelajaran untuk aktualisasi dirinya.

Seskoad dapat meningkatkan kemandirian dan motivasi dalam diri Pasis melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Memberikan waktu kepada Pasis untuk menyusun aktivitasnya sehari-hari. Jadwal pelajaran diatur sedemikian rupa sehingga Pasis masih mempunyai waktu luang dan memikirkan kegiatan untuk keesokan harinya. Hindari atau kurangi jam pelajaran yang padat. Penelitian membuktikan bahwa otak orang dewasa mempunyai waktu prima untuk bekerja mulai jam 07.00 pagi sampai jam 14.00 siang.¹² Diberikan waktu istirahat 10 menit diantara jam pelajaran kelas. Waktu tidur ideal untuk orang dewasa adalah 7 – 8 jam, untuk personel militer (TNI AD) minimal 5 jam. Dengan adanya waktu luang dan istirahat yang cukup, Pasis akan leluasa merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan tugas-tugas belajarnya, mendorong pribadinya untuk selalu menentukan langkah selanjutnya, dan memotivasi diri. Pengaturan jadwal yang seperti ini akan berdampak terhadap kurikulum pendidikan secara keseluruhan. Sistem asrama, dengan satu kamar dihuni oleh 3 (tiga) Pasis dapat menjadi kontrol diantara sesama Pasis.
- 2) Meningkatkan peran Senat dalam mengatur dan mengawasi jadwal kegiatan Pasis. Patun dan Dosen pembimbing cukup mengawasi dari jauh dan memberikan instruksi secara garis besar atau koridor dalam setiap event. Apabila suatu kegiatan

10. Knowles, *Adult Learner, a Neglected Species*.

11. Dwi Heri Sudaryanto, "Pendekatan Prinsip Adult Learning Dalam Upaya Menunjang Proses Pembelajaran Diklat Aparatur," *Pusdiklat Migas* 2 (2015), diakses September 24, 2020, <https://docplayer.info/29737358-Pendekatan-prinsip-adult-learning-dalam-upaya-menunjang-proses-pembelajaran-diklat-aparatur.html>

12. Detik.Com, "8 Waktu Terbaik Bagi Otak," *Detik Health*, October 4, 2010, diakses September 23, 2020, <https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1454686/8-waktu-terbaik-bagi-otak>.

dilai sudah melenceng jauh dan menyalahi aturan, barulah Patun/Dosen mengambil alih. Keberadaan Pawas piket seharusnya tidak dominan untuk mengawasi dan memonitor setiap gerak-gerik Pasis selama 24 jam karena mereka bukanlah prajurit yang baru pertama kali mengikuti pendidikan militer.

3) Pemberian *reward and punishment* yang tepat juga akan memberikan motivasi tersendiri bagi Pasis, contohnya pemberian penghargaan bagi Pasis yang berprestasi. Dalam hal ini, lembaga dapat membuka kesempatan berpartisipasi yang seluas-luasnya untuk seluruh Pasis dengan cara memberikan penghargaan pada bidang yang berbeda-beda. Misalnya, penghargaan essay terbaik, penghargaan pejabat Gladi Posko terbaik, penghargaan nilai akademik terbaik, penghargaan Penyusun Naskah Latihan terbaik, dan sebagainya. Apalagi bila penghargaan itu diperoleh dari pejabat TNI AD pada level tertinggi, Kasad misalnya.

4) Sebaliknya, bagi Pasis yang melanggar perlu diberikan hukuman yang tegas, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran prinsip seperti mencontek, menuri, dan plagiarisme. Pasis Seskoad tergolong dalam *early-matured individual*, atau seseorang yang karena pendidikan pembentukan dengan pola militer sejak dulu, riwayat penugasan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan keharusan memimpin banyak orang yang lebih tua memberikan pengalaman serta pola pikir yang lebih matang dan dewasa dibandingkan individu lain seusianya.¹³ Penerapan disiplin berdasarkan Perkusis yang tegas dan hukuman yang tanpa pandang bulu justru akan meningkatkan wibawa lembaga pendidikan dan nilai prestisius lulusannya.

5) Memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan olahraga dan pembinaan fisik. Kebutuhan akan olahraga dan pembinaan fisik menjadi tanggungjawab perorangan dan pribadi masing-masing. Di Seskoad, Pasis dididik dan dilatih untuk memimpin rekan, senior, atau junior. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah bagi Pasis untuk dapat memimpin diri sendiri, menentukan kapan waktu yang tepat untuk belajar mandiri, kapan waktu yang tepat untuk istirahat, dan kapan waktunya berolahraga agar tubuh tetap sehat dan prima, dengan ritme yang sesuai tanpa menyalahi aturan

dari lembaga.

6) Memberikan kalender pendidikan, silabus/Lembar Pendahuluan (LP) sejak dulu atau di awal pendidikan, sehingga Pasis sudah mengetahui garis besar rencana pendidikan, materi pelajaran, referensi, dan bahan-bahan pendukung materi pelajaran. Pasis merencanakan sendiri waktu untuk belajar dan menyiapkan materi yang diperlukan sesuai jadwal pendidikan.

7) Gadik/Dosen/Patun mengadakan konseling kepada Pasis. Pada awal pendidikan, Pasis ditugaskan untuk membuat target-target apa saja yang diinginkan selama melaksanakan pendidikan di Seskoad, baik dalam hal akademik, pribadi, maupun keluarga. Waktu konseling digunakan untuk memberitahu Pasis tentang pencapaian dalam hal pendidikan (nilai-nilai, penugasan, ranking) saat itu serta mengecek sejauh mana Pasis berupaya meraih target-target yang sudah ditentukan sendiri sejak awal. Selain itu, konseling dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan dan kendala yang dialami Pasis serta menemukan solusinya.

b. Orang dewasa menggunakan pengalaman hidup dan pengetahuan yang dimilikinya ke dalam proses belajar. Di sini peran Gadik/Dosen sangat penting sebagai fasilitator, mediator, dan pengontrol. Gadik mendorong Serdik untuk menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dan aktivitas saat ini. Gadik/Dosen harus tahu bagaimana menghubungkan pengalaman dan pengetahuan Serdik dengan doktrin atau referensi yang ada saat proses belajar-mengajar sehingga Pasis terdorong untuk menyampaikan pendapat, saran, tanggapan, atau pertanyaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memperbanyak metode diskusi dalam proses belajar-mengajar, baik secara kelompok maupun antar perorangan. Dengan melakukan diskusi, Pasis didorong untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya terhadap suatu persoalan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Ini akan mendorong aktualisasi diri dan sesuai dengan tujuan pendidikan orang dewasa,¹⁴ yaitu meningkatkan intelektualitas. Dosen/Gadik juga tidak segan-segan untuk mendorong Pasis

13. Ryan Kelly, Monodith Kleykamp, dan David R. Segal, "The Military and the Transition to Adulthood," www.futureofchildren.org 2 (2010), diakses September 24, 2020, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ883085.pdf>.

14. Sudaryanto, "Pendekatan Prinsip Adult Learning Dalam Upaya Menunjang Proses Pembelajaran Di Kel Aparatur."

menanggapi relevansi suatu doktrin berdasarkan pengalaman nyata di lapangan sehingga dapat muncul teori-teori baru atau taktik baru dalam menghadapi persoalan di lapangan.

2) Mendorong proses belajar-mengajar dua arah (*two-way communication*). Agar diskusi dan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang maksimal, Gadik/Dosen perlu menekankan kepada Pasis untuk mempersiapkan pelajaran sehari sebelumnya dan sudah siap dengan tanggapan atau pertanyaan masing-masing. Dengan demikian, Pasis datang ke kelas sudah memiliki modal awal untuk berdiskusi, menanggapi, atau bertanya apabila mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pelajaran. Diskusi dan Proses Belajar Mengajar (PBM) akan lebih hidup dan tidak monoton.

3) Gadik/Dosen memberikan kesempatan tampil kepada seluruh Pasis secara merata di kelasnya. Gadik/Dosen selalu berupaya mendorong Pasis untuk bekerja secara kelompok dan berani mengeluarkan pendapat/opini terhadap suatu persoalan. Pengaturan posisi tempat duduk Pasis di kelas juga diatur sedemikian rupa secara bergantian dengan rotasi yang konsisten. Salah satu contoh formasi tempat duduk yang memudahkan kontrol Gadik terhadap Serdik adalah formasi huruf "U."

4) Persoalan-persoalan ujian atau pertanyaan quiz yang diberikan kepada Pasis harus lebih banyak mendalam suatu materi dan bersifat pemahaman (*comprehension*). Adanya klasifikasi soal mudah, sedang, dan sulit diatur sedemikian rupa sehingga perbandingannya 1 : 3 : 6 dalam jumlah soal tertentu, misalnya 10 (sepuluh) soal.

c. Orang dewasa berorientasi pada tujuan akhir (*goal-oriented*). Pelajar dewasa bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan memadai dan untuk alasan ini, hasil pembelajaran dan tujuan yang diharapkan harus teridentifikasi dengan jelas. Setelah Pasis memahami tujuan pembelajaran, Gadik/Dosen harus menyelaraskan kegiatan pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan tersebut dapat terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Gadik/Dosen harus mampu menjelaskan maksud dan tujuan pelajaran tersebut diajarkan di Seskoad dan bagaimana

kemungkinan aplikasinya di lapangan serta bagaimana tahapan atau metode agar Pasis mencapai target yang diinginkan. Pengaturan jadwal yang terlalu padat dan penyelenggaraan ujian yang berdekatan (berturut-turut dalam 1 minggu) hanya akan kontraproduktif, bahkan menurunkan motivasi belajar karena Pasis harus memahami banyak materi dalam waktu yang bersamaan. Orientasi belajar berubah dari memahami menjadi menghafal karena keinginan pribadi untuk mencapai nilai tinggi, tetapi waktu yang ada terbatas. Pada puncaknya, hal ini justru akan mengaburkan, bahkan menghilangkan tujuan utama mata pelajaran tersebut sehingga Serdik menjadi bingung dan kehilangan arah dalam belajar. Hendaknya jadwal ujian diatur maksimal 2 (dua) kali ujian dalam 1 minggu secara tidak berdekatan serta melibatkan tidak lebih dari 2 (dua) Sub Bidang Studi (SBS) dalam 1 (satu) kali ujian. Demikian pula transparansi nilai-nilai Pasis selama pendidikan. Khusus nilai yang dicapai Pasis dapat menjadi sarana untuk introspeksi diri sekaligus feedback terkait cara-cara belajar dan mengikuti proses pendidikan.

d. Orang dewasa berorientasi pada relevansi. Pelajar dewasa cenderung menghubungkan tugas-tugas yang diberikan dengan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Jika jelas bahwa kegiatan yang mereka ikuti atau tugas yang mereka terima secara langsung berkontribusi untuk mencapai tujuan pembelajaran pribadi mereka, maka mereka akan terinspirasi dan termotivasi untuk terlibat secara aktif dan berupaya menyelesaiannya. Jika materi pelajaran tidak berdampak signifikan terhadap target-target dan tujuan belajar pribadi, maka akan menurunkan interest terhadap materi tersebut. Seskoad perlu mengkaji materi-materi pelajaran yang dianggap penting dan relevan serta memformulasikan jumlah JP yang ideal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berimplikasi pada kurikulum pendidikan Seskoad yang saat ini berubah dari durasi pendidikan selama 11 bulan menjadi 6 bulan. Tidak realistik jika seluruh mata pelajaran dan jumlah Jam Pelajaran (JP) pada kurikulum 11 bulan diterapkan dalam waktu 6 bulan. Dengan demikian, mata pelajaran dan jumlah JP harus dikurangi dan disesuaikan dengan durasi pendidikan saat ini.

e. Orang dewasa cenderung bersikap praktis. Sangat penting bagi Gadik/Dosen untuk mengidentifikasi cara yang tepat dalam memberikan pelajaran dan mengubah pembelajaran teoretis menjadi kegiatan praktis. Tugas-tugas praktik dan diskusi merupakan metode yang penting bagi Serdik untuk menerapkan teori yang dipelajari di dalam kelas ke dalam situasi kehidupan nyata. PBM akan bermanfaat maksimal apabila Gadik/Dosen dapat menghubungkan teori di kelas dengan metode praktik yang tepat serta menjelaskan kemungkinan aplikasinya dalam situasi kehidupan nyata. Hal ini berimplikasi pada kurikulum dan Gadik. Kurikulum harus memuat porsi yang ideal antara waktu belajar di kelas (teori) dengan praktek (diskusi dan latihan luar). Gadik/Dosen harus memiliki pemahaman yang baik sebagai pengampu materi sehingga dapat mengidentifikasi metode praktik yang tepat dan mudah dipahami Serdik.

f. Pelajar dewasa memperhatikan sikap saling menghormati dan menghargai dalam lingkungan belajar. Dalam sistem pembelajaran dewasa, Serdik dan Gadik berkembang dalam hubungan kolaboratif. Serdik menjadi lebih produktif ketika mereka dianggap dan diperlakukan oleh instruktur mereka sebagai rekan kerja. Dan ketika kontribusi, ide-ide, gagasan, saran, atau pendapat Serdik dihargai, maka muncul sikap respek dan keinginan untuk berperan serta secara aktif dalam proses PBM. Sangat mungkin terjadi di Seskoad seorang Pasis lebih senior secara letting/angkatan namun lebih rendah dari segi kepangkatan dibandingkan Gadik/Dosennya. Di kalangan Pasis, keberagaman leting adalah suatu hal yang lumrah karena jarang terjadi pendidikan Seskoad hanya terdiri dari Pasis seangkatan. Hubungan senior – junior ini apabila tidak disikapi secara tepat akan menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi Pasis maupun Gadik/Dosen. Ego senioritas dapat memunculkan ketegangan karena satu individu merasa lebih superior dibandingkan yang lain walaupun berstatus sesama Serdik. Hal ini dapat membuat kehidupan Pasis menjadi tidak kondusif dan kaku. Dalam PBM, jika unsur-unsur senioritas masih dominan dalam arti negatif, justru akan menjadi kontrapunktif terhadap efektivitas belajar. Sebagai contoh seorang Pasis yang

lebih senior memaksa Pasis junior untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jika Pasis junior memilih untuk melaksanakan karena segan terhadap senior, maka waktu istirahat Pasis tersebut akan berkurang. Di sisi lain, Pasis senior semakin tidak memahami pelajaran karena tidak mengerjakan tugasnya sendiri. Jika Pasis junior menolak, akan timbul perselisihan atau keributan. Kondisi ini sangat tidak sehat dalam lingkungan pendidikan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian Pasis sebagai berikut:

- 1) Membuat konsensus yang disepakati oleh Pasis dan Pejabat utama Seskoad. Konsensus ini mengatur tentang tata cara bersikap dan bertingkah laku diantara sesama Pasis dan antara Pasis dengan Gadik/Dosen. Apabila memungkinkan, juga dimuat dalam Perkhuisis sehingga menjadi pedoman bersama.
- 2) Membudayakan sikap saling menghormati di lingkungan Seskoad. Seorang Pasis tentu saja lebih junior dibandingkan Gadik/Dosennya walaupun mungkin lebih senior dari tahun kelulusan Diktukpa. Sehingga Pasis sudah sepantasnya menghormati Gadik/Dosen. Walaupun demikian, Gadik/Dosen/Patun tidak boleh bertindak semena-mena terhadap Pasis.
- 3) Gadik/Dosen memberikan tugas-tugas perorangan dan kelompok secara proporsional dan dikontrol pembuatannya sehingga seluruh Pasis mengerjakan tanpa kecuali. Kecenderungan yang dapat terjadi adalah Pasis senior akan memerintahkan Pasis junior untuk mengerjakan tugasnya sehingga menimbulkan kesenjangan ilmu dan rasa ketidakadilan.
- 4) Pembagian mess/wisma Pasis diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada mess yang dihuni oleh Pasis dari satu angkatan saja. Percampuran Pasis di mess akan meningkatkan kerjasama dan rasa saling menghormati.



15. Rakmat Robbi, "Teori Atau Praktik Dulu?," *Kompasiana*, Juni 25, 2015, diakses September 24, 2020, <https://www.kompasiana.com/r.robbi/5510d3eca33311a539ba8e3a/teori-atau-praktik-dulu>.

Potensi masalah yang mungkin timbul dari metode pembelajaran *adult learning*

Sistem belajar *adult learning* pada dasarnya adalah metode pendidikan yang ditemukan di dunia barat. Namun, terdapat perbedaan budaya belajar antara dunia barat dan timur yang terkadang menjadi batu penghalang penerapan metode *adult learning* di lingkungan Seskoad. Beberapa potensi masalah yang dapat muncul antara lain:

1) Mentalitas yang belum siap. Sekilas jika kita amati bagaimana model belajar secara dewasa diterapkan, muncul pemikiran bahwa Serdik mendapatkan banyak kemudahan atau lebih populer dengan istilah "dimanjakan" karena adanya waktu luang yang lebih banyak dibanding sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi pisau bermata dua bagi Pasis. Tipikal pendidikan di lingkungan TNI AD sangat kental dengan pengawasan melekat, jadwal yang padat, ujian yang berturut-turut, dan sistem kebut semalam. Di satu sisi, Pasis yang dapat beradaptasi akan berkembang dan mendapatkan manfaat dari metode *adult learning*, disisi lain Pasis yang "terlena" dan tidak dapat menyesuaikan justru akan semakin jauh tertinggal.

2) Gadik/Dosen yang belum siap. Metode *adult learning* sangat mengedepankan proses dan cara berpikir kritis dalam menghadapi suatu persoalan. Serdik akan didorong untuk berpikir logis, selalu memunculkan ide-ide baru, gagasan, dan tanggapan dari sudut pandang yang berbeda. Konsekuensinya, akan timbul banyak pertanyaan kepada Gadik/Dosen. Dalam hal ini Gadik/Dosen memegang peranan penting sebagai narasumber, fasilitator, mediator, dan negosiator dalam PBM. Tentunya Gadik/Dosen tersebut harus benar-benar menguasai materi yang diampunya sehingga dapat memberikan jawaban dan mengarahkan Serdik untuk memahami materi dengan mudah.

3) Sikap kritis yang melewati batas. *Adult learning* menganjurkan agar Serdik berpikir kritis dan logis. Hal ini kerap disalah artikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa didukung dengan dasar yang jelas atau referensi yang benar. Sikap kritis dan menyampaikan pendapat harus diatur agar tidak menyalahi aturan dan tetap dalam koridor penyelenggaraan pendidikan.

4) Piranti lunak yang belum siap. Hanjar/referensi yang ada saat ini belum siap dan banyak yang memerlukan revisi dengan adanya perkembangan-perkembangan terkini. Sebagai contoh: Bujuk yang mengatur tentang taktik satuan mekanis sampai saat ini belum ada, walaupun satuan mekanis telah lama diresmikan. Adanya alutsista baru TNI AD seperti Meriam Astros, Heli serang AH-64E Apache, Marder, dan tank Leopard tidak dibarengi dengan pembuatan doktrin yang sesuai.

5) Pembinaan fisik yang terbengkalai. Kurangnya kesadaran Pasis untuk berolahraga mandiri dapat berakibat menurunnya standar kemampuan fisik selaku prajurit. Pada budaya barat, kebugaran fisik merupakan tanggungjawab pribadi dan sudah menjadi suatu kebutuhan hidup. Lain halnya dengan budaya pendidikan militer di TNI AD, dimana berolahraga selalu diatur dan diawasi. Serdik selalu merasa capek

karena terbiasa dengan jadwal pelajaran yang padat dan ujian yang bertumpuk, sehingga ketika mendapatkan keleluasaan untuk mengatur waktu olahraga, Pasis cenderung tidak melaksanakan.

Kesimpulan

Untuk menciptakan pemimpin berkelas dunia, maka harus dimulai dari lembaga pendidikannya terlebih dahulu. Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil didik dihadapkan pada durasi pendidikan dan tantangan yang ada saat ini, Seskoad perlu memformulasikan metode pembelajaran yang efektif dan adaptif. Metode *adult learning* adalah satu bentuk pendekatan yang memandang orang dewasa memiliki karakteristik cara belajar tersendiri yang berbeda dari anak-anak. Esensi dasar *adult learning* bermuara pada maksud untuk menciptakan Serdik dan Gadik yang mandiri dan saling berkolaborasi. Penerapan metode belajar *adult learning* akan mendorong kreativitas, cara berpikir kritis, dan memperkaya wawasan Serdik sehingga berdampak positif terhadap kualitas lulusan Seskoad. Evolusi teknologi yang begitu pesat dan perkembangan zaman berimplikasi terhadap lahirnya masalah-masalah baru. Pamen TNI AD sebagai calon-calon pemimpin dan staf di lingkungan TNI/TNI AD perlu dibekali ilmu-ilmu yang relevan untuk menghadapi tantangan tersebut melalui sistem pembelajaran yang adaptif dan mendorong pola berpikir kritis. Cara menyiapkan persoalan-persoalan baru ini tidak cukup hanya dengan menggunakan referensi yang ada saat ini. Perlu adanya improvisasi dan perbaikan sistem belajar melalui konsep *adult learning* yang memberikan ruang pendewasaan terhadap Pasis

Seskoad sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. *Mind-set* dan *culture-set* pendidikan terdahulu yang menghalangi perkembangan diri Serdik harus dihilangkan demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai sistem, keefektifan pembelajaran berbasis kedewasaan ditandai dengan berfungsinya semua elemen, seperti penggunaan pengalaman Serdik dalam PBM, penggunaan motivasi dari dalam diri sendiri, memberikan keleluasaan dan perlakuan yang saling menghargai antara Serdik dan Gadik, penghargaan terhadap prestasi Serdik, penggunaan materi pembelajaran yaperkembangan jaman. *Mind-set* dan *culture-set* pendidikan terdahulu yang menghalangi perkembangan diri Serdik harus dihilangkan demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai sistem, keefektifan pembelajaran berbasis kedewasaan ditandai dengan berfungsinya semua elemen, seperti penggunaan pengalaman Serdik dalam PBM, penggunaan motivasi dari dalam diri sendiri, memberikan keleluasaan dan perlakuan yang saling menghargai antara Serdik dan Gadik, penghargaan terhadap prestasi Serdik, penggunaan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna, partisipasi aktif Serdik di dalam menentukan arah pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang transparan.yang relevan dan bermakna, partisipasi aktif Serdik di dalam menentukan arah pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajaryang transparan.

Daftar Pustaka

- Basleman, Anisah. Teori Belajar Orang Dewasa. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Brigjen TNI Ivancius Siagian. "Pengarahan Dirdik Kepada Pasis Dikreg 59" Presented at the Jam Dirdik, Bandung, September 21, 2020.
- Dannur, Moh. "Teori Adult Learning, Eksperial Learning Cycle Dan Perubahan Performance Individu Dalam Pendidikan dan Pelatihan." STAI Pamekasan (2015). Diakses September 22, 2020.
- Darkenwald, Gordon G., and Sharan B. Merriam. Adult Education: Foundation of Practice. 1sted. New York: Harper & Row, 1982.
- Fitri, Fakihatul U. "Membangun Kemandirian Belajar Siswa Dengan Metode Kooperatif STAD." Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (2019). Diakses September 22, 2020.
- Hakim S.T., M.Pd, Lukmanul. "Andragogi," n.d. Diakses September 22, 2020.
<https://fkip.untan.ac.id/prodi/lukman/andragogi.html>.
- Kelty, Ryan, Meredith Kleykamp, and David R. Segal. "The Military and the Transition to Adulthood." www.futureofchildren.org 2 (2010). Diakses September 24, 2020.
- Knowles, Malcolm S. Adult Learner, a Neglected Species. 4th ed. Houston: Gulf Publishing, 1990.
- Mabes TNI. Bujuknis Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan TNI. Cilangkap: Mabes TNI, 2012. Diakses September 21, 2020. <http://sejarah-tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/KEP-716-2012-PENYELENGGARAAN-DIK-DI-LING-TNI.pdf>.
- Putra, Riza Anugrah, Mustafa Kamil, and Joni R. Pramudia. "Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik." Universitas Pendidikan Indonesia (April 1, 2017). Diakses September 22, 2020.
- Seskoad. Peraturan Khusus Siswa (Perkusis) Seskoad. Bandung: Seskoad, 2020. Diakses September 21, 2020.
<https://seskoad.mil.id/File/Perkusis.pdf>.
- Sudaryanto, Dwi Heri. "Pendekatan Prinsip Adult Learning Dalam Upaya Menunjang Proses Pembelajaran Diklat Aparatur." Pusdiklat Migas 2 (2015). Diakses September 24, 2020.
<https://docplayer.info/29737358>.
- TNI AD "Doktrin Kartika Eka Paksi." Mabes TNI AD, 2018.

Major Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS. adalah abituren Akmil 2005 dan lulusan Command and General Staff Officer Course (CGSOC) 2020 di U.S. Army Command and General Staff College (CGSC), Amerika Serikat, saat ini menjabat sebagai Ps. Pabandya Kermadik Sdirdik Seskoad.



OPTIMALISASI KOMPETENSI DOSEN SESKOAD GUNA MENINGKATKAN MUTU KELUARAN PENDIDIKAN

Kolonel Inf Kukuh Hartono, S.E.

"Guna mengoptimalkan penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik sehingga mutu keluaran pendidikan lebih berkualitas, maka proses belajar-mengajar dilaksanakan oleh satu orang dosen pengampu dan dosen cadangan di Gd. Gatot Soebroto, dibantu oleh dosen-dosen pendamping di kelas-kelas kecil"

Pendahuluan

Berdasarkan falsafah pendidikan prajurit TNI "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana" yang berarti mewujudkan Prajurit TNI yang mengutamakan nilai-nilai patriot pejuang, mahir, dan terampil dalam profesi sebagai kekuatan pertahanan, maka pendidikan TNI AD harus dapat memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjamin keseimbangan pengembangan dan pemantapan semangat kejuangan (Buku Petunjuk Induk tentang Pendidikan tahun 2013). Keluaran pendidikan yang bermutu menjadi sasaran utama dari penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga dengan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) sebagai Lembaga pendidikan tertinggi di Angkatan Darat yang mendidik para perwira menengah Angkatan Darat agar memiliki kemampuan sebagai pemimpin dan staf di satuan-satuan TNI/TNI AD.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dikenal 10 (sepuluh) komponen pendidikan sebagai unsur utama maupun pendukung dalam operasional suatu pendidikan. Di antara 10

komponen pendidikan tersebut, tenaga pendidik (Gadik) atau dosen menjadi salah satu komponen utama keberhasilan pendidikan dan tingginya mutu keluaran pendidikan, karena dosen adalah tenaga pendidik yang bertugas mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik (siswa). Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 menyebutkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Disamping faktor kemampuan siswa, penguasaan siswa terhadap suatu mata pelajaran sangat tergantung pada bagaimana kemampuan dosen menyampaikannya, atau yang dikenal dengan kompetensi dosen.

Dengan demikian, menjadi hal yang penting bagi Seskoad untuk menyiapkan dan membina dosennya dengan baik, serta bagi dosen sendiri untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Untuk itu, penulis memandang perlu membahas bagaimana mengoptimalkan kompetensi dosen guna meningkatkan mutu keluaran pendidikan, khususnya pendidikan reguler Seskoad.

Pembahasan

Kompetensi menurut etimologi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang

dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Dengan demikian, kompetensi dosen mengandung arti kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan seorang dosen untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik dengan berhasil guna. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan (Herry, 1998). Menurut Finch dan Crunkilton, kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum/silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Evaluasi hasil belajar; dan
- g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi.



Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlaq mulia. Surya (2003:138) menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Secara rinci sub-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sub-kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial; bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Sub-kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial; menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c. Sub-kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial; menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.
- d. Sub-kompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial; memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e. Sub-kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial; bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur dan ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.
- f. Sub-kompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial; memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, kompetensi profesional artinya guru memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang *subject matter* (mata pelajaran) yang diajpu dan akan

diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan-nya dalam proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut meliputi:

- a. Konsep, struktur, dan metode keilmuan/ teknologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar;
- b. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah;
- c. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait;
- d. Penerapan konsep – konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru dalam menjalani kehidupannya sering kali menjadi tokoh, panutan, identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya.



Guru dalam menjalani kehidupannya sering kali menjadi tokoh, panutan, identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Abduhzen (PR, 29 September 2006), mengungkapkan bahwa : Imam Al-Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat.

Guru dalam pandangan Al-Ghazali mengemban dua misi sekaligus, yaitu pertama tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawakan hati itu mendekati Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun sub-kompetensinya meliputi:

- a. Empati (*empathy*): Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana siswa/mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. Berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki: menghormati harga diri dan integritas siswa, disertai dengan adanya harapan yang realistik (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.
- c. Berpandangan positif terhadap diri sendiri, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki: mempunyai harga diri dan integritas yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realistik (positif) terhadap diri.
- d. Genuine (*authenticity*): Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan ‘terbuka’ mudah ‘dilihat’ orang lain.
- e. Berorientasi pada tujuan: senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampak berorientasi pada tujuan.

Setelah memahami empat kompetensi dosen yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, selanjutnya kita bahas langkah-langkah untuk mengoptimalkan kompetensi dosen tersebut. Yang pertama adalah langkah-langkah mengoptimalkan kompetensi pedagogik yang pada intinya diarahkan pada penguasaan dosen terhadap manajemen pendidikan dan proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan kompetensi diperlukan Pendidikan formal keguruan yang harus ditempuh seseorang untuk mampu menjadi dosen. Pendidikan formal yang berkaitan dengan ilmu keguruan/pendidikan di TNI berupa kursus manajemen pendidikan dan kursus guru militer yang dilaksanakan dalam

waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan. Melihat lamanya waktu kursus tersebut, tentu saja masih jauh dari cukup bila dihadapkan pada tuntutan kemampuan yang diharapkan untuk menjadi tenaga pendidik/dosen yang profesional. Apalagi bila dibandingkan dengan profesi dosen di luar TNI yang harus menempuh pendidikan strata 1 (S-1) selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

Dalam pendidikan atau kursus manajemen pendidikan diajarkan bagaimana mengelola pendidikan militer yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dengan memahami manajemen pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pengertian manajemen yaitu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). Namun kursus manajemen pendidikan seperti itu hanya diselenggarakan bagi perwira pertama sampai dengan perwira menengah ber pangkat Letnan Kolonel (Letkol), sehingga tidak memungkinkan bagi dosen Seskoad untuk mengikuti kursus tersebut. Dalam hal ini, Seskoad dapat mengikutkan personel perwiranya yang masih memenuhi syarat dalam kursus manajemen pendidikan yang nantinya akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan dosen. Untuk dosen yang lain, maka Seskoad dapat memanfaatkan perwira yang kompeten untuk memberikan pembekalan materi manajemen pendidikan tersebut.

Selain jalur formal seperti di atas, untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik dapat dilakukan melalui pembelajaran otodidak dengan mempelajari berbagai referensi terkait manajemen pendidikan, mengikuti berbagai seminar, pelatihan, penataran dan lain sebagainya. Atau menggabungkan kegiatan formal dan non formal tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Disamping mengikuti pendidikan atau kursus, selanjutnya mengembangkannya dari pelatihan, seminar dan lain sebagainya.

Selanjutnya adalah mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan mulai dari lingkup pendidikan terendah serta mulai dari materi yang sederhana sampai dengan yang lebih rumit. Sebagai suatu ilmu, maka kompetensi pedagogik ini sangat memerlukan pembiasaan dan pengulangan-pengulangan. Dengan demikian, ilmu dan kemampuan yang dimiliki tetap terjaga dan semakin bertambah baik kualitasnya.



Yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang pada intinya kemampuan pribadi seorang dosen yang diperlukan agar dapat menjadi dosen yang memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru, pribadi yang arif, berwibawa, berakhlik mulia dan dapat menjadi teladan, evaluasi diri dan pengembangan diri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian seorang dosen oleh Seskoad; pertama memberikan fasilitas serta mendorong terlaksananya kegiatan ibadah bagi dosen sesuai agama masing-masing. Kedua, senantiasa menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis, kompetitif dan semangat, sehingga memacu pengembangan potensi pribadi dan etos kerja yang tinggi bagi dosen. Sedangkan bagi dosen, upaya yang dapat dilakukan adalah; Pertama, senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan ajaran agama yang sebenar-benarnya, maka kita akan memiliki akhlak mulia, pribadi yang bijaksana dan memiliki kesetabilan emosi.

Kedua, mengembangkan potensi diri agar menjadi pribadi yang mandiri, memiliki etos kerja tinggi, berwibawa dan mampu menjadi teladan bagi orang lain.

Yang ketiga adalah kompetensi profesional dimana dosen memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Seskoad antara lain memberikan kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pendidikan strata 1 dan seterusnya. Selain itu, Seskoad dapat juga mengadakan seminar/ workshops serta berbagai wahana pembekalan bagi para dosen untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Bagi dosen sendiri, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuannya melalui pendidikan strata 1 dan seterusnya. Selain itu, untuk mampu menguasai materi pelajaran, tentu saja dosen harus banyak membaca dan mempelajari materi pelajaran serta referensi lain sebagai pendukung dan menambah wawasan. Berkaitan dengan penguasaan materi, kemampuan dosen untuk menguasai sejumlah materi pelajaran tentu saja terbatas. Dalam Buku Petunjuk Pembinaan Tenaga Pendidik TNI AD disebutkan, penggerahan tenaga pendidik TNI AD dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan aspek Tri Pola Dasar yaitu Sikap dan Perilaku, Pengetahuan dan Keterampilan, Jasmani serta pengalaman yang disesuaikan dengan jenis, macam dan tingkat pendidikan serta jenjang jabatan fungsional Tenaga Pendidik. Pembatasan bagi Gadik dalam mengajar/melatih sesuai ketentuan yang berlaku yaitu untuk pelajaran teori maksimal 3 (tiga) materi pelajaran sedangkan untuk pelajaran yang bersifat praktik maksimal 2 (dua) materi pelajaran. Pembatasan tersebut tentu saja sangat masuk akal ditinjau dari segi manusia yang memiliki batas kemampuan. Dengan pembatasan itu, seorang dosen lebih mendalami dan menguasai materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dikuasainya materi pelajaran oleh dosen, maka memungkinkan untuk disampaikan secara lugas, jelas dan

gamblang. Dan yang lebih penting lagi adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembelajaran itu adalah bukan sekedar tersampaikannya materi pelajaran akan tetapi dikuasainya semaksimal mungkin materi pelajaran oleh peserta didik.

Pembahasan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini mensyaratkan seorang dosen untuk mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal ini penting karena pendidikan bukan saja tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang hati, akhlak, karakter dan tingkah laku. Sebagaimana pola dasar pendidikan yang dianut TNI, tanggungjawab seorang pendidik disamping tingkat pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan jasmani, juga dituntut terhadap pembinaan sikap dan perilaku peserta didik. Komunikasi efektif yang dilakukan dosen dengan peserta didik, bukan saja memudahkan penyampaian materi pelajaran, tetapi juga memungkinkan ditularkannya sifat dan perilaku baik yang bisa diteladani oleh peserta didik. Dengan komunikasi tersebut, dosen juga berkesempatan untuk secara dini mengetahui permasalahan yang dialami peserta didiknya, sehingga memungkinkan untuk segera mungkin membantu mencari jalan pemecahannya.

Upaya yang dapat dilakukan Seskoad untuk mengembangkan kompetensi sosial dosen adalah; pertama membangun suasana satuan yang harmonis bagi semua personelnya sehingga mudah terjalin komunikasi efektif antar personel, terutama dosen unsur pimpinan dan staf Seskoad, dengan peserta didik, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Kedua, memerhatikan hak dan kesejahteraan personelnya, termasuk dosen. Ketiga, menegakan hukum, disiplin dan tata tertib di Seskoad. Keempat, mengadakan kegiatan olahraga, rekreasi dan kegiatan sosial secara bersama-sama.

Bagi dosen, untuk mengembangkan kompetensi sosial ini, dapat dilakukan dengan cara; pertama mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Kedua mengembangkan rasa penghargaan dan penghormatan kepada lingkungan. Ketiga memelihara harga diri dan kejujuran.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut; pertama, dosen merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada pencapaian hasil keluaran pendidikan, sehingga sangat diperlukan perhatian terhadap kompetensi dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kedua, upaya mengoptimalkan kompetensi dosen harus dilakukan oleh Seskoad dan juga dosen sendiri baik secara formal dengan mengikuti pendidikan strata 1 dan seterusnya serta mengikuti kursus manajemen pendidikan khususnya bagi personel yang masih memenuhi syarat. Selain itu, upaya nonformal diantaranya mengikuti seminar/workshop dan wahana pembekalan materi pelajaran lainnya dengan memanfaatkan personel yang kompeten di bidangnya, serta berbagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, kepribadian serta kemampuan komunikasi sosial.

Saran

Melihat pentingnya kompetensi dosen terhadap mutu keluaran pendidikan, dan adanya persoalan yang dihadapi, maka disarankan sebagai berikut; pertama, disamping kesempatan pendidikan sarjana yang telah diberikan oleh Seskoad kepada para perwiranya, perlu juga untuk memfasilitasi adanya penataran/pembekalan bagi para dosen tentang berbagai materi pelajaran prioritas, dengan memanfaatkan perwira dan dosen dari luar yang berkompeten. Kedua, perlunya Seskoad berkoordinasi dengan Kodiklat TNI, TNI AD serta Pus/Cab/Fung terkait untuk memenuhi kebutuhan doktrin dan petunjuk yang valid sebagai referensi bagi dosen dan lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, mengingat batas kemampuan seseorang dalam menguasai materi pelajaran dan guna mengoptimalkan penyampaian materi pelajaran sehingga mutu keluaran pendidikan lebih berkualitas, maka disarankan untuk proses belajar-mengajar dilaksanakan oleh satu orang dosen pengampu dan dosen cadangannya di Gd. Gatot Soebroto, dibantu oleh dosen-dosen pendamping di kelas-kelas kecil.

Demikian pembahasan tentang optimalisasi kompetensi dosen Seskoad guna meningkatkan mutu keluaran pendidikan, semoga berguna bagi Seskoad dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, serta berguna bagi dosen dalam mengembangkan kompetensinya yang sangat diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan menjamin mutu keluaran pendidikan yang lebih baik.



Kolonel Inf Kukuh Hartono, S.E. adalah abituren Akmil 1989, saat ini menjabat sebagai Dosen Utama Seskoad dan berpengalaman mengajar dilingkungan Pendidikan TNI Angkatan Darat

PERAN TNI AD MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN MELALUI SWASEMBADA DAGING SAPI DALAM RANGKA MENGHADAPI DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19



Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si,

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki penduduk terbesar keempat setelah negara China, India, dan Amerika. Selain itu total luas negara Indonesia 5.193.250 km², mencakup daratan dan lautan, sedangkan luas daratan Indonesia 1.919.440 km², dengan kekayaan alam yang sangat melimpah serta memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, hingga saat ini telah mencapai 268.583.016 jiwa, kondisi seperti ini tentu membutuhkan logistik yang jumlahnya sangat besar. Disamping kebutuhan beras yang harus terpenuhi, kebutuhan lauk-pauk berupa daging sapi juga harus tercukupi untuk mendukung kebutuhan protein hewani yang berasal dari daging. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kebutuhan daging untuk 1 tahun sebesar 700.000 ton, sedangkan kemampuan produksi daging nasional baru mencapai 400.000 ton, sehingga masih membutuhkan 300.000 ton daging, bila dihitung dengan kebutuhan jumlah sapi masih memerlukan kurang lebih 1.500.000 ekor sapi. Mengingat negara Indonesia yang sangat luas wilayahnya dan memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar, maka seharusnya Indonesia mampu memproduksi daging sendiri, karena penduduk Indonesia mayoritas petani yang sehari-hari bekerja di sawah dan ladang yang memiliki lahan dan makanan sapi yang masih melimpah, baik berupa rumput, jerami

(batang padi), tebon (batang jagung), dedak dan makanan ternak lainnya yang masih dapat dengan mudah dicari oleh petani.

Pada saat penulis menjabat Danrem 081/Dsj Madiun selama 1 tahun 10 bulan, Wilayah tugas Korem 081/Dsj meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Nganjuk, serta Kota Madiun dan Blitar. Korem 081/Dsj membawahi 9 Kodim dan 1 Batalyon. Wilayah ini memiliki potensi pertanian dan peternakan yang luar biasa, karena sebagian besar wilayahnya merupakan sawah dan ladang, yang setiap tahunnya bisa panen padi 2 hingga 3 kali dan panen jagung 1 hingga 2 kali. Wilayah ini memiliki peternakan sapi yang cukup memadai, tetapi dibanding dengan kebutuhan nasional dirasakan masih jauh untuk mencukupi. Dengan potensi pakan ternak yang melimpah dan bibit sapi yang dapat dicari di wilayah Korem 081/Dsj, maka penulis selaku Danrem 081 berinovasi mendirikan kandang sapi untuk dijadikan tempat belajar anggota yang akan memasuki masa pensiun dan para Babinsa untuk memberi bekal keterampilan yang nantinya digunakan dalam pembinaan masyarakat di desa binaan masing-masing. Kegiatan beternak sapi tersebut dapat dikatakan cukup berhasil, karena disamping memberi pengetahuan kepada anggota yang mengikuti

pelatihan, secara perhitungan dapat memberi keuntungan kepada anggota yang memiliki ternak sapi. Pada kegiatan beternak sapi ini, kandang sapi Korem 081/Dsj terdapat sapi sejumlah 20 ekor yang dimiliki oleh beberapa anggota yang menitip untuk dipelihara dan dijadikan tempat praktik pelatihan. Namun, secara keseluruhan anggota jajaran Korem 081/Dsj telah memiliki sapi sejumlah 230 ekor tersebar di wilayah Kodim, baik dipelihara di satuan Kodim dan Batalyon, namun ada yang memelihara secara mandiri di rumah masing-masing. Pada kegiatan beternak sapi ini Korem 081/Dsj hanya praktik ternak sapi potong (penggemukan), sehingga pemeliharaannya hanya membutuhkan waktu berkisar 4-6 bulan lalu dijual. Selama melaksanakan praktik 6 bulan, Korem 081/Dsj telah memberi pelatihan kepada 160 anggota jajaran Kodim wilayah Korem 081/Dsj. Dari hasil sapi yang dipelihara, setiap hari berat badannya naik rata-rata 1 kg dan pada saat dijual memberi keuntungan tambahan bagi pemilik sapi.

Dari kegiatan ternak sapi ini diharapkan anggota mendapatkan insentif tambahan setiap bulan berkisar 500.000 sampai 1 juta rupiah setiap 1 ekor sapi. Penulis berkeyakinan bila program ini dilakukan oleh seluruh anggota Korem dan Kodim jajaran TNI AD, maka akan dapat membantu Pemerintah menambah produksi daging sapi dan mengurangi impor daging dari luar negeri, bahkan kalau program ini dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat, niscaya akan memberi kontribusi positif untuk kesejahteraan prajurit dan masyarakat.

Dari latar belakang di atas, penulis memberanikan diri untuk menulis makalah ini dengan maksud untuk memberikan ide dan pemikiran bangaimana upaya satuan jajaran TNI AD untuk ikut serta berpartisipasi bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan swasembada daging, terlebih dalam situasi pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih dihadapi masyarakat Indonesia dan dunia, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan maupun ekonomi. Khusus dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu aktivitas kegiatan ekonomi sangat menurun, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), karena banyak pabrik yang tutup atau tetap jalan, tetapi pekerjanya 50% dirumahkan, kegiatan di pasar sepi pengunjung, karena takut terkena covid-19, aktivitas sekolah, ibadah dilakukan dari rumah dan lain-lain yang mengakibatkan penghasilan masyarakat menurun, bahkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Pembahasan

Tren Produksi Daging Sapi Indonesia Menurun. Produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi sejak 2015 hingga 2019. Dalam rentang waktu tersebut, tahun 2016 mencapai titik tertinggi dengan 518.484 ton. Angka tersebut naik 2,3% dari tahun sebelumnya. Setelah tahun 2016, produksi daging sapi Indonesia menurun perlahan. Tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut Indonesia memproduksi 486.319,7 ton dan 497.971,7 ton. Tahun lalu, berada di titik terendah dengan produksi 490.420,8 ton. Angka tersebut turun 1,5% dari tahun 2018. Menurut kajian Badan Pusat Statistik (BPS), total kebutuhan daging pada 2019 mencapai 686.270 ton. Sedangkan kebutuhan daging sapi sebanyak 2,56 kilogram per kapita per tahun.



Sampai saat ini Syahrul mengatakan kebutuhan nasional Indonesia per tahun 2020 membutuhkan sekitar 700.000 ton daging sapi, namun produksi dalam negeri hanya mampu menutupi sampai 400.000 ton. "Kekurangan ini harus segera intervensi karena Presiden sudah perintahkan, makanya sedang kita persiapkan," ucapnya di Grand Ballroom Kempinski, Kamis (30/1/2020). Mentan mengakui hal tersebut tak mudah sebab Indonesia akan membutuhkan 1,7 juta ekor sapi untuk menutup impor 300.000 ton daging. 300.000 ton setara 1,3 juta ekor sampai dengan 1,7 juta.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini negara Indonesia masih sangat membutuhkan pasokan daging sapi untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, padahal negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan subur untuk kegiatan produksi hasil pertanian dan peternakan. Seharusnya hal ini dijadikan peluang untuk menyerap tenaga kerja dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena yang diuntungkan adalah negara-negara produsen daging dan negara Indonesia hanya dijadikan konsumen sehingga hal ini berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi Indonesia saat ini.

Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebesar 268.583.016 jiwa. Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki atau naik sebesar 0,71 persen dibanding tahun lalu (134.858.411 jiwa), dan 132.761.248 penduduk perempuan atau naik 0,82 persen dibanding tahun lalu (131.676.425 jiwa). Terdapat total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77 persen tahun ini. Jumlah penduduk yang besar, sangat membutuhkan konsumsi daging yang besar pula, namun bila dapat memanfaatkan potensi yang ada, harusnya kita mampu swasembada daging sendiri, karena tenaga kerja yang melimpah dan tanah yang sangat luas dapat digunakan untuk produksi daging, karena penduduk Indonesia mayoritas petani yang dapat dibina dan dilatih keterampilannya untuk memanfaatkan serta mengembangkan fasilitas yang ada dengan baik.

Untuk menggerakkan masyarakat mau bekerja sebagai peternak sapi, harus dilaksanakan program Pembinaan Teritorial (Binter) yang harus dipelopori oleh TNI AD. Dengan kegiatan program "Pertanian Terpadu" yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan yang terdiri dari Kodam, Korem, dan Kodim untuk mengambil peran menjadi pelopor dan penggerak dalam program ketahanan pangan, khusunya swasembada daging sapi. Hal ini sesuai Pasal 7 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menyatakan bahwa TNI memiliki tugas Operasi Militer

selain Perang (OMSP) dengan tugas antara lain "memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta" serta "membantu tugas pemerintahan di daerah". Di dalam 8 Wajib TNI butir ke 8 menyatakan "Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya".

Dengan kekuatan TNI AD yang saat ini memiliki personel 326.069 orang, sedangkan khusus untuk anggota Kodam yang membawahi Korem dan Kodim berjumlah 258.207 orang. Kekuatan ini penting untuk disiapkan menjadi tenaga potensial untuk mendukung program swasembada daging sapi, karena sebagian besar anggota yang menjabat sebagai Babinsa memiliki kemampuan Pembinaan Teritorial (Binter) yang baik untuk mampu bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan swasembada daging sapi. Selain itu anggota TNI AD memiliki kemampuan modal untuk membeli bibit sapi, karena setiap anggota memiliki gaji yang cukup yang dapat dijadikan modal usaha serta memiliki tenaga yang kuat untuk bekerja sebagai peternak sapi. Kegiatan peternakan sapi ini bagi prajurit hanya sebagai pekerjaan sambilan. Bila tersedia anggota 100.000 orang yang tergabung program ini, maka akan menjadi kekuatan besar untuk mendukung suksesnya program swasembada daging sapi. Bila kita hitung secara garis besar 100.000×3 sapi setiap tahunnya, maka akan menyumbangkan sapi sebanyak 300.000 ekor. Jumlah ini sudah dapat menyumbangkan 20% kebutuhan impor daging sapi. Bila program ini dapat mengajak masyarakat sebanyak 500.000 orang untuk ikut program peternakan sapi, maka akan menghasilkan sapi sebanyak 500.000×3 sama dengan 1.500.000 ekor, sehingga kebutuhan kekurangan sapi sebanyak 300.000 ton atau 1.500.000 ekor sapi dapat terdukung. Bila produksi sapi prajurit dan masyarakat digabung dapat mencapai $1.800.000$ ekor, maka jumlah ini sudah dapat memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan kelebihannya dapat dieksport ke negara yang membutuhkan.



Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya) harus terlibat langsung, karena tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat adalah tugas dari Pemerintah. Bila program swasembada daging sapi ini dapat dikerjakan secara bersama-sama antara TNI AD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, serta Instansi terkait lainnya, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat di bidang ketahanan pangan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah memiliki dana APBD, wilayah yang sangat luas, penduduk yang cukup banyak dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan masih adanya penduduk miskin yang saat ini pada bulan Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang dan pengangguran berjumlah 6,88 juta orang (data dari BPS). Potensi inilah yang harus digerakkan secara bersama-sama untuk menghasilkan produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Kendala dan kelemahan

- a. Masih adanya mafia perdagangan daging sapi, ini terbukti adanya oknum pengusaha, anggota Partai dan pegawai yang terlibat korupsi dalam kegiatan perdagangan impor daging sapi, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan daging sapi hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu dan ini sangat merugikan negara dan masyarakat pada umumnya.
- b. Belum semua anggota memiliki keterampilan tentang beternak sapi, sehingga untuk beternak sapi ini perlu pendidikan dan pelatihan serta modal beli bibit sapi.
- c. Masih adanya Bupati/Walikota yang kurang peduli program beternak sapi, karena program beternak sapi dianggap kurang menguntungkan.
- d. Masyarakat Petani sebagian besar tidak memiliki kemampuan modal beli sapi, karena dari hasil pertanian padi dan jagung belum dapat dijadikan modal untuk membeli bibit sapi, karena harga bibit sapi 1 ekor mencapai Rp 15.000.000,- sampai dengan Rp 24.000.000,- sehingga butuh bantuan modal dari Pemerintah Daerah atau Perbankan.
- e. Distribusi penjualan daging sapi masih belum lancar, karena dikuasai pedagang besar dan bersifat monopoli.

Peluang dan Harapan

- a. Kegiatan beternak sapi akan memberi tambahan insentif kepada anggota, sehingga dapat menambah kesejahteraan kepada keluarganya dan memberikan tambahan dukungan buat pendidikan putra-putrinya ke jenjang Perguruan Tinggi yang baik dan berkualitas.
- b. Bagi masyarakat petani kegiatan beternak sapi akan menambah pemasukan tambahan, selain dari penghasilan dari produk pertaniannya, maka akan menambah penghasilan tambahan untuk keluarganya.
- c. Bagi masyarakat lainnya yang fokus beternak sapi, akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan perdagangan impor bahan pangan akan berkurang dan terbatas, sehingga kegiatan beternak sapi ini akan menjadi pekerjaan yang positif baik untuk menambah produk daging sapi dan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat serta mengurangi ketergantungan pangan dari negara lain.

Upaya sebagai rekomendasi yang perlu dilakukan

Pertama, TNI AD dan Kementerian Pertanian melanjutkan kerja sama di bidang ketahanan pangan, khususnya program peternakan sapi untuk menghasilkan produk daging sapi guna mewujudkan swasembada daging nasional. Selanjutnya TNI AD dalam hal ini Staf Teritorial membuat rencana Program Binter khususnya Program Peternakan sapi secara lengkap dengan melibatkan Kodam, Korem, dan Kodim dalam pelaksanaannya di lapangan. Kegiatan ini juga harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya) serta masyarakat sehingga terwujudnya kerja sama yang baik antara TNI AD dan Pemerintah dengan masyarakat guna kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kedua, membuat Organisasi Program Peternakan sapi untuk mewujudkan swasembada daging dari tingkat Pusat sampai ke tingkat daerah, agar kegiatan dari mulai perencanaan, persiapan dan pelaksanannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta mendapat pengawasan dan pengendalian dengan baik. Dengan organisasi yang jelas, maka pertanggungjawabannya akan mudah. Program Peternakan sapi ini perlu dibuat mekanisme kerjanya secara jelas dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah sehingga terorganisir dengan baik.

Ketiga, menjalankan Program Peternakan sapi untuk mewujudkan swasembada daging dengan disiplin dan optimisme yang tinggi, sehingga akan menghasilkan produktifitas daging yang tinggi dan bermanfaat untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan khususnya daging dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Keempat, memiliki jaringan yang kuat dari mulai persiapan bibit, kebutuhan pakan sapi sampai dengan distribusi daging sapi, agar produk daging sapi yang telah dihasilkan Peternak dapat dijual dengan standar harga perdagangan yang baik, sehingga tidak merugikan peternak sapi yang sudah bekerja keras di lapangan.

Kelima, program peternakan sapi ini harus berpihak kepada masyarakat luas, bukan berpihak kepada sekelompok pengusaha/pedagang tertentu. Tidak boleh adanya monopoli perdagangan daging, karena akan merugikan masyarakat petani dan peternak sapi lainnya. Pemerintah Pusat maupun Daerah harus mendukung dan berpihak sepenuhnya kepada program swasembada daging sapi nasional ini. Apabila ada pejabat atau kelompok pengusaha yang melanggar dan monopoli kegiatan perdagangan daging harus ditindak tegas.

Keenam, membuat program pendidikan dan pelatihan (Diklat) beternak sapi yang benar kepada prajurit dan masyarakat, agar menghasilkan produk daging yang baik dan berkualitas. Masing-masing satuan Korem dan Kodim memiliki tempat pendidikan dan pelatihan, yang meliputi kelas lapangan buat menerima penjelasan dari nara sumber, kandang sapi buat praktik, kebun rumput buat cadangan pakan dan mengolah limbah, gudang penyimpanan pakan tambahan (konsentrat), barak penampungan untuk peserta dan tenaga pelatih. Diklat tersebut digunakan pelatihan untuk prajurit dan masyarakat.

Ketujuh, kerja sama saling menguntungkan dengan instansi terkait lainnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah, agar program swasembada daging sapi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan melibatkan Bulog, Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas peternakan, Dinas perdagangan dan instansi terkait lainnya, sehingga pelaksanaan program swasembada daging sapi ini tidak ada kendala di lapangan. Tujuan kerjasama ini untuk mendukung program pelatihan, penyiapan bibit sapi yang unggul dan berkualitas, dukungan perawatan dari dokter hewan selama pelatihan dan paraktek yang sebenarnya serta dukungan penjualan dengan harga yang stabil dan menguntungkan bagi anggota dan masyarakat yang tergabung dalam program swasembada daging sapi nasional.



Sumber : Doc Pribadi

Penutup

Rekomendasi dan upaya yang disampaikan di atas diharapkan dapat menjawab Peran TNI AD mendukung terwujudnya ketahanan pangan khususnya swasembada daging sapi dalam rangka menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19, melalui Perencanaan Program, Organisasi, Pelaksanaan Program, Jaringan yang kuat dari Tim, Adanya keberpihakan kepada prajurit dan masyarakat yang tegabung dam Program ini, Pendidikan dan Pelatihan beternak sapi yang benar dan berkualitas, Kerja sama dengan Instansi terkait yang saling menguntungkan.

Rencana program swasembada daging sapi nasional yang saya buat ini, agar dapat menjadi saran dan masukan kepada Pimpinan TNI AD, untuk dapatnya berkontribusi langsung untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan khususnya swasembada daging sapi, guna menambah kesejahteraan prajurit dan masyarakat serta dapat mengurangi ketergantungan impor daging. Kegiatan ini dapat dilakukan secara terprogram dari Staf Teritorial Angkatan Darat dengan melibatkan Kodam, Korem, Kodim seluruh jajaran TNI AD dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, instansi lain dan masyarakat.

Kita menyadari bahwa pelaksanaan Program untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional khususnya swasembada daging sapi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh TNI AD dengan bekerjasama dengan bebagai pihak, yaitu Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kotamadya) dan Instansi terkait, serta masyarakat tidak mudah dijalankan,

namun dengan niat dan tekad yang kuat dari semua pihak yang tergabung dalam program ini niscaya akan terwujud, sehingga akan dapat berhasil guna dan berdaya guna, dengan cara direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Program untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional khususnya swasembada daging sapi yang dilaksanakan oleh TNI AD dengan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya, serta masyarakat luas, akan memberi kesejahteraan bagi prajurit dan masyarakat serta dapat mengurangi ketergantungan impor daging dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Buku Diklat Penggemukan Sapi Korem 081/Dsj, Maret 2020

Kolonel Inf Masduki, S.E., M.Si. adalah abituren Akmil 1992, saat ini menjabat sebagai Wadirlem Seskoad setelah sebelumnya menjabat sebagai Danrem 081/Dsj Madiun.

NN-0611: INOVASI DI MASA PANDEMI COVID-19



Major Inf Hamzah Budi Susanto, S.E.
Pasis Dikreg LIX Seskoad

"Mesin cuci tangan otomatis ini diberi nama NN-0611 (New Normal 0611), sebagai penghargaan dan kebanggaan terhadap Kodim 0611/Garut yang telah memberikan dukungan waktu, moril, dan materil sehingga Penulis dapat berinovasi menciptakan alat cuci tangan dalam rangka ikut serta meminimalisir penyebaran Covid-19"

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, Ketentuan Umum pasal 1 nomor 11, tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya adalah tugas kemanusiaan dan menanggulangi akibat bencana. Membantu dalam menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tugas TNI semata, tetapi tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi semua komponen masyarakat agar proses evakuasi, distribusi, dan pemulihan akibat bencana bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Sebagai salah satu garda terdepan dalam penanggulangan bencana, TNI dalam hal ini satuan komando kewilayahan dituntut untuk berpikir kritis dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Kemampuan tersebut menjadi kunci lahirnya kreativitas dan inovasi, antara lain dalam bentuk bagaimana anggota Satuan Komando kewilayahan mampu memanfaatkan teknologi baik konseptual, manajerial, maupun implementatif berdasarkan pendidikan maupun

Pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana dapat diwujudkan melalui kegiatan kerja sama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki sumberdaya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi mitra strategis TNI. Diharapkan melalui kerja sama yang terjalin bisa memberikan kontribusi yang kreatif dan inovatif dalam penanggulangan wabah atau bencana.

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi awal tahun 2020, dianggap sebagai bencana terbesar abad ini. Awal September 2020, WHO mencatat di seluruh dunia wabah ini telah terjadi 26,763,217 kasus dengan korban meninggal 876.616 jiwa. Wabah Covid-19 di Indonesia telah merenggut nyawa sebanyak 8.025 orang dari jumlah kasus 194.109. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menanggulangi wabah covid-19, salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang tertuang dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, berisi tentang tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Tindakan pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 terdiri dari pembatasan sosial, penggunaan masker, dan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas.

Berbagai respon diperlihatkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Tidak sedikit masyarakat baik individu, kelembagaan swasta, atau pemerintah secara swadaya menyediakan

sarana mencuci tangan. Akan tetapi, banyak dari sarana tersebut tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pencegahan atau penularan Covid-19, baik aspek teknis maupun ergonomis. Fakta di lapangan sarana tersebut tidak memenuhi aspek pencegahan penularan Covid-19 bahkan menjadi masalah baru, dalam pengendalian limbah air sisa mencuci tangan. Penggunaan sarana mencuci tangan yang masih menyentuh alat atau komponen perangkat pencuci tangan, dikhawatirkan menjadi media penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat atau dengan kata lain alat cuci tangan yang tidak higienis akan menjadi tempat paling potensial untuk menularkan Covid-19.

Berangkat dari fenomena tersebut Komando Distrik Militer (Kodim)/0611 Garut, bekerjasama dengan Teknik Informatika UIN Sunan Gunungjati Bandung, telah mengembangkan Mesin Pencuci Tangan Otomatis dengan nama New Normal 0611 (NN-0611). Mesin yang dikembangkan merupakan mesin cuci tangan digital. Komponen mesin dilengkapi dengan sensor, baik air, sabun bahkan pengering tangan. Sehingga pengguna tidak perlu melakukan sentuhan (*Touchless*) terhadap komponen atau alat-alat pada mesin. Pengguna tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus atau bakteri melalui media atau perangkat pencuci tangan. Diharapkan mesin yang penulis kembangkan menjadi bagian dari solusi alternatif yang efektif dan efisien dalam pencegahan Covid-19 di Indonesia.

2. Analisis dan Pembahasan

Usaha masyarakat dalam menyediakan sarana mencuci tangan perlu diapresiasi, sebagai bentuk tindakan tanggap terhadap penyebaran wabah covid-19. Berbagai kreativitas pun muncul terkait bentuk atau model alat mencuci tangan. Setidaknya ada tiga jenis atau model alat cuci tangan yang beredar di tengah masyarakat. Alat cuci tangan yang dibuat secara manual, mekanik, dan elektrik atau digital.

a. Alat cuci tangan manual

Alat cuci tangan ini cukup luas digunakan oleh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Digunakan sebagai wastafel sederhana di rumah atau perkantoran. Alat ini relatif murah dengan instalasi dan perangkat penunjang yang sedikit. Air bersih bisa ditampung menggunakan berbagai media, termasuk ember bekas cat.

Walau murah, alat cuci tangan manual memiliki resiko sebagai media penyebaran virus atau bakteri. Alat ini menggunakan kran air dan sabun manual, yang bisa setiap saat digunakan oleh warga, dengan tangan yang terkontaminasi virus atau bakteri. Pencemaran lingkungan menjadi masalah lain dari alat cuci tangan manual ini, air kotor bekas cuci tangan tidak ditampung pada media tersendiri, air dibuang pada pembuangan atau parit bahkan tidak sedikit dibuang ke jalan.

b. Alat cuci tangan mekanik

Secara prinsip alat cuci tangan mekanik tidak jauh berbeda dengan alat cuci tangan manual. Air dari galon dikeluarkan dengan cara diinjak, kran air akan terbuka, pengguna tidak perlu memutar kran air. Alat ini cukup banyak digunakan terutama di perkantoran dengan harga yang relatif murah.

Alat cuci tangan mekanik sangat tergantung terhadap sumber air atau pipa jalur air. Walau tidak ada sentuhan tangan pengguna dalam membuka kran air, akan tetapi sabun tangan dikeluarkan secara manual dengan menekan kran, dan alat ini tidak dilengkapi mekanisme pengendalian air kotor. Bagi pengguna yang memiliki keterbatasan dengan kaki, alat ini tidak cukup ergonomis.

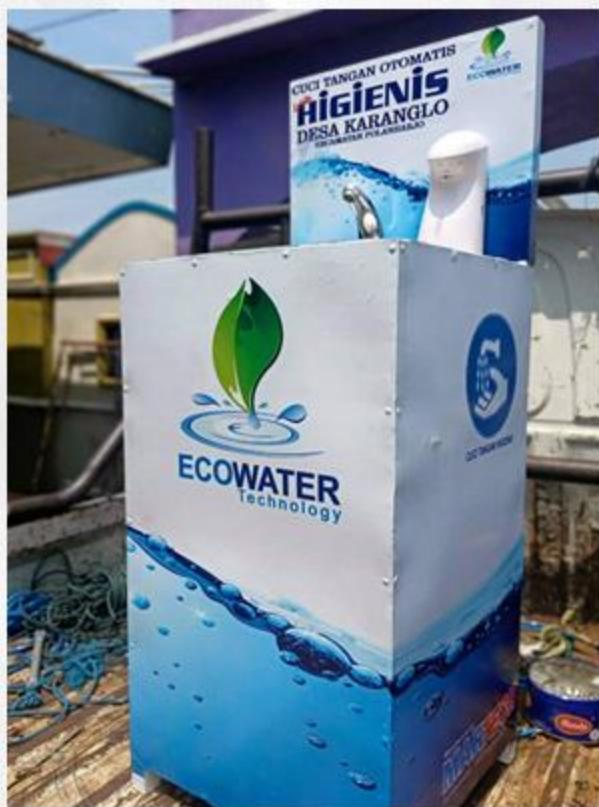


Gambar 1. Alat cuci tangan mekanik

c. Alat cuci tangan elektrik/digital

Berbeda dengan dua alat sebelumnya, mesin cuci tangan elektrik atau digital bekerja secara otomatis. Cukup ergonomis, dilengkapi dengan sensor untuk air dan sabun, memungkinkan tidak ada sentuhan tangan terhadap kran air dan sabun. Jenis alat ini umumnya telah dilengkapi dengan penampungan kotoran/air bekas cuci tangan.

Jenis alat cuci tangan ini kurang portable, pengisian air bersih umumnya mengandalkan pipa saluran air. Rangkaian elektronik dibuat parsial, mekanisme keluarnya air dibuat secara terpisah dengan sabun. Sabun pada umumnya menggunakan dispenser yang tersedia di pasaran yang telah dilengkapi dengan sensor. Tidak ada sistem peringatan baik untuk level air atau sabun. Ada risiko ketika pengisian air melebihi kapasitas media penyimpanan air. Begitu pula ketika air atau sabun dalam penampungan kosong tidak ada peringatan atau indikator akan kondisi tersebut. Tidak nampak pengaturan volume penggunaan sabun atau air. Mesin belum dilengkapi dengan mesin pengering tangan.



Gambar 2. Alat cuci tangan elektronik/digital

2. Desain

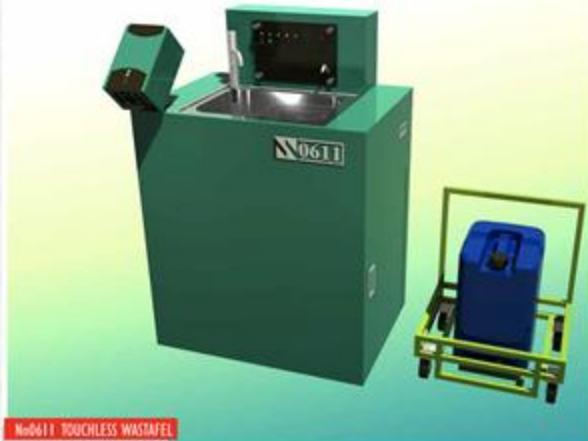
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis faktor-faktor keunggulan dan kekurangan alat atau mesin pencuci tangan yang ada, Langkah selanjutnya difokuskan pada pengembangan mesin cuci tangan elektrik atau digital tanpa harus melakukan sentuhan (Touless) dengan komponen mesin. Aspek pengembangan terdiri dari aspek teknis dan ergonomis. Diharapkan alat pencuci tangan yang dikembangkan lebih efektif, efisien, portable,

Adapun beberapa aspek yang dikembangkan antara lain adalah sebagai berikut:

- Rangkaian elektronik, mulai dari pengisian air, penggunaan air dan sabun dibuat secara terintegrasi dalam satu rangkaian elektronik.
- Apabila tidak tersedia jalur pipa saluran air, mesin dilengkapi dengan pompa mini dengan mekanisme untuk pengisian air bersih secara elektrik.
- Disediakan dua galon penampungan air bersih dan air kotor. Air kotor dilengkapi dengan trolley sehingga memudahkan dalam membuang air di tempat yang aman.
- Mesin dilengkapi dengan sensor level air untuk menghindari air melebihi kapasitas atau berada pada level minimum. Dalam kondisi air penuh atau kosong secara otomatis mesin akan interlock sehingga mesin tidak bisa digunakan.
- Mesin dilengkapi lampu indikator sebagai peringatan dini. Terdiri dari indikator air kosong, proses pengisian air, dan indikator air penuh. Sedangkan sabun cukup dengan lampu indikator kosong.
- Mesin dilengkapi dengan pengering tangan otomatis.

Mesin cuci tangan otomatis ini diberi nama NN-0611 (New Normal 0611), sebagai penghargaan dan kebanggaan penulis terhadap Kodim 0611/Garut yang telah memberikan dukungan waktu, moril, dan materil sehingga penulis dapat berinovasi menciptakan alat cuci tangan ini dalam rangka ikut serta meminimalisir penyebaran Covid-19.

Gambar rancangan dan mesin cuci tangan otomatis hasil pengembangan dijelaskan pada gambar tampak sebagai berikut:



Gambar A. Tampak Depan



N0611 TOUCHLESS WASTAFEL

Gambar B. Tampak Samping Kiri



N0611 TOUCHLESS WASTAFEL

Gambar C. Tampak Samping Kanan

*Major Inf Hamzah Budi Susanto, S.E., Pasis Dikreg LIX Seskoad TA. 2020,
adalah abituren Akmil 2003 saat ini menjabat sebagai Kasdim 0611/Garut.*



Brigjen TNI Drs Agung Zamani, M.Sc.

Sumber: Google.com

Hingar-bingar peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun 2020 Republik Indonesia baru saja berlalu. Ada satu catatan menarik yang penulis rekam, ketika kita melihat beberapa tetangga rumah di kompleks Kawasan Jakarta Barat tidak mengibarkan bendera merah putih pada 17-an Agustus kemarin. Suasana yang tentu berbeda di Kompleks Kesatrian Seskoad yang sangat semarak dengan pengibaran bendera merah putih dan nuansa Agustusan yang sangat kental. Tentu adanya gap ini menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Khusus bagi mereka yang tidak mengibarkan bendera merah putih, terlepas dari lupa atau ketidaktahuannya pada aturan dan anjuran lingkungan kelurahan. Dulu, pengibaran merah putih sebagai bendera kebangsaan sangat terasa maknanya. Semakin ke sini tampak nilai sakralnya menjadi berkurang. Ada pertanyaan yang menggilitik dalam hati, apakah rasa nasionalisme kita sudah pudar ditelan globalisasi? Sampai-sampai karena kesibukan, kita lupa mengibarkan bendera merah putih di rumah sendiri saat aturan menghendakinya. Terakhir pada saat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, semua pihak gelisah dan khawatir. Terlepas dari akibat situasi ekonomi global, ada sinyalemen yang menuduh bahwa para pelaku ekonomi kita tidak lagi nasionalis.

Belum lagi dengan adanya Pandemi Covid-19, selain aspek kesehatan yang sangat terdampak, maka sektor ekonomi menjadi sangat mencekam bahkan di ambang krisis. Banyak pihak saling menyalahkan, ketidakpercayaan pada pemangku kekuasaan dalam mengelola penanggulangan wabah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendisiplinan protokol kesehatan menambah runyam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Seharusnya semua pihak bersinergi bahu-membahu dalam satu langkah menyelesaikan permasalahan negara yang sangat krusial ini. Lantas orang mulai mempertanyakan nasionalisme warga bangsa sedang ada di mana.

Banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekhawatiran itu menjadi semakin nyata ketika menyimak apa yang dialami oleh setiap warga negara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan yang ditunjukkan dengan perilaku nasionalisme yang sangat memprihatinkan. Yang lebih menyedihkan lagi bilamana kita kehilangan wawasan tentang makna hakikat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan. Bila perilaku

nasionalisme saja sudah memudar, maka dapat dipastikan ketahanan nasional kita juga sangat rawan dan memprihatinkan.

Krisis yang dialami oleh Indonesia ini bisa jadi sangat multi-dimensional yang saling mengait. Kompleksitas masalah ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik. Pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan ujungnya menjadikan kita seolah terpecah dalam petak-petak kepentingan yang sektoral. Konflik horisontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Terlebih bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar. Kompleksitas masalah ini mengandung potensi konflik (*latent sosial conflict*) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Jangan sampai dampak krisis multi-dimensional memunculkan krisis kepercayaan dan rasa hormat diri sebagai bangsa. Krisis kepercayaan sebagai bangsa dapat berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak ada habis-habisnya mendera Indonesia. Dekadensi moral berbagai kasus korupsi dan Narkoba sampai dengan aspirasi politik untuk merdeka ataupun tuntutan referendum di daerah tertentu, dan upaya pemekaran wilayah yang tidak rasional misalnya, adalah salah satu manifestasi wujud krisis kepercayaan diri sebagai satu bangsa, satu "*nation*".

Kesan yang kemudian muncul adalah seakan-akan semangat kebangsaan kita menjadi dangkal atau ter-erosi terutama di kalangan generasi muda. Dengan kata lain sifat hedonistik materialistik telah mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan. Juga ada kekhawatiran ancaman disintegrasi bangsa, dengan berkaca pada perpecahan di negara Barat (Yugoslavia dan bekas Uni

Soviet), dan juga di negara-negara lainnya seperti di Timur Tengah saat ini, dimana paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan yang dibalut primordial sempit. Prasangka kritis yang muncul jangan-jangan ada upaya sistematis untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

"Bangsa" (*nation*) tidak bisa dilepaskan dari konsep nasionalisme. *Nation* atau bangsa merupakan konsep turunan dari nasionalisme. Disamping tentunya state (negara) dan nation state (negara bangsa). Negara sebagai gabungan dari bangsa dan merupakan komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Nasionalisme di sini diartikan sebagai paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Berisi perasaan atas dasar kesamaan asal-usul, rasa kekeluargaan, rasa memiliki hubungan-hubungan yang lebih erat dengan sekelompok orang daripada orang lain, dan mempunyai perasaan berada di bawah satu kekuasaan. Dia diperkuat oleh adanya tradisi, adat istiadat, dongeng-dongeng dan mitos-mitos, serta oleh satu bahasa yang sama, semangat kebangsaan.

Konsepsi ***nation*** atau bangsa Indonesia melekat pada asa bahwa sekalipun terdiri dari kemajemukan baik suku, agama, adat istiadat, golongan, dan lain-lain, kesemuanya terikat dalam satu keindonesiaan yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dirintis melalui Boedi Oetomo 1908 sampai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dinamika dan pasang surut sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi menunjukkan bahwa para pemimpin nasional dibutuhkan untuk mampu membangkitkan kembali nasionalisme yang kian terpuruk ditandai dengan merosotnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang semakin terpuruk. Pemerintahan pun telah berkomitmen dan melakukan upaya untuk terus meneguhkan nasionalisme di setiap elemen masyarakat.

Wawasan Kebangsaan sejatinya menjadi bagian dari '*nation and character building*'.



Sumber: Google.com

Setiap orang memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Nyatanya, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit dipahami. Namun, ada getaran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda pada setiap orang dengan naluri kejuangannya masing-masing. Bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya yang muncul melalui budaya organisasi dan jiwa korsa (*esprit de corps*).

Beberapa perilaku yang menunjukkan sikap nasionalisme dan mendukung ketahanan nasional bisa muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara perorangan atau kelompok dalam lingkup organisasi massa, organisasi sosial, dan organisasi politik *misalnya melalui upacara pengibaran bendera merah putih secara periodik ataupun saat peringatan hari besar nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada awal acara dan Bagimu Negeri pada akhir setiap acara resmi di dinas perkantoran atau pertemuan resmi organisasi sosial kemasyarakatan, hingga menghidupkan kembali seni tradisional yang mulai memudar di daerah dengan keunggulan budaya lokalnya.*

Nasionalisme sesuatu yang harus ada di hati sanubari setiap warga negara Indonesia. Dialah yang menjadikan eksistensi Indonesia akan terjaga. Nasionalisme tidak bisa ditawar-tawar untuk menjamin kedaulatan bangsa dan negara kita. Ketika drama terjadi saat para pemain sepakbola U-19 menjuarai Piala AFF 2013, sampai ke Sengketa Ambalat dengan Negara Malaysia, maka getaran nasionalisme menjadi sesuatu yang muncul secara otomatis, perjuangan tak kenal lelah, derap senasib sepenanggungan, dan satunya cita-cita. Demikian pula tentu bila datangancaman, maka getaran hati dan panggilan jiwa pasti menuntut bela atas nasionalisme yang terinjak oleh siapa pun juga. Semoga nasionalisme tetap bersemayam di hati sanubari kita mengawal cita-cita luhur menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani, M.Sc. adalah abituren Sepamilwa 1989/1990 Gelombang I dan saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Bidang Strategi dan Kawasan Seskoad.



Mayor Inf Imam Buchori, S.H.

MEMERANGI PAHAM

RADIKALISME

ALA SATUAN TEMPUR

Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga yang terdiri dari masyarakat yang heterogen dan kompleks, terdiri dari aneka ragam agama, bahasa, kebudayaan, kelompok etnik dan ras. Keanekaragaman yang dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dengan istilah multikultural menghadirkan sebuah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tajuk Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa. Menurut Agus Surya Bakti dalam bukunya Deradikalisis Nusantara (2016:18), "Indonesia akan menjadi negara yang damai dan adil, dengan semua kemajemukan yang ada dapat hidup berdampingan sebagai suatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila." Namun, kenyataan di lapangan berkata lain, segala macam bentuk ancaman datang silih berganti mengusik kedamian di berbagai wilayah tanah air untuk memecah belah persatuan dan merongrong kedaulatan bangsa. Mulai dari *devide et impera*-nya Belanda hingga paham radikalisme yang kondisinya kian "memerah" akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan penyebaran ajaran radikal ini tumbuh begitu subur di berbagai kelas umur, kelas sosial dan tidak segan-segan memasuki berbagai ruang publik seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan bahkan sudah menyebar hingga ke sekolah-sekolah umum tingkat dasar. Peran serta semua pihak tentunya sangat dibutuhkan dalam upaya menangkal penyebaran pengaruh paham radikal ini. TNI AD sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI di darat pun tidak lepas dalam tanggung jawab ini. Pengejawantahan Undang-undang RI

Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 8d, berupa sistem pembinaan teritorial di wilayah darat Indonesia mengamanatkan kepada TNI AD termasuk di dalamnya Komandan Satuan Non Komando Kewilayahan (Dansatnonkowil) dalam hal ini Danyonif untuk melakukan upaya nyata guna menciptakan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh bagi kedaulatan negara.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, masih ditemui beberapa kendala terkait belum optimalnya upaya binter satnonkowil diantaranya rendahnya kesadaran dan kemauan prajurit dalam bergaul secara benar dan terarah di masyarakat; kurang pekanya prajurit dan masyarakat dalam mendeteksi bahaya paham radikalisme yang berkembang di lingkungan sekitar serta terbatasnya kemampuan dalam upaya penanganannya.

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa persoalan yang perlu dipecahkan, yaitu terbatasnya persepsi prajurit akan kegiatan binter satnonkowil, keterbatasan pemahaman prajurit dan masyarakat tentang bahaya paham radikalisme dan distorsi pemahaman prajurit akan pola penanganan kasus penyebaran paham radikal dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Dari uraian persoalan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu **bagaimanaakah peran satuan tempur dalam memerangi paham radikalisme di wilayah binaanya sebagai Satnonkowil**. Untuk menjawab pokok permasalahan ini maka penulis mencoba untuk memberikan analisis dari berbagai sudut pandang yang ada.

Dari penjelasan di atas, maka pentingnya tulisan ini adalah agar para awak Satpur mempunyai pemahaman mengenai paham radikalisme dan penyebarannya di masyarakat. Sebagai acuan, dalam penulisan esai ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan pengamatan di lapangan dan pendekatan secara empiris serta studi kepustakaan.

Adapun nilai guna yang dapat dipetik adalah agar pembaca mengetahui upaya-upaya awak Satpur dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah binaannya sebagai Satnonkowil untuk menjaga tetap kokohnya persatuan dan kesatuan. Agar tulisan ini dapat memberikan kontribusi efektif, maka diperlukan adanya batasan pada pembahasan yang akan berfokus pada langkah-langkah sederhana yang dilaksanakan baik di intern Yonif maupun di wilayah binaan berupa upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan pendekatan lunak (*soft approach*) yang berkesinambungan pada tataran taktis.

Pembahasan

Menyikapi permasalahan di atas maka diperlukan suatu pemahaman yang logis tentang masalah keterbatasan akan pemahaman dan penanganan terhadap paham radikalisme yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan mencoba mengurai secara rinci pokok permasalahan di atas sehingga tercipta sebuah konsep yang sederhana namun efektif untuk menjaga tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Pertama, Terbatasnya Pemahaman Prajurit tentang Binter Satnonkowil. Masih banyak ditemui bahwa prajurit pada umumnya tidak tahu atau kalau pun tahu hanya sebatas pernah mendengar dan tidak memahami esensinya. Keterbatasan pemahaman ini bisa dimaklumi karena beberapa alasan: pertama. kurangnya penerapan kegiatan binter satnonkowil di satuan dihadapkan tuntutan tugas pokok sebagai satuan tempur; kedua. Terbatasnya referensi yang berkaitan tentang binter di Yonif dikarenakan referensi yang ada hanya terfokus pada bidang latihan tempur; ketiga. Lokasi Yonif yang rata-rata jauh dari komunitas masyarakat atau perkampungan

penduduk. Menyikapi permasalahan di atas maka harapan yang diinginkan adalah kesadaran prajurit akan pentingnya kegiatan Binter, motivasi serta kemauan yang tinggi sebagai seorang prajurit dalam peran dan aktualisasi pada kegiatan serta kesadaran unsur pimpinan untuk memberi perhatian mengenai Binter.

Undang-undang mengamanatkan TNI untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Guna melaksanakan tugas tersebut, ditetapkan fungsi Pembinaan Teritorial sebagai salah satu fungsi dalam organisasi TNI AD. Berdasarkan Buku Petunjuk Induk tentang Binter No. Skep / 106 / XII / 2011 tanggal 7 Desember 2011 bahwa Satnonkowil dapat melaksanakan metode Binter seperti yang dilakukan Satkowil secara terbatas yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil, dan Komunikasi sosial.

Berbekal dari penjelasan di atas, kendala yang kerap dihadapi dalam memecahkan persoalan-persoalang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah yang pertama, bahwa program Binter Satnonkowil di Yonif sebagai salah satu tugas pokok satuan belum menjadi prioritas utama. Yang kedua, terputusnya rantai komunikasi antar unsur pimpinan dan bawahan sehingga pesan-pesan yang menjadi penekanan pimpinan tidak tersampaikan.

Untuk menjawab kendala dan kelemahan di atas, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu yang ***pertama***, dimulai dari pembentukan personel yang akan mengawaki kegiatan Binter. Adanya interseksi antara Buku Petunjuk Induk tentang Binter No. Skep / 106 / XII / 2011 Tanggal 7 Desember 2011, dan Bujukmin tentang Pembinaan Satuan Infanteri No. Skep / 807 / XI / 2015 Tanggal 13 November 2015 dapat digunakan sebagai payung hukum dalam membentuk postur prajurit teritorial di Yonif. Upaya yang ***kedua*** adalah meningkatkan kepedulian dari unsur pimpinan di satuan baik melalui media formal ataupun nonformal seperti contoh obrolan ringan di sela-sela kegiatan latihan, berkunjung ke rumah anggota secara spontan dan masih banyak kegiatan lain yang sifatnya *face to face leadership*. Upaya ***ketiga*** adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas referensi ataupun literatur tentang Binter dan kondisi

ter update wilayah sekitar berupa media cetak, buku-buku bacaan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas jaringan internet di satuan.

2. Kedua, Kurangnya Pemahaman Prajurit dan Masyarakat tentang Bahaya Paham Radikalisme. Pasca-peristiwa 9/11 dan dideklarasikannya Perang Global Melawan Teror oleh Amerika Serikat, dengan Bom Bali I sebagai *tipping point* di dalam negeri merupakan sebuah koneksi antara terorisme global dengan peristiwa teror yang terjadi di tanah air. Sejarah dan perkembangan kasus-kasus yang berkaitan dengan radikalisme dan berujung ke terorisme ini selayaknya menjadi perhatian awak Satpur sebagai Bapulkes termasuk juga masyarakat di wilayah binaan Yonif.

Aksi-aksi teroris yang terjadi di berbagai pelosok tanah air, termasuk penangkapan gembong teroris oleh Densus 88 di tengah perkampungan rakyat seperti yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah sudah cukup membuktikan bahwa masyarakat "kecolongan" terhadap penyebaran paham radikal ini. Selain itu, kasus penangkapan satu keluarga terduga teroris di Tasikmalaya pada 15 Desember 2006 merupakan bukti nyata bahwa teroris ada "di sebelah rumah kita". Keterbatasan pemahaman terhadap karakter ataupun tanda-tanda paham radikalisme ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain minimnya sosialisasi, dampak negatif dari perkembangan teknologi dan terbatasnya referensi.

Radikalisme mempunyai lingkup kepentingan yang berbeda-beda mulai dari lingkup politik, keagamaan, ekonomi maupun sosial yang intinya ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realita atau ideologi yang dianutnya. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari lingkungan pada umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Sementara itu tidak ada definisi yang benar-benar tepat dalam menggambarkan terorisme,

definisi. Untuk menghindarkan dari bias antara terorisme dan kriminal biasa maka menurut Hoffman dalam bukunya *Inside Terorism* (2006:40),

"Setidaknya ada lima pembatasan dalam mengkategorikan suatu tindakan atau aksi yaitu : satu. Membawa tujuan politis dalam setiap motif dan tindakannya; dua. Ada unsur kekerasan atau paling penting ancaman penggunaan kekerasan; tiga. Dirancang untuk dapat mempunyai efek psikologis yang luas yang berakibat terhadap pihak yang di luar korban atau target langsung; empat. Dilakukan baik oleh organisasi dengan identitas rantai komando ataupun struktur sel kelompok anggota yang tidak mengenakan seragam atau lencana identifikasi. Atau bisa juga dilakukan oleh individu maupun kelompok kecil individu yang dipengaruhi, termotivasi atau diilhami oleh tujuan ideologis; lima. Dilakukan oleh kelompok subnasional atau entitas non negara."

Karena itulah, definisi yang dijadikan dasar oleh negara Indonesia dalam melihat terorisme pun tidak dilepaskan dari lima komponen tersebut. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan kedua ini adalah: **satu.** Memberikan sosialisasi secara berkesinambungan kepada prajurit di satuan tentang bahaya radikalisme; **dua.** Setelah prajurit paham, maka kini saatnya memberikan sosialisasi ke masyarakat. Bercerita dengan luwes, tidak kaku namun mengandung pesan tertentu akan sangat efektif dilakukan daripada menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bersifat formal seperti penyuluhan; **tiga.** Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk saling sharing informasi. Prajurit dan masyarakat dapat bertukar pikiran dan bertukar informasi terhadap perkembangan di wilayah sekitar melalui media sosial dalam suatu komunitas (grup).

3. Ketiga, Distorsi Pemahaman Prajurit dan Masyarakat akan Pola Penanganan Radikalisme. "Secara umum, strategi

penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *hard power* (keras) dan pendekatan *soft power* (lunak) yang dikombinasikan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif" (Putri, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia, 2018:3). Pemahaman tentang pola penanganan sangat dibutuhkan agar timbul kemantapan hati dalam memerangi penyebaran paham radikal di masyarakat.

Dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan :

"Teroris adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional."

Aksi terorisme bukan merupakan hal baru bagi negara kita, sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi terorisme selalu ada dalam bentuk dan motif yang berbeda-beda. Tentu saja dengan pola penanganan yang berbeda pula. Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT sebagai leading sector pemberantasan terorisme dan paham radikalisme, menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Telah tercapai konsensus di tingkat nasional bahwa penggunaan hard power atau langkah-langkah yang represif saja tidak cukup. Untuk itu, BNPT menggunakan dua strategi penanganan soft power yakni kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Strategi pertama yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Sedangkan deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatian dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham

radikal mereka. Namun perlu diketahui pula bahwasannya ada perbedaan yang cukup signifikan terkait dua strategi andalan BNPT di atas. Yang pertama, secara operasional, "proyek" deradikalisasi belum menjadi program pemerintah yang mandatnya diberikan pada lembaga tertentu dengan alokasi anggaran dan kurikulum tertentu sehingga strategi ini masih sangat abstrak di Indonesia. Yang kedua, meskipun konsep tentang deradikalisasi dilandaskan pada prinsip-prinsip pendekatan jiwa, humanis dan menyentuh akar rumput, namun deradikalisasi masih mendapatkan tentangan dari beberapa kalangan masyarakat. Sementara itu, kontra radikalisasi/kontra ideologi yang diarahkan pada elemen masyarakat yang belum tersentuh paham berbahaya ini merupakan elemen strategi penanggulangan terorisme di Indonesia yang perlu ditingkatkan karena relatif lebih mungkin dilakukan daripada deradikalisasi. Disamping itu, karena ideologi dipandang sebagai faktor penyebab utama terorisme di Indonesia, kontra/deideologi merupakan hal yang mau tidak mau harus dijalankan sebagai strategi anti terorisme jangka panjang.

Menyikapi penjelasan di atas, maka upaya yang dapat dilakukan Danyonif sebagai awak Satpur antara lain: *satu*. Merancang sebuah konsep kegiatan Binter yang sederhana namun mengena di masyarakat wilayah binaan. Upaya ini dapat diwujudkan dengan kegiatan olahraga bersama ataupun menyelenggarakan pertandingan sesuai hobi masyarakat di wilayah binaan; *dua*. Menyelenggarakan kegiatan yang dititikberatkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan dalam wujud fisik maupun non fisik. Upaya ini dapat diwujudkan dengan salah satu metode binter yaitu kegiatan bhakti TNI dalam wujud bakti sosial, karya bakti yang bisa dilaksanakan saat bertepatan dengan ulang tahun satuan, sehingga momennya tepat. Perlu menjadi perhatian bahwa dalam upaya kedua ini program yang dilaksanakan hendaknya mampu membantu terlaksananya program binter Satkowil, pemerintah setempat dan dapat mewujudkan perlawanannya wilayah dalam kesiapan perang berlarut; *tiga*. Untuk menyelaraskan upaya kedua, maka koordinasi dan komunikasi melekat dengan stakeholder yang ada di wilayah binaan sangat

dibutuhkan. BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme kini mempunyai FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Dalam Forum inilah seorang Danyonif dapat bersinergi dengan elemen masyarakat lain dalam usahanya mencegah penyebaran paham radikal; *empat*. Membantu Satkowil setempat dalam program kontra ideologi di wilayah binaan karena otoritas utama program ini berada di bawah naungan BNPT yang dipanjangtangkan oleh Satkowil setempat, sehingga peran Yonif disini tentu saja memiliki batas-batas tertentu.

Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya bahwa strategi kontra radikalisasi ini relatif lebih mungkin dilakukan daripada deradikalisasi, maka sudah selayaknya mendapat perhatian khusus sebagai salah satu strategi jangka panjang. Wujud nyata dalam upaya ini antara lain: ***pertama***. Menjaga kelestarian kearifan lokal di wilayah binaan dalam rangka membentengi masyarakat dari bahaya paham radikal. Seperti kita ketahui bersama bahwa belakangan ini arus globalisasi boleh dikatakan telah mengusik tatanan budaya bangsa. Alih-alih memberikan kemudahan di berbagai sisi kehidupan, globalisasi dengan teknologinya tengah juga mencoba merusak norma-norma gotong royong dan kebersamaan dengan upayanya untuk menyuguhkan segala sesuatu yang serba *instant*; ***kedua***. Membantu menangkal pengaruh paham radikal pada generasi muda di wilayah binaan. Menyulap kata-kata Quintan Wiktorowicz “*an individual becomes receptive to the possibility of new ideas and worldviews*” (Beutel, Radicalization and Homegrown Terrorism in Western Muslim Communities: Lessons Learned for America, 2007:4). Berdasarkan literatur tersebut, masa transisi krisis identitas kalangan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa yang disebut sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan mereka sangat rentan terhadap pengaruh dan ajakan kelompok

kekerasan dan terorisme. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan generasi muda, dalam rangka menangkal pengaruh paham dan ajaran radikal yakni 1) tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, 2) perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, 3) bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya, 4) membangun jejaring dengan komunitas damai baik offline maupun online untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Disinilah peran agen-agen Binter Yonif yaitu membantu menanamkan jiwa nasionalisme dengan membuat kegiatan yang positif seperti misalnya kompetisi olahraga, lomba-lomba tradisional dalam rangka “17-an” dan masih banyak contoh lain. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membentengi generasi muda sebagai pihak yang paling rentan disusupi paham radikalisme.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang harus dipecahkan, antara lain; ***Pertama*** : Kurangnya pemahaman prajurit akan Binter Satnonkowil maka upaya yang dapat dilakukan yaitu membentuk prajurit Yonif sebagai agen-agen Binter, meningkatkan kualitas dan kuantitas referensi tentang Binter yang ada di satuan. ***Kedua***, kurangnya pemahaman prajurit dan masyarakat akan bahaya penyebaran paham radikalisme. Maka upaya yang dilakukan yaitu memberikan pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah kegiatan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan serta menyentuh kalangan generasi muda yang rentan, bekerjasama dan berkordinasi secara melekat dengan Satkowil dan pemerintah setempat agar program yang dilaksanakan berjalan secara harmonis dan selaras dan menggalakkan kembali Siskamling dan protap wajib lapor di wilayah binaan. ***Ketiga***, distorsi pemahaman prajurit dan masyarakat tentang pola penanganan radikalisme, maka upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan Binter yang sederhana dan mengena,

menyelenggarakan kegiatan yang menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk membantu menangani masalah sosial masyarakat, berkordinasi dengan *stakeholder* setempat agar program yang dilaksanakan sejalan dan membantu Satkowil dalam pola penanganan kontra radikalisme terutama pada target generasi muda yang rentan.

Dari kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para Danyonif yang mengepalai awak Satpur agar: **satu**. Memberikan perhatian kepada pola pembinaan prajurit dalam rangka membentuk postur Bapulkes sekaligus agen-agen Binter Satnonkowil dalam rangka memerangi paham radikalisme di wilayah binaan Yonif; **dua**. Bekerjasama dengan pemerintah setempat agar menggalakkan kembali secara serentak di seluruh wilayah negeri program Siskamling, protap wajib lapor dan kearifan lokal lainnya. **tiga**. Bersama BNPT di wilayah sebagai leading sector penanggulangan terorisme untuk merancang konsep keterlibatan Yonif selaku Satnonkowil dalam pencegahan paham radikal terutama dalam sisi pencegahan *soft power* melalui program kontra radikalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Mabesad, 2011 Buku Petunjuk Induk tentang Binter, Jakarta : Mabesad
 Mabesad, 2015 Bujukmin tentang Binsat Satuan Infanteri, Jakarta : Mabesad
 SB, Agus, 2016 Deradikalisasi Nusantara : Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme, Jakarta : Daulat Press

RUJUKAN ELEKTRONIK

- Ariwibowo,Joko.2018.Siskamling, Medsoc Paling Efektif Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme.Melalui <https://www.oranyenews.com/news/hukum-kriminal/2018/02/6732/siskamling-medsos-paling-efektif-deteksi-dini-radikalisme-dan-terorisme>
- Bappenas.2011.Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme. Melalui www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6159/
- Beutel, Alejandro.2007. Radicalization and Homegrown Terrorism in Western Muslim Communities: Lessons Learned for America. Melalui <http://www.minaret.org/MPAC%20Backgrounder.pdf>
- BNPT. 2016. Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS. Melalui <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf>
- Burgoon,Brian.2006. On Welfare and Terror: Social Welfare Policies and Political-Economic Roots of Terrorism,The Journal of Conflict Resolution. Melalui <http://www.jstor.org/stable/27638483>

Major Inf Imam Buchori, S.H (Pasis dikreg LIX) adalah abituren Akmil 2006 dan penerima penghargaan Adhi Makayaksa, saat ini menjabat sebagai Wadanyon-12 Grup-1 Kopassus.



BEDAH BUKU



CHINA'S LOGISTICS CAPABILITIES FOR EXPEDITIONARY OPERATIONS



Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos

Sebelum pelaksanaan reformasi ekonomi dan perdagangan sekitar 40 tahun lalu, Tiongkok merupakan negara yang cukup terisolasi dari perekonomian dunia sehingga tidak bisa berkembang. Ditambah dengan kebijakan ekonomi terpusat menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara yang miskin di dunia. Namun, sejak kebijakan dibukanya perdagangan dan investasi internasional pada tahun 1979, perekonomian Tiongkok tumbuh sangat pesat. Bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau *gross domestic product* (GDP) sebesar 9,5 % sampai dengan 2018. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tersebut Tiongkok berhasil mengentaskan sekitar 800 juta penduduk dari kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat diikuti dengan pengembangan kekuatan militer Tiongkok atau *People's Liberation Army* (PLA). Reformasi militer yang dimulai tahun 2015 bertujuan untuk membuat PLA lebih kuat, lebih efisien secara organisasi serta dilengkapi dengan perlengkapan dan persenjataan yang canggih dan mutakhir. Sasaran pembangunan kekuatan militer sampai dengan tahun 2030 adalah;

pertama, untuk mendapatkan penguasaan perairan di antara pulau-pulau yang dimiliki, termasuk perairan Laut China Selatan dan Laut China Timur, yang kemudian nanti memasang tarif untuk penggunaan akses. **Kedua**, memiliki kemampuan untuk berperan serta dalam operasi militer di dunia, baik operasi perdamaian dunia maupun operasi kemanusiaan. **Ketiga**, mempertahankan kepentingan ekonomi Tiongkok di luar negeri, terutama investasi infrastruktur melalui program *Belt and Road Initiatives* (BRI), maupun kepentingan perusahaan dan warga negara Tiongkok yang berada di luar negeri. Secara garis besar reformasi militer dibedakan menjadi reformasi organisasi dan reformasi kemampuan militer. Contoh reformasi organisasi militer adalah penghapusan 7 (tujuh) Kotama Angkatan Darat dan 3 (tiga) Armada Laut yang kemudian digantikan dengan pembentukan 5 (lima) *Theater Command* yang merupakan kotama gabungan antar angkatan PLA (semacam Kogabwilhan di TNI). Tujuan pembentukan satuan gabungan adalah untuk memusatkan kepemimpinan (*command and control*) sehingga memudahkan pengawasan dan menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan salah satu poin reformasi di bidang kemampuan yang diharapkan dari PLA adalah kemampuan untuk melaksanakan operasi ekspedisi. Yang dimaksud operasi ekspedisi dalam tulisan ini adalah operasi militer Tiongkok (PLA) di luar negeri, secara umum di luar Laut China Selatan dan Laut China Timur, yang membutuhkan pengiriman bekal ulang atau pangkalan luar

negeri. Dengan demikian, maka kegiatan PLA di Asia Tengah tidak termasuk di dalam tulisan ini.

Agar dapat melaksanakan operasi ekspedisi dengan baik maka PLA sudah berupaya membangun kekuatan militer serta fasilitas pendukungnya, termasuk di bidang logistik. Seiring dengan semangat reformasi militer Tiongkok (PLA), satuan logistik pun direformasi agar dapat memenuhi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Di tingkatan Mabes Angkatan atau *Central Military Commission (CMC)*, dibentuklah *Logistic Support Department (LSD)* yang bertugas untuk menentukan kebijakan strategis di bidang logistik, serta tugas-tugas lain di bidang logistik yang bersifat strategis. Sementara sebagai pelaksana dibentuk *Joint Logistic Support Force (JLSF)* di tingkat kotama/theater command. JLSF bertugas untuk melayani kebutuhan logistik kotama/theater command yang merupakan satuan gabungan antar angkatan. Pada waktu damai JLSF berada di bawah kendali pusat (LSD). Namun, pada saat terjadi perang maka kendali berubah ke tiap-tiap Kotama. Hasil dari reformasi sistem logistik gabungan sudah nampak hasilnya dari meningkatnya kompetensi satuan logistik gabungan melayani kebutuhan logistik kepada 5 kotama/theater commands baik di masa damai maupun di medan pertempuran, serta mempengaruhi proses dan mekanisme yang diciptakan untuk melindungi kepentingan Tiongkok secara global.

Gelar Pangkalan Angkatan Laut (PLAN)

Tujuan dari pengembangan militer dan kemampuan militer Tiongkok khususnya kemampuan melaksanakan operasi ekspedisi secara bertahap adalah sebagai berikut:

- Jangka pendek (2020-2025): mampu memenangkan semua perang terbatas di perairan/maritim dengan memusatkan kekuatan pada daya angkut laut dan udara.
- Jangka menengah (2025-2030): memusatkan kekuatan kepada negara dan regional di antara *belt and road* dan



(Pelabuhan Sittwe, Myanmar yang dibangun tiongkok)

area yang menjadi kunci pokok dunia.

- Komersil Tidak Langsung, fasilitas komersil yang secara tidak langsung mendukung operasi militer Tiongkok (PLA). Kapal niaga yang berangkat dari pelabuhan *belt and road initiative (BRI)* adalah sebagai angkatan laut Tiongkok.
- Komersil Langsung, fasilitas komersil yang secara langsung mendukung operasi militer Tiongkok (PLA). Contoh satgas AL Tiongkok melaksanakan bekal ulang di pelabuhan sipil yang dikuasai/dikelola Tiongkok di luar negeri.
- Logistik Militer, fasilitas logistik militer resmi yang berada di luar negeri. Saat ini Tiongkok sudah memiliki pangkalan logistik di Djibouti yang akan mendukung operasi ekspedisi di kawasan sekitarnya.
- Pangkalan militer, pangkalan resmi di luar negeri yang dilengkapi peralatan tempur untuk mendukung operasi defensif. Diproyeksikan PLA akan memiliki sekurangnya 18 pangkalan militer internasional dalam waktu 10 tahun yang akan datang.

Beberapa pangkalan militer strategis yang diproyeksikan akan dibangun militer Tiongkok di masa yang akan datang antara lain di Daro Sakor Kamboja yang akan digunakan untuk mendukung operasi militer. Selain itu diperkirakan PLA juga akan membangun pangkalan militer di Khartoum Sudan yang akan digunakan untuk menempatkan pesawat strategis angkut udara PLAAF Il-76 untuk mendukung operasi ekspedisi udaranya. Sedangkan untuk mengamankan investasi dan kepentingannya di Amerika Latin, Tiongkok akan menyiapkan Pangkalan militer di Terceira, Portugal. Prioritas pengembangan militer Tiongkok dalam melaksanakan operasi ekspedisi adalah angkatan laut (PLAN), termasuk di dalamnya adalah pasukan Marinir (PLANMC), dan angkatan udara (PLAAF). Oleh karena itu, dalam buku ini hanya akan dibahas pengembangan ketiga pasukan tersebut.

1. Kemampuan Ekspedisi Angkatan Laut (PLAN).

Kemampuan ekspedisi angkatan laut Tiongkok meningkat pesat dengan didirikannya pangkalan militer internasional pertama di Djibouti. Pembangunan pangkalan militer ini merupakan salah satu implikasi pendanaan investasi melalui program *belt and road initiative* (BRI). Untuk memenuhi kebutuhan *supply ships*, angkatan laut (PLAN) sudah merestorasi dan meningkatkan kemampuan kapal-kapal lamanya. Beberapa kapal perang lama juga direstorasi menjadi *supply ships*. Alhasil yang semula hanya memiliki 3 *supply ships*, sekarang PLAN sudah bisa mengerahkan 17 *supply ships* untuk mendukung operasi ekspedisinya ke Timur Tengah dan Afrika. Proyeksi angkatan laut Tiongkok (PLAN) ke depan adalah mendominasi Samudera Hindia. Oleh karena itu, PLAN menargetkan sebelum 2030 harus memiliki kemampuan ekspedisi dan *sustain operations* di atas India. Kemampuan minimum yang dimaksud adalah memiliki 3 kapal induk, 41 kapal destroyer, 77 kapal frigate, dan 87 kapal selam.

dock/LSD yang mampu mengangkut 2.600 pelaut dan marinir untuk melaksanakan operasi selama 15 hari.

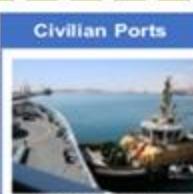
Untuk mendukung kebutuhan logistik operasi ekspedisinya, angkatan laut Tiongkok menggunakan beberapa metode bekal ulang logistik, yaitu:

- a. Kapal logistik pendamping, yaitu dengan mengikutkan kapal logistik dalam pengerahan gugus tugas ekspedisi. Jenis kapal yang digunakan antara lain tipe 908, 903, dan 903A.
- b. Pelabuhan Sipil. Angkatan laut Tiongkok menggunakan fasilitas pelabuhan sipil untuk melaksanakan bekal ulang sekaligus kunjungan persahabatan, diantaranya Djibouti, Perancis, Yunani, Indonesia, Italia, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Srilanka, dan Yaman. Pelabuhan sipil digunakan untuk media diplomasi dan fasilitas kepentingan strategis lainnya.
- c. Markas Logistik Internasional. Saat ini militer Tiongkok baru memiliki 1 markas logistik internasional yaitu di Djibouti, namun terus mengupayakan pembangunannya di beberapa kawasan strategis di dunia.



Accompanying Ships

Task force's replenishment ship (i.e. Type 903A | Type 903) is sufficient for deployment



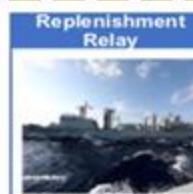
Civilian Ports

Task force uses civilian ports in friendly country for replenishment stop (i.e. the Port of Salalah, Oman)



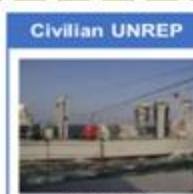
Logistics Bases

The PLAN uses its logistics base in Djibouti, or develops additional logistics-focused military bases



Replenishment Relay

Task force uses an already-deployed replenishment ship as a "mobile supply point" to replenish en route to other objective



Civilian UNREP

Task force rendezvous with a civilian ship to provide replenishment

2. Kemampuan Ekspedisi Korps Marinir

Selain angkatan laut, pengembangan kekuatan Korps Marinir (PLANMC) juga menjadi prioritas. Penambahan personel sampai dengan 35.000 prajurit yang merupakan hasil transfer dari reorganisasi angkatan darat Tiongkok. Dalam pengembangan kekuatan Korps Marinir mengadopsi konsep operasi marinir Amerika Serikat yaitu *US Marines Expeditionary Unit (Special Operations Capable)* atau MEU (SOC). Untuk itu maka satuan Marinir akan dilengkapi dengan *amphibious assault ships*, *landing platform dock/LPD*, serta *landing ships*

d. *Bekal Ulang di Perjalanan* atau *Underway Replenishment (UNREP)*. Metode ini digunakan untuk mentransfer BBM, munisi, dan kebutuhan lainnya antar kapal yang sedang berlayar. Saat ini angkatan laut Tiongkok sedang mengembangkan *Civilian Unrep*, yaitu menggunakan kapal sipil yang sedang berlayar untuk sarana bekal ulang kapal militer yang sedang melaksanakan operasi ekspedisi.

e. Metode titik bekal mobile. Melaksanakan bekal ulang logistik di titik-titik yang sudah disiapkan.

3. Kemampuan Ekspedisi Angkatan Udara (PLAAF). Sasaran strategis pengembangan angkatan udara adalah untuk meningkatkan kemampuan PLAAF melaksanakan operasi ekspedisi, yaitu kemampuan angkut personel, materiil, muhandak, dan kebutuhan logistik lainnya, serta kemampuan serangan jarak jauh. Untuk kepentingan tersebut maka PLAAF terus mengembangkan pesawat jet Y-20 yang mampu mengangkut BBM sampai dengan 90 ton. Berdasarkan *Chinese military and civilian integration development report*, pada tahun 2030 PLAAF diperkirakan akan memiliki 100-125 pesawat Y-20 yang mampu mengangkut personel hingga 10.000 orang. Sedangkan penggerahan pesawat tempur dan bomber di luar negeri masih sangat terbatas dikarenakan terbatasnya fasilitas Lanud internasional Tiongkok.

Pada bab terakhir dibahas bagaimana organisasi sipil berkontribusi pada pelaksanaan operasi ekspedisi militer Tiongkok melalui konsep teknologi penggunaan ganda (*dual-use technology*) dan fusi/integrasi militer-sipil yang lebih luas. Dalam *concept of operations* militer Tiongkok, keterlibatan sipil dalam operasi ekspedisi sudah sangat diperhitungkan, baik untuk memberikan dukungan kepada angkatan laut/PLAN maupun angkatan udara/PLAAF. Pertama, akan dibahas peran sipil dalam mendukung angkatan laut PLAN.

a. Penggunaan fasilitas pelabuhan sipil di luar negeri. Pelabuhan sipil yang saat ini dikuasai atau dikelola oleh Tiongkok yang berada di luar negeri digunakan untuk akomodasi dan tempat melaksanakan bekal ulang kapal militer Tiongkok.



b. Perusahaan ekspedisi *China Ocean Shipping Group (Cosco)* merupakan perusahaan shipping terbesar ke tiga di dunia yang mengoperasikan lebih dari 360 kapal kontainer dari 53 terminal di 37 pelabuhan besar di seluruh dunia. Terminal tersebut selain digunakan untuk melayani kapal sipil juga telah disiapkan fasilitas untuk melaksanakan bekal ulang kapal perang PLAN. Selain pelabuhan, kapal kontainer juga disiapkan untuk mendukung operasi ekspedisi yaitu dengan melaksanakan bekal ulang kapal militer di laut lepas. Menurut Issac Cardon (*Assistant professor China Maritime Studies Institute/CMSI*), armada Cosco merupakan yang paling memungkinkan untuk mendukung operasi ekspedisi Tiongkok dikarenakan kuantitas yang besar (total daya angkut lebih dari 10.000 kontainer) dan kecepatan yang mencapai lebih dari 20 knot.

c. Pada bulan November 2018 Sinotrans CSC, perusahaan Tiongkok lainnya yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, telah dilibatkan dalam latihan militer yang meliputi kegiatan koordinasi, transportasi pasukan, komunikasi, penyelamatan kebakaran, dan situasi darurat lainnya.

d. Penggunaan kapal jenis Roll on-Roll off (Ro-Ro) untuk mendukung operasi militer jarak jauh. Diperkirakan sekitar 63 kapal Ro-Ro sudah dimodifikasi sesuai konsep *dual-use technology* untuk mendukung operasi militer Tiongkok, sebagai contoh pada bulan Februari 2018 kapal Ro-Ro sudah digunakan untuk mengangkut munisi dan telah memenuhi standar transportasi militer.

e. Penggunaan Tanker sipil untuk mendukung operasi ekspedisi PLAN. Perusahaan Ningbo Shipping Co. dan perusahaan *The China Shipping Group Huachuan* telah membuat perjanjian dengan militer Tiongkok untuk menyiapkan kapal tanker yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan militer Tiongkok dalam mewujudkan kepentingannya. Keunggulan kapal tanker untuk mendukung operasi ekspedisi adalah memiliki mesin yang kuat. Selain itu kapal tanker juga memiliki kabin yang luas untuk mengangkut personel dan peralatan militer. Tanker juga sangat cocok untuk bekal ulang BBM di laut lepas dikarenakan kapasitas yang besar.

Kedua, akan dibahas dukungan aset sipil Tiongkok dalam mendukung angkatan udara Tiongkok (PLAAF). Para pengamat militer Tiongkok melihat fusi/integrasi sipil-militer sangat penting untuk pengangkutan udara strategis karena PLAAF sendiri memiliki keterbatasan sehingga memerlukan penggunaan seluruh aset nasional. Perusahaan yang telah melakukan perjanjian dengan PLAAF adalah SF Express dan JD Logistics. Kedua perusahaan tersebut menyediakan dukungan logistik kepada PLAAF dengan berbekal rantai pasokan yang matang dan pengalaman pengiriman. Keduanya berkomitmen akan membangun berbagai platform informasi dan visualisasi data bersama dengan PLAAF. Di samping itu mereka juga akan memberikan pelatihan dan dukungan personel untuk Airforce Logistic Department. Lebih dari itu SF Express dan JD Logistics juga memberikan dukungan PLAAF berupa pesawat nirawak dan pesawat amphibi.



Tiongkok membangun dengan cepat kemampuan militer dengan menciptakan teknologi pertahanan termasuk di dalamnya pesawat nir awak dan sistem otomatis, kecerdasan buatan, senjata *hypersonic* dan senjata/peluru kendali dll. Dan untuk mendukung operasi ekspedisinya Tiongkok telah merancang dan menyiapkan segala kebutuhan logistik di segenap penjuru dunia.

Major Kav Barid Budi Susila, S,Sos. adalah abituren Akmil 2004 dan merupakan lulusan Sesko Thailand "Royal Thai Army Command and General Staff College", saat ini menjabat sebagai Kabagminops Setkordos Seskoad.





SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani